

EDUKASI

K E U A N G A N

PKN

STAN

Edisi 27/2015

ISSN: 2086-4833



9 772086 483008

Hal🎧 BPPK
021-29054300



Hubungi kami untuk informasi:
Diklat Keuangan Negara
beasiswa
STAN
pengaduan dan saran

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Jam Layanan:
Setiap Hari Kerja pkl 08.00 - 16.00 WIB

Daftar Isi

Salam Redaksi	2
Lintas Peristiwa	4
Liputan Utama	6
Liputan Khusus	14
Kuis	18
Profil	19
Serambi Ilmu	23
Mata Air	53
English Corner	55
Tips n Trik	58
Klinik Sehat	61
Selasar	62
Kalender Diklat	63
Resensi	64

Salam Redaksi

Salam Transformasi Kelembagaan.

Kementerian Keuangan memasuki momentum penting dalam sejarah perkembangannya. Setelah melewati masa Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan memasuki masa Transformasi Kelembagaan. BPPK sebagai salah satu unit eselon I di dalamnya turut serta menyambut dan mengambil peran penting dalam mendukung Transformasi Kelembagaan ini. Setelah pada edisi sebelumnya kami mengupas mengenai Transformasi Kelembagaan BPPK dan Corporate University. Sebagai salah satu program Transformasi Kelembagaan di BPPK, STAN menjadi salah satu sorotan utama. Pada edisi ini kami akan mengajak pembaca untuk melihat proses penting yang sedang terjadi dalam tubuh STAN. UU Nomor 12 tahun 2012 yang mengatur tentang pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan diluar Kemenristek Dikti, mengharuskan sekolah kedinasan yang ada di bawah Kementerian lain selain Kemenristek Dikti dan Kementerian Agama mengubah statusnya menjadi Politeknik. Semangat perubahan menjadi pendidikan tinggi dengan status kelembagaan yang sesuai dengan UU yang ada menjadi dasar untuk melakukan transformasi kelembagaan pada tubuh STAN.

Perubahan STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara (PKN) menjadi isu yang cukup kuat berhembus di lingkungan Kemenkeu, terutama di awal tahun 2015 ini. PKN sudah di depan mata. Proses perubahan STAN menjadi PKN, secara umum tidak banyak mengubah proses pendidikan yang telah berjalan selama ini. Secara akademis, PKN akan berada di bawah Kemenristek Dikti, dan secara struktur serta pengelolaan anggaran tetap berada di bawah Kementerian Keuangan. Sehingga program studi yang ada di PKN nantinya tetap disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian Keuangan, dan tetap menyesuaikan dengan sistem akademis yang ada di Kemenristek Dikti. Liputan Utama Majalah Edukasi Keuangan edisi ke-27 ini akan membuka wacana pembaca mengenai PKN "STAN" yang saat ini masih dalam proses pelembagaan.

Pusdiklat Pajak menyambut Kepala Pusdiklat yang baru. Hario Damar. Perjalanan karir Hario Damar cukup panjang. Setelah malang melintang di DJP, kini Pusdiklat Pajak menjadi tantangan baru bagi seorang Hario Damar. Pada rubrik Profil, kami akan mengupas profil Hario Damar sebagai seorang Kepala Pusdiklat Pajak yang baru.

Virus ebola menjadi momok yang mematikan bagi manusia di dunia ini. Virus penyakit seperti apa ebola itu? Apa saja gejala penyakit ebola? Simak informasi dan temukan juga cara pencegahannya pada rubrik Klinik Sehat. Sama seperti edisi-edisi sebelumnya, kami kembali akan menyajikan tulisan khas dari rubrik Mata Air, resensi buku, Lintas Peristiwa, serta Kalender Diklat. Tidak ketinggalan Kang Edu akan menyapa Anda dengan jenaka melalui kartun ala Bimo.

Selamat Membaca.

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5. Artikel dapat dikirimkan ke edukasi@kemenkeu.go.id. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7204131 Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Pengarah

Kapusdiklat PSDM

Kapusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan

Kapusdiklat Bea dan Cukai

Kapusdiklat Pajak

Kapusdiklat KNPK

Kapusdiklat Keuangan Umum

Direktur STAN

Pemimpin Redaksi

M. Sandri Merizanta

Redaktur

Marsedi Situmorang

Tanda Setiya

M. Ridhwan

Ribut Sugiarto

M. Yusuf Arriza

Bambang Kismanto

Bambang Roosdiyanto

Bambang Sancoko

Tuti Hadiyanti

Indrayansyah Nur

Nurhidayati

Agus Suharsono

Sudrajat

Agus Hekso Pramudji

Gathot Subroto

Eduard Tambunan

M. Ichsan

Wawan Ismawandi

Editor

Romy Setiawan

Edy Basuki Rakhmad

Shera Betania

Yohana Tolla

Pilar Wirotama

Layout

Muhammad Fath Kathin

Unggul H. Muhammad

Desain Grafis dan Fotografer

Riko Febrialdo

Victorianus M. I. Bimo Adi

Eros Lassa Mursalin

Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum

Hendra Putra Irawan

PERAN *LEADERSHIP* DALAM TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Akt., QIA., CA., CFA
Wakil Menteri Keuangan RI

23 MARET 2015

Aula Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 23 Maret 2015.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat memberikan ceramah di depan peserta Diklatpim III Kementerian Keuangan. Ceramah bertema peran leadership dalam transformasi kelembagaan ini adalah bagian dari rangkaian pelaksanaan Diklatpim III angkatan 52 dan 53.



Pelantikan Eselon IV di Lingkungan BPPK

Kepala BPPK Sumiyati melantik 28 pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat Badan, Pusdiklat, STAN, maupun Balai Diklat Keuangan pada Rabu, 18 Maret 2015 bertempat di Aula Gedung B Lantai 5, kantor pusat BPPK. Pelantikan ini dalam rangka mengisi jabatan dan mutasi pejabat di lingkungan BPPK. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan KEP-1/PP/UP.11/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Eselon IV di lingkungan BPPK.



Penggunaan Video Conference dalam Diklatpim

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BPPK menggunakan video conference untuk memfasilitasi sesi seminar proposal proyek perubahan peserta Diklatpim III Angkatan 52 pada Jumat, 20 Maret 2015 di kantor pusat BPPK, Jakarta. Pada sesi ini, peserta yang berasal dari luar Jakarta mempresentasikan proposal kepada kepala kantornya (mentor) lewat fasilitas video conference. Peserta kemudian memperoleh masukan langsung dari mentor, dan melakukan diskusi bersama penguji dan coach yang hadir mendampingi peserta.

Penggunaan fasilitas video conference di Diklatpim mulai dilakukan sejak awal tahun 2015. Dengan video conference, penyelenggaraan sesi seminar menjadi lebih efisien, karena penyelenggara tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendatangkan para mentor di lokasi seminar. Mentor cukup dihadirkan secara virtual lewat video conference, namun tetap bisa menyampaikan tanggapan secara interaktif, sehingga mentor tidak perlu meninggalkan pekerjaannya. Di sisi lain, fasilitas ini juga mendukung pencapaian tujuan Diklatpim.

Diklatpim III angkatan 52 diikuti oleh 28 peserta dari beberapa unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Diklat berlangsung hingga bulan Juni dengan metode on and off training, dimana peserta akan menghabiskan sebagian waktu di kelas dan sebagian waktu lagi di kantor masing-masing melakukan proyek perubahan. Di akhir diklat, peserta akan kembali mempresentasikan hasil proyek perubahan mereka yang akan juga difasilitasi dengan video conference.



Sarasehan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kemenkeu

BPPK melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan sarasehan kuasa pengguna anggaran (KPA) bagi pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan pada Selasa, 31 Maret 2015 di Kantor Pusat BPPK. Sarasehan ini bertujuan untuk membekali dan menjadi sarana yang tepat dalam mengatasi problematika dan kendala yang selama ini dialami oleh para KPA.



Serah Terima Jabatan Kapusdiklat Pajak

Serah terima jabatan Kepala Pusdiklat Pajak, antara Imam Arifin, yang kini menjabat sebagai Direktur KITSDA, DJP, dengan Hario Damar, Rabu, 8 April 2015. Bertempat di Minihall BPPK, Jl. Pur-nawarman 99 Kebayoran Baru Jakarta, serah terima juga dihadiri oleh Kepala BPPK, para Kepala Pusdiklat, Direktur STAN, serta para pejabat eselon III di lingkungan BPPK.

Dalam arahnya, Kepala BPPK Sumiyati menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Imam Arifin semasa Ia menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Pajak. Dengan meningkatnya kebutuhan pegawai di lingkungan DJP, kepada Kapusdiklat Pajak yang baru Sumiyati berpesan bahwa tantangan kedepannya bagi Pusdiklat Pajak tidak hanya dari segi kualitas pendidikan yang harus semakin baik, tapi juga dari sisi kuantitas.



foto: Muhammad Fath K.

MENJADI KAWAH CANDRADIMUKA

oleh: Shera Betania

Kuliah adalah impian hampir semua remaja sekolah, namun biaya yang seringkali menjadi kendala. Diantara alternatif melanjutkan sekolah setamat SMA adalah dengan sekolah/kuliah di perguruan tinggi kedinasan (PTK) yaitu perguruan tinggi pemerintah yang dikelola/dimiliki selain oleh Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama. Hampir setiap kementerian memiliki perguruan tinggi kedinasan dengan program pendidikan yang sangat spesifik karena tujuan awal pembentukan PTK adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di kementerian yang bersangkutan dari jalur lulusan SMA. Saat ini hanya sebagian kecil PTK yang masih mengangkat lulusannya menjadi PNS. Ada juga PTK yang khusus hanya mendidik pegawai yang sudah berstatus PNS.

Sejarah telah membuktikan bahwa Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) telah

memberikan sumbangan nyata dalam kerangka pengembangan sumberdaya manusia nasional. Kiprah PTK tersebut terutama dalam menyediakan SDM handal dan professional khususnya untuk memenuhi kebutuhan SDM di masing-masing sektor pembangunan yang dikelola oleh kementerian dan LPNK terkait.

Saat ini PTK secara nasional kurang lebih berjumlah 88 buah. Sebagian besar PTK tersebut menyelenggarakan program pendidikan vokasi dengan jenjang DI sampai DIV dengan calon mahasiswa baik berasal dari PNS atau non PNS. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan kedinasan diamanahkan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi yaitu pendidikan setelah DIV/Sarjana. Ketentuan ini dianggap mempersempit ruang gerak beberapa PTK dalam menyelenggarakan program pendidikannya. Namun peluang untuk

menyelenggarakan pendidikan vokasi masih terbuka dengan terbitnya UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dimana pada pasal 94 disebutkan bahwa pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain akan diatur tersendiri melalui peraturan pemerintah. Untuk itu dari berbagai kajian dan informasi yang diperoleh dari berbagai nara sumber, bahwa penyelenggaraan pendidikan vokasi (DI s/d DIV) di PTK masih dimungkinkan sepanjang hal tersebut diatur dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU 12 tahun 2012. Untuk itulah perlu segera disusun draft peraturan pemerintah yang mengakomodir penyelenggaraan program pendidikan di PTK, sehingga PTK-PTK yang ada masih tetap eksis dalam rangka mencetak SDM professional yang dibutuhkan oleh masing-masing kementerian.

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)



Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) adalah pendidikan tinggi kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang menyelenggarakan pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan (Prodip Keuangan). STAN didirikan dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI No.45 Tahun 1974 juncto Keputusan Presiden RI No.12 Tahun 1967 serta dengan landasan hukum Peraturan Menteri Keuangan RI No.1/PMK/1977 tanggal 18 Februari 1977.

Program studi yang diselenggarakan oleh STAN adalah pendidikan Program Diploma I dan III Keuangan dengan spesialisasi sebagai berikut :

- Prodip I / III Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai
- Prodip I / III Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara
- Prodip I / III Keuangan Spesialisasi Pajak
- Prodip III Keuangan Spesialisasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
- Prodip III Keuangan Spesialisasi Pajak Bumi dan

- Bangunan
- Prodip III Keuangan Spesialisasi Akuntansi
- Sedangkan program studi non-reguler yang diselenggarakan oleh STAN adalah :
- Prodip IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi
- Prodip III Keuangan Spesialisasi Akuntansi dengan Kurikulum Khusus (Ajun Akuntan Khusus)
- Prodip III Keuangan Spesialisasi Pajak dengan Kurikulum Khusus
- Program Pendidikan Pembantu Akuntan (PA)

Untuk Prodip I Keuangan lama pendidikannya 1 tahun (2 semester), bertempat di Kampus STAN Bintaro dan di Balai Diklat Keuangan yang terdapat di 8 daerah, yaitu di Medan, Palembang, Yogyakarta, Malang, Balikpapan, Makassar, Cimahi dan Manado. Untuk Prodip III Keuangan lama pendidikannya 3 tahun (6 semester), bertempat hanya di Kampus STAN Bintaro.

Selama pendidikan, mahasiswa tidak dipungut biaya pendidikan dan tidak diasramakan. Pendidikan STAN memakai sistem ikatan dinas sebagaimana ditegaskan kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.289/KMK.014/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan RI.

Lulusan STAN akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ditempatkan di instansi-instansi dalam lingkungan Kementerian Keuangan RI dan instansi-instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harapan Menteri Keuangan

Pada tanggal 6 Februari 2015 yang lalu, saat melantik pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian

Keuangan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menitip pesan kepada pejabat baru eselon I dan II Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang baru dilantik. Salah satu pesan dialamatkan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Sumiyati. Menkeu berharap tahun ini BPPK mampu menyetarakan status Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan universitas negeri dan swasta lain di tanah air. “Yang saya ingin adalah Kementerian Keuangan itu juga punya satu universitas. Kita harus selesaikan status STAN menjadi universitas tahun ini”, kata Menkeu seperti yang dikutip *cnnindonesia.com* (<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150208152242-78-30465/menteri-keuangan-minta-stan-jadi-universitas-tahun-ini/>). Melalui perubahan status dan perbaikan kualitas, Menkeu berharap STAN bisa menjadi wadah untuk menciptakan sumberdaya manusia unggul di lingkungan Kemenkeu.

“Nanti bisa jadi Kawah Candradimuka,” ujarnya. Kawah Candradimuka adalah kawah yang terdapat di alam kahyangan dunia perwayangan. Di Kawah Candradimuka itulah jabang bayi Tutuka, anak Bima, pernah digembleng oleh Batara Empu Anggajali. Hasilnya, bayi itu tampil sebagai kesatria perkasa yang kemudian lebih dikenal dengan nama Gatotkaca. Kesaktian yang dimiliki Gatotkaca itu berkat gemblengan di Kawah Candradimuka.

Perubahan STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara bukan hanya perubahan nama belaka, melainkan mempunyai tujuan yang jelas. Dengan berubahnya perguruan tinggi yang awalnya akademi atau sekolah tinggi menjadi politeknik berarti secara organisasi dan sistem akademis diakui dan berjalan sesuai dengan kebijakan dalam menciptakan SDM keuangan Negara yang professional.

PENGUATAN KELEMBAGAAN

oleh: Shera Betania



foto: Muhammad Fath K.

PKN sudah tidak asing lagi di telinga warga STAN. Istilah Politeknik Keuangan Negara mulai terdengar sejak pertengahan 2014 yang lalu. Banyak pihak khawatir dengan perubahan yang ada di tubuh STAN, Apakah tetap sebagai sekolah kedinasan? Apakah tetap 'kuliah gratis'?, apakah setelah lulus tetap dapat menjadi CPNS? Pertanyaan yang sebagian besar ditanyakan banyak pihak.

Isu STAN akan diubah menjadi politeknik berhembus saat Menteri Keuangan Chatib Basri memimpin Kementerian Keuangan. Alasan berubah menjadi Politeknik memang mendasar, yaitu peraturan perundang-undangan pendidikan yang baru, UU No.12 tahun 2012, menyatakan bahwa tidak berlakunya sekolah tinggi kedinasan yang berada dibawah naungan kementerian lain (selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama), seperti STAN yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agar status

STAN diakui oleh Kemendikbud, STAN harus mengikuti aturan Kemendikbud (sekarang Kemenristek Dikti) diantaranya merubah status menjadi politeknik. Kemendikbud (sekarang Kemenristek Dikti) tidak mengakui "Sekolah Tinggi" melainkan mengakui "Politeknik". Proses ini semata-mata untuk menyatupadukan pendidikan di Indonesia agar semua instansi pendidikan dibawah naungan Kemendikbud.

Transformasi Kelembagaan makin menguatkan posisi STAN untuk mampu berubah dan maju ke depan, menyesuaikan diri dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta kebutuhan SDM keuangan Negara yang makin berkembang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Tim Transformasi Kelembagaan STAN dibentuk BPPK untuk mempersiapkan STAN menjadi politeknik. Berbagai usaha telah dilakukan, baik ke internal BPPK, Kementerian Keuangan serta terus berkonsultasi dengan pihak-pihak

terkait, seperti Kementerian Ristek dan Dikti, dan Kementerian PAN-RB, dalam mempersiapkan PKN STAN.

Perubahan menjadi politeknik tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat, perlu persiapan secara matang. Salah satu elemen penting dalam membentuk PKN STAN adalah kesiapan SDM nya. Para dosen menjadi bekal utama dalam menjalankan suatu perguruan tinggi. Selama ini mahasiswa STAN dibimbing oleh para widyaiswara yang pada dasarnya memiliki tugas yang sama dengan dosen.

Beberapa Latar belakang perubahan STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN, antara lain:

- Organisasi dan tata kerja STAN tidak sesuai dengan pola standar yang berlaku untuk penyelenggaraan perguruan tinggi
- Berdasarkan UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bentuk perguruan tinggi yang

menyelenggarakan pendidikan vokasi (terapan) adalah politeknik atau akademi.

- Politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan hingga program Magister dan Doktor Terapan, sedangkan Akademik hanya dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi sampai dengan jenjang D-III.
- RPP: Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga hanya berupa vokasi

Makna yang terkandung dalam Politeknik Keuangan Negara STAN adalah secara teknis akademik dibina oleh Kemenristek dan Dikti, dan secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Keuangan. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia, pembinaan akademiknya dilakukan oleh Kemenristek dan Dikti melalui BAN-PT berdasarkan pasal 55 UU Pendidikan Tinggi, sedangkan untuk administrasi, anggaran dan fasilitas fisik, serta pembentukan jenjang karier, dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Tujuan PKN STAN adalah:

1. menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pengelolaan keuangan Negara dalam berbagai jenjang sesuai dengan kebutuhan Kementerian Keuangan
2. mewujudkan kualitas akademik unggul yang menghasilkan lulusan yang memenuhi kriteria yang dituntut oleh institusi pengguna
3. menciptakan karakteristik unik yang menjadikan politeknik dikenal sebagai pemimpin dan rujukan dalam pengembangan system pengelolaan keuangan Negara
4. meraih reputasi unggul dalam penelitian tentang kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan Negara
5. memberikan sumbangan positif dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan Negara.

Saat ini, STAN telah memperoleh

akreditasi B oleh BAN-PT, untuk program studi pada program diploma I berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor 374/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-I/IX/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Diploma I.

Dalam menjalankan fungsinya di bidang pendidikan, PKN STAN harus mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi PKN STAN adalah:

Pendidikan: Penguasaan keahlian di bidang pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah

Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian: Pengayaan keahlian di bidang pengelolaan keuangan Negara untuk mendukung perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan di bidang keuangan Negara

Pengabdian kepada Masyarakat: Pemanfaatan keahlian di bidang pengelolaan keuangan Negara untuk kepentingan masyarakat secara umum dan instansi pemerintah dalam mendukung terselenggaranya system keuangan Negara yang kredibel.

Perubahan politeknik juga memiliki berbagai keuntungan, di antaranya Politeknik bisa menyelenggarakan

pendidikan dari D1 hingga S3. Seiring dengan peraturan dan kebutuhan akan pendidikan yang makin tinggi, PKN 'STAN' menjanjikan pendidikan tinggi yang lebih terarah dan memiliki ketegasan hukum. PKN STAN diharapkan akan menghasilkan SDM keuangan Negara yang berkompeten dan berintegritas bagi Kementerian Keuangan dan instansi (pengguna) lainnya.

VISI PKN STAN : menjadi pusat unggulan bereputasi internasional dalam pengajaran, penelitian, dan inovasi di bidang keuangan Negara.

Beberapa persyaratan telah dipenuhi STAN untuk menjadi politeknik, yaitu:

a. naskah Akademik

Telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Keuangan dengan Dirjen Dikti pada tanggal 10 Agustus 2014

b. Izin Program Studi

Telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang izin penyelenggaraan program studi dalam rangka perubahan bentuk STAN menjadi PKN STAN yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, terdiri dari 10 Program dan Spesialisasi

c. Perjanjian kerjasama antara Kementerian Ristek dan Dikti dengan Kementerian Keuangan

Saat ini, proses pendirian PKN STAN masih terus berlangsung. Pembahasan dan koordinasi antara pihak-pihak terkait masih terus dilakukan. Sesuai dengan rencana, pada tahun 2015-2017 PKN STAN berada pada posisi pembentukan, pengembangan dan berusaha untuk memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Kemenristek dan Dikti.

PEMBENTUKAN PKN, MOMENTUM TK KEMENKEU

oleh: Shera Betania



foto: Eros L. Mursalin

Perubahan STAN menjadi Politeknik mulai jelas di depan mata. Koordinasi antara Kemenkeu, Kemenristek Dikti dan Kemenpan dalam usaha pembentukan Politeknik Keuangan Negara (PKN) terus dilakukan antara pihak-pihak terkait. Momentum Transformasi Kelembagaan Kemenkeu menjadi waktu dan masa yang tepat dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian organisasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Tim Redaksi Majalah Edukasi Keuangan berkesempatan mewawancarai Direktur STAN untuk menggali secara mendalam mengenai proses perubahan PKN ini.

Apa latar belakang dan kapan dimulainya?

Perubahan atau penyesuaian kelembagaan STAN menjadi PKN ini sebenarnya bukan proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Penyesuaian dalam rangka penguatan status dan legalitas STAN sebagai lembaga perguruan tinggi sudah beberapa kali diupayakan, namun belum berhasil. Pada tahun 2014, ketika Menteri Pak Chatib Basri usaha ini dilakukan lagi dan bersamaan dengan adanya program transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan, upaya ini menemukan momentumnya.

Sebagaimana diketahui, sejak terbit UU Pendidikan Nasional tahun 2003 telah

terjadi banyak perubahan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan ini juga menyangkut pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga lain, seperti STAN yang diselenggarakan oleh Kemenkeu ini. Sebenarnya upaya penyesuaian telah ditempuh, namun belum berhasil, terutama karena ada kendala regulasi, sehingga hingga saat ini banyak aspek kelembagaan STAN yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2012 terbit UU nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi yang di pasal 95 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh K/L lain akan diatur dengan PP. Ketentuan ini membuka peluang bagi STAN untuk menempuh lagi upaya penyesuaian

kelembagaan. Sayangnya, PP ini sampai sekarang belum terbit. Namun, setelah berkonsultasi dengan pihak Kemristek & Dikti, Kemenkeu memutuskan untuk melakukan penyesuaian STAN mendahului terbitnya PP. Dalam proses ini, Menkeu sendiri, Pak Chatib Basri, terlibat langsung dalam pembahasan dengan Mendikbud, ketika itu, Pak Muhammad Nuh. Semula ditargetkan tahun 2014 sebelum September 2014 atau tahun akademik baru, sudah tuntas, namun sempat diputuskan untuk ditangguhkan menunggu terbitnya PP. Di awal tahun 2015 bersamaan dengan eksekusi program transformasi kelembagaan diputuskan untuk melanjutkan lagi dan di bulan Maret yang lalu Kemristek-Dikti sudah menerbitkan persetujuan dan rekomendasi perubahan STAN menjadi PKN-STAN.

Kenapa PKN?

Rujukannya seharusnya adalah PP yang diamanatkan Pasal 95 UU 12 tahun 2012, namun PP ini belum ada, hanya saja sebagaimana yang disampaikan oleh Kemenristek Dikti, perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh/ KL lain di luar Kemristek-Dikti hanya boleh menyelenggarakan program pendidikan vokasi, bukan pendidikan akademik. Sesuai dengan UU 12 tahun 2012, untuk program vokasi ini ada Akademi Komunitas untuk yang menyelenggarakan Program Diploma I, Akademi untuk jenjang sampai dengan Program Diploma III, dan Politeknik untuk jenjang sampai dengan S3 terapan. Jadi bentuk tertinggi yang tersedia adalah Politeknik. Karena STAN mempunyai program pendidikan jenjang D-IV dan juga berencana untuk mengembangkan hingga mempunyai program pendidikan S2 dan S3 terapan, maka politeknik adalah bentuk atau wadah yang sesuai. Kemudian karena yang menjadi bidang studi atau bidang keilmuan dan keahlian adalah keuangan negara, maka jadilah Politeknik Keuangan Negara yang disingkat PKN. STAN sendiri, tanpa dipanjangkan, digunakan sebagai nama untuk menunjukkan kesinambungan

PKN sebagai bentuk baru dari STAN.

Bagaimana pendapat Menkeu?

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan saat itu, Pak Chatib Basri, ingin STAN jadi universitas. Demikian juga Menkeu sekarang, Pak Bambang Brojonegoro. Sejauh yang saya tahu menghendaki hal yang sama, atau setidaknya Sekolah Tinggi dan menyelenggarakan juga pendidikan program akademik atau strata. Namun sesuai dengan kebijakan nasional atau regulasi penyelenggaraan pendidikan tinggi, meskipun sekali lagi PPnya belum ada, wadah atau bentuk yang tersedia pada saat ini adalah politeknik, sehingga beliau pada dasarnya dapat menyetujui, dan meminta agar permasalahan kelembagaan STAN dapat secepatnya diselesaikan.

Kalau dari Ristek Dikti?

Kemristek-Dikti menyambut baik dan sangat mendukung perubahan STAN menjadi PKN. Tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya target penyelesaian adalah tahun 2014 yang lalu. Tahun 2014 lalu, semua program studi sudah disetujui dan bulan Maret 2015 yang lalu persetujuan atau rekomendasi perubahan STAN menjadi PKN juga sudah diberikan, untuk selanjutnya diusulkan ke Kemenpan-RB. Sesuai dengan rencana, pada 22 April kemarin pengusulan ke Kemenpan-RB telah disampaikan, bersamaan dengan pengajuan perubahan

Bagaimana posisi PKN STAN dalam Transformasi Kelembagaan Kemenkeu?

PKN STAN ini menemukan momentumnya dengan Transformasi Kelembagaan Kemenkeu. Perubahan STAN menjadi PKN merupakan bagian tak terpisahkan dari Transformasi Kelembagaan, yang di dalamnya termasuk juga BPPK.

Apa saja Program Studi PKN STAN?

Pada tahap awal ini, program studi sama

seperti program studi STAN. Rumahnya PKN, tapi isi program studinya sama, yaitu 10 program studi yang selama ini kita selenggarakan. Di tahun 2014 kita usulkan kembali 10 program studi (untuk PKN STAN) dan disetujui, yaitu tiga D1 (Pajak, Kebendaharaan Negara, dan Kepabeanan dan Cukai), enam D3 (Akuntansi, Pajak, Penilai/PBB, Kebendaharaan Negara, Kepabeanan dan Cukai, dan Manajemen Aset) dan satu D4 (Akuntansi). Jadi masih sama. Hanya satu program studi yang kita ubah, yang dulu namanya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, kita ganti jadi Manajemen Aset. sesuai dengan ketentuan, setiap program studi harus memenuhi persyaratan, misalnya dosen tetap minimal 6. Mengingat persyaratan untuk setiap program studi ini, ke depan mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengurangi jumlah program studi, dan untuk memenuhi kebutuhan keahlian khusus tertentu dapat disiapkan dalam bentuk konsentrasi.

Bagaimana dengan Dosen?

Saat ini, untuk memenuhi syarat PKN STAN, minimum kita harus memiliki 60 dosen tetap karena ada 10 program studi. Untuk ini telah dilakukan rekrutmen di internal BPPK, dan sudah mendapatkan 65 calon yang berasal dari widyaiswara, pegawai, dan pejabat struktural. Setelah ini akan ada rekrutmen lagi, kemungkinan mencakup internal Kemenkeu. Pak Menkeu juga menyarankan peneliti di BKF untuk jadi dosen.

Terkait dosen ini masih disiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak dari alih fungsi ke dosen. Kalau mempertimbangkan kemungkinan ada penurunan jenjang pangkat atau grading, menurut saya yang bagus itu kalau dimulai dari awal, yang sudah memiliki pendidikan minimum S2 atau S3 dan belum menjabat. Karena itu, secara pribadi saya mendorong teman-teman yang sudah S2 atau S3 yang belum menjabat untuk merintis karier melalui jabatan dosen. Saya mengharapkan jabatan dosen di PKN STAN merupakan

bagian dari pola karier di Kementerian Keuangan. Jika dibutuhkan, dosen PKN-STAN tetap dapat diambil untuk penugasan di Kemenkeu.

Adanya kebutuhan dosen ini bagi BPPK dilematis. Sementara masih kekurangan widyaiswara, sebagian beralih menjadi dosen.

Sesuai dengan tugas Tridharma, tidak seperti widyaiswara, dosen tidak hanya mengajar, tetapi juga harus melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tridharma ini yang melaksanakan dosen, bukan sekolahnya (politeknik-red). Ini merupakan perubahan yang besar. Mudah-mudahan teman-teman ini siap, terutama dari widyaiswara. Kita juga menyiapkan pola pengembangan SDM, terutama dosen, mencapai jabatan tertinggi yaitu profesor, sehingga kita usahakan dosen kita bisa mencapai tingkat tertinggi.

Bagaimana dengan kurikulum PKN STAN?

Karena masih (bagian dari) Kemenkeu dan harus memenuhi kebutuhan Kemenkeu, kalau kurikulum kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan Kemenkeu. Pada intinya tidak berubah dari segi kebutuhan Kemenkeu. Hanya mungkin kemasannya harus mengikuti pola Dikti.

Lalu, bagaimana dengan penerimaan mahasiswa?

Prosedur baru seperti apa belum ada, jadi masih menggunakan yang lama. Kalau ingin berubah perlu regulasi baru. Untuk saat ini masih tetap. Karena PKN ini sebetulnya hanya

perubahan dari STAN yang mengemban tugas yang sama, memenuhi SDM Kemenkeu. Kalau mengenai rekrutmen mahasiswa, selama diakitkan dengan rekrutmen pegawai Kemenkeu, maka harus sesuai dengan mekanisme dan kebutuhan Kemenkeu. Karena PKN-STAN ini perguruan tingginya Kemenkeu, kebijakan umum pada dasarnya tetap



ada di Kemenkeu. Kalau dihubungkan dengan rekrutmen pegawai ada beberapa hal yang harus diatur. Kita merekrut tidak hanya untuk hanya sekolah, tetapi sekaligus untuk merekrut pegawai.

Terkait dengan rekrutmen ini memang harus dipertimbangkan kesinambungan suatu program studi. Seharusnya kesinambungan terjaga. Namun, jika dihubungkan dengan rekrutmen pegawai, bisa saja karena tidak ada kebutuhan, program studi tertentu pada suatu waktu tidak perlu menerima mahasiswa. Hal-hal semacam ini perlu diantisipasi dan ada pengaturannya agar tidak mempengaruhi penilaian atas program studi yang bersangkutan.

Jadi pada dasarnya pola rekrutmen masih sama, pendidikan masih dihubungkan

dengan kebutuhan, jumlah dan program studi sesuai dengan kebutuhan. Nanti tetap ada proses untuk menjadi calon pegawainya. Jika harus mengikuti TKD, nanti juga demikian hanya saja nanti TKD bisa dilaksanakan misalnya, bersamaan dengan seleksi mahasiswa (ketika Ujian Saringan Masuk), atau nanti setelah lulus, atau pada saat masih kuliah di semester tertentu.

Selama ini STAN juga memiliki Program Diploma I di BDK (daerah). Apakah PKN STAN ada di BDK juga?

Secara umum ketentuannya tidak memperkenankan kelas jarak jauh. Sehingga kalau begitu kita harus tarik ke sini (Bintaro). Namun ada juga peraturan dari Menristek Dikti tahun 2011, ketentuan mengenai penyelenggaraan



foto: Eros Lassa M.

pendidikan di luar domisili. Nanti kita coba, kalau bisa kita penuh ya tetap di sana (BDK). Jadi ada beberapa BDK yang sekarang ini kita pikirkan bisa memenuhi sebagai kampus yang sesuai dengan kebutuhan Dikti. Mungkin tidak semua BDK, karena memerlukan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas dan sarana prasarana, termasuk pengajar. Namun kalau pengajar bisa dari sini (Bintaro). Dalam waktu awal-awal ini, jika kita belum sanggup memindahkan semua kesini. Karena jumlah (mahasiswa) yang ada cukup besar. Kita usahakan secara maksimal di sini, selebihnya (tetap) di daerah. DJP misalnya menginginkan pendidikan di daerah, karena penempatannya nanti tidak jauh dari daerah-daerah (BDK) tersebut.

Sejauh mana koordinasi dalam

mempersiapkan PKN STAN ini? Dan bagaimana perkembangannya?

BPPK, Setjen (Biro Organta), dan Dikti terus berkoordinasi. Karena PKN STAN masuk dalam agenda Transformasi Kelembagaan Kemenkeu, CTO juga ikut terlibat langsung. Kalau dengan KemenpanRB belum bertemu secara langsung. Pembahasan PKN dengan Kemenpan nanti akan dilakukan dengan pihak Kemristek-Dikti juga. Saya berharap Mei sudah ditetapkan. Setelah ada persetujuan dari Kemenpan, tentunya akan ada PMK tentang organisasi PKN.

Struktur dan jabatan-jabatan di PKN akan berbeda dengan STAN yang ada sekarang. Yang menjabat sebagai pimpinan adalah dosen. Jadi jabatan aslinya dosen (fungsional), tapi diberi

tugas tambahan, misalnya sebagai direktur atau wakil direktur. Direktur di sini bukan jabatan struktural eselon II, hanya saja untuk tugas-tugas tambahan posisi ini akan diberikan kompensasi setara dengan jenjang jabatan tertentu. Yang betul-betul jabatan struktural itu di administrasi.

Harapan Bapak selaku Direktur STAN?

Harapan ini sebetulnya sudah menjadi aksi, yaitu menyesuaikan kelembagaan STAN untuk menjadi sekolah, perguruan tinggi Kemenkeu yang hebat. Saya berharap semua yang di BPPK dan Kemenkeu, tidak terbatas alumni STAN, bersama-sama mengembangkan PKN STAN untuk menjadi perguruan tinggi di bidang keuangan negara yang hebat. Di Kementerian Keuangan, banyak sumberdaya yang luar biasa yang berasal dari hampir semua perguruan tinggi terbaik di Indonesia seperti UI, UGM, Unbraw, ITB, dan lain-lain, dan tentu saja dari luar negeri. Semua bisa berkumpul membangun PKN STAN, perguruan tinggi Kementerian Keuangan, memenuhi kebutuhan dan harapan kemenkeu, menjadi lembaga pendidikan tinggi keuangan negara berkelas global. Kelak, orang2 luar negeri kalau ingin sekolah tentang keuangan negara bisa ke PKN.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa tuntas. Selanjutnya bisa melakukan lagi rekrutmen dosen. Kita perlu bergerak cepat. Apalagi ada rencana tahun 2018 sudah bisa membuka program S2 Terapan. Walaupun utamanya adalah untuk Kemenkeu, PKN STAN nanti memenuhi tidak hanya kebutuhan Kemenkeu tetapi juga instansi lain, termasuk Pemerintah Daerah. Saya optimis, Transformasi Kelembagaan ini adalah momentumnya, dan penguatan kelembagaan STAN menjadi PKN ini akan terwujud.



foto: Muhammad Fath K.

Video Conference Diklatpim

oleh: Wawan Ismawandi

“Selamat pagi Malang, selamat pagi juga untuk Aceh”, suara tersebut terdengar dari salah satu ruangan kelas di BPPK Purnawarman. Pagi itu, panitia sedang mempersiapkan sesi presentasi peserta diklat dengan atasannya. Atasan para peserta diklat tersebut berasal dari berbagai kantor di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan mendengarkan pemaparan proyek perubahan dari para peserta diklatpim III. Namun ada yang lain disini, dimana para atasan dihadirkan langsung dihadapan para peserta bukan secara “fisik”, namun melalui sebuah teknologi tatap muka langsung jarak jauh, atau dikenal dengan *Video Conference*.

Sebenarnya, teknologi tatap muka langsung jarak jauh bukanlah hal yang

baru, teknologi yang memungkinkan dua orang atau lebih dapat bertatap muka pada saat bersamaan walaupun tidak berada pada tempat yang sama. Kita sudah sering mendengar bahkan mungkin pernah menggunakan aplikasi Skype, FaceTime atau aplikasi *video call* lainnya beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, *video call* dimungkinkan bagi dua orang yang tidak hanya saling bisa mendengar suara, namun saling melihat lawan bicaranya. Padaperkembangannya, *video call* yang mempunyai kemampuan untuk melibatkan lebih dari dua orang dan dua tempat berbeda sering disebut dengan *video conference*.

Saat ini, Kementerian Keuangan telah membangun fasilitas *video conference* / *tele presence* yang dapat menjangkau seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Fasilitas tersebut diperuntukkan untuk mengadakan rapat antar pimpinan di Jakarta dan daerah. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), melihat bahwa penggunaan *video conference* (di BPPK, kami biasa menyebutnya dengan Vikon) di Kementerian Keuangan dapat digunakan lebih dari sekedar untuk menggelar rapat pertemuan saja. Sebagai lembaga diklat yang mempunyai unit satker di 13 provinsi, dimana peserta diklat bisa berasal dari seluruh Indonesia, maka vikon ini dapat dijadikan sebagai tools atau alat bantu pada proses pembelajaran.

Tercatat selama tahun 2014, khusus di unit eselon 1 bppk terdapat rapat yang menggunakan fasilitas vikon berkisar antara 1 frekuensi perminggunya. Pemanfaatan fasilitas Vikon ini juga dimudahkan oleh sarana/perangkat yang “ramah pikiran”, alias tidak terlalu membutuhkan effort yang tinggi untuk saling terhubung via *video conference*. Dengan pengalaman penggunaan Vikon yang cukup banyak, BPPK mulai memanfaatkan teknologi ini untuk mendukung proses belajar mengajar. Awalnya, Vikon digunakan untuk sambutan atau ceramah interaktif pada pembukaan diklat yang berada pada lokasi berbeda dengan pejabat yang

memberikan sambutan. Kemudian Vikon juga digunakan untuk memberikan pengarahan program diklat secara terpusat, workshop pengajar, dan proses diklat lainnya.

Adalah Diklat Pimpinan (Diklatpim) Tingkat IV yang sudah memasukkan Vikon sebagai tools utama pada proses mentor peserta dengan atasan langsung peserta. Sesuai dengan peraturan Kepala LAN Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV, dimana terdapat kewajiban para peserta untuk menyusun proyek perubahan yang akan dilakukan di kantornya masing-masing. Proposal proyek perubahan tersebut harus diketahui dan disetujui oleh mentor para peserta yang merupakan atasan langsung dari peserta. BPPK melalui Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Balai Diklat Kepemimpinan Magelang, membuat terobosan baru dengan penggunaan Vikon untuk mempertemukan peserta dengan mentornya. Dibandingkan dengan harus mendatangkan seluruh mentor dari daerahnya masing-masing, penggunaan Vikon dirasa efektif dan pastinya sangat efisien, khususnya dari segi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan. Para mentor secara langsung dapat mendengarkan penjelasan, melihat presentasi, dan berdiskusi langsung dengan peserta, tanpa harus terbang ke Jakarta atau magelang, bahkan ada yang sampai tidak harus keluar dari ruangnya sekalipun. Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Tujuan presentasi dan diskusi terpenuhi, anggaran dapat dihemat, dan waktu tidak terbuang. Sampai dengan bulan April 2015, sebanyak tiga angkatan diklatpim IV dengan peserta tidak kurang dari 80 orang dan tentunya dengan 80 mentor dari puluhan lokasi telah merasakan tatap muka virtual ini.

Tidak berhenti pada diklatpim IV saja, diklatpim III pun mengikuti jejak yang sama. Jika diklatpim IV diikuti oleh para pejabat eselon IV, maka diklatpim III sebagian besar diikuti oleh pejabat eselon

III dimana mentornya adalah para pejabat eselon II. Kesibukan para pejabat eselon II membuat Vikon lagi-lagi menjadi pilihan utama untuk proses diskusi terhadap proposal proyek perubahan yang disusun oleh peserta. Inisiasi BPPK terhadap penggunaan Vikon untuk proses ini pun mendapatkan apresiasi dari para peserta diklatpim dan juga dari para mentornya.

Sebuah teknologi dan model baru dalam proses diklat tentunya membutuhkan proses pembelajaran juga dalam pemanfaatannya. Dalam lima angkatan diklatpim yang sudah menggunakan Vikon ini, masih ada beberapa kendala teknis dan non teknis yang ditemui. Belum standarnya kapasitas jaringan komunikasi di beberapa daerah, masih adanya beberapa teknisi pengguna yang belum secara penuh memahami penggunaan Vikon, dan alat Vikon yang belum standar antar lokasi Vikon, merupakan sedikit kendala yang dapat mengganggu kelancaran Vikon ini. BPPK tentunya akan meningkatkan pelayanan Vikon dengan melakukan koordinasi yang lebih optimal dan berkelanjutan dengan para teknisi pengguna di berbagai unit kerja di lingkungan Kanwil dan Balai Diklat di seluruh Indonesia. Koordinasi dengan Pusintek, Sekretariat Jenderal Kemenkeu sebagai penyedia jaringan Vikon juga terus dilakukan, disamping upaya untuk melakukan standarisasi perangkat Vikon. BPPK sudah mencanangkan untuk menggunakan teknologi ini tidak hanya untuk proses belajar mengajar pada diklatpim saja, namun untuk diklat-diklat lainnya di seluruh Pusdiklat dan Balai Diklat Keuangan.

Seiring waktu, semakin tingginya penggunaan fasilitas *video conference*, khususnya di lingkungan BPPK, semakin tinggi juga kebutuhan akan kualitas yang tinggi. Sehingga sinergi yang optimal dari semua pihak yang terlibat, pengembangan kapasitas penyelenggara untuk memberikan layanan yang terbaik, menjadi target BPPK dalam waktu dekat. Efektif dan efisien....*That's the goal...*

PENGARUSUTAMAAN GENDER: SEBUAH UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN

oleh: Z. Imtihan

Pengertian Gender

Apa yang terbersit dalam benak pembaca ketika mendengar kata gender? Sebagian dari pembaca barangkali akan mengasosiasikan gender dengan jenis kelamin, *sex*, atau hubungan perempuan dan laki-laki. Kenyataan seperti itu bisa dimaklumi sebab awam lebih mengenal jenis kelamin dibanding dengan konsep gender.

Secara sederhana *sex* atau jenis kelamin membedakan perempuan dengan laki-laki atas dasar hal-hal yang bersifat kodrati dan tidak bisa diubah, misalnya saja perempuan secara hormonal dipengaruhi oleh hormon progesteron, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan laki-laki dipengaruhi hormon testosteron, memiliki sperma, dan tentu saja tidak bisa hamil. Gender membedakan perempuan dengan laki-laki melalui konstruksi sosial. Misalnya saja perempuan lebih telaten mengurus anak, lebih pas menangani urusan rumah tangga seperti memasak dan merapikan rumah. Sedangkan laki-laki sering dipandang sebagai pencari nafkah, bekerja di luar rumah dan pengambil keputusan. Gender berkaitan dengan pembagian tanggung jawab, posisi, sifat dan peran perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang dibentuk secara sosial dan dipengaruhi oleh nilai-nilai

atau sistem kepercayaan, keyakinan, budaya atau adat istiadat.

Sesungguhnya 'korban' ketimpangan gender tidak melulu perempuan, karena laki-laki pun mengalami hal yang sama, sebagai contoh laki-laki sering dianggap gagal bila memilih bekerja di rumah sebagai 'bapak rumah tangga' atau lemah bila mengekspresikan emosinya dengan menangis. Tidak dipungkiri, perempuan bagaimanapun juga masih mengalami lebih banyak diskriminasi gender ini.

Kebijakan Pemerintah dalam PUG

Untuk mengurangi masalah ketimpangan gender ini berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan telah menginstruksikan Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Didalam Inpres tersebut disebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program



PEMBANGUNAN INI UNTU



BERIKAN AKSES, PARTISIPASI, KO
UNTUK PEREMPUAN
SECARA ADI



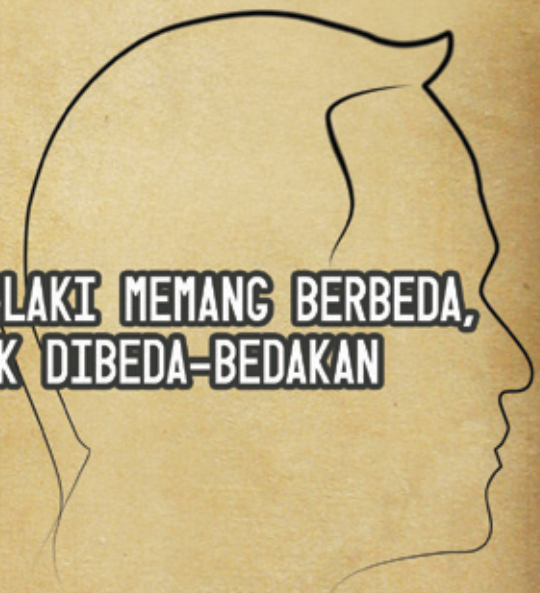
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

pembangunan nasional. Selanjutnya pada tahun 2015 ini telah dicanangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang didalamnya berisi antara lain Pengarusutamaan Kebijakan Pembangunan mencakup:

- (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan;
- (2) pengarusutamaan tata kelola



K SIAPA? OLEH SIAPA?



LAKI MEMANG BERBEDA, K DIBEDA-BEDAKAN

KONTROL DAN MANFAAT PEMBANGUNAN N DAN LAKI-LAKI L & SETARA

Sekretariat:
GEDUNG DJUANDA 1 LANTAI X/4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10170
TELEFON (021) 3852160; FAKSIMILE (021) 3852140; email: pugkemenkeu@gmail.com

- pemerintahan yang baik;
(3) pengarusutamaan gender

Kementerian Keuangan dan Implementasi PUG

Kementerian Keuangan mengambil peran yang strategis dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender ini.

Pada tahun 2012, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Surat Edaran bersama tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan ini, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) terkait Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang harus disusun oleh setiap Kementerian dan Lembaga. Untuk tahun 2015 ini telah diterbitkan PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL.

Di dalam PMK tersebut Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan ARG adalah bahwa pada prinsipnya :

- 1) ARG bukan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
- 2) ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% (laki-laki) - 50% (perempuan) untuk setiap

kegiatan;

- 3) Bukan berarti bahwa alokasi ARG berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan;
- 4) Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
- 5) Tidak semua program/kegiatan/output perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender.

Selain menerbitkan peraturan terkait dengan penganggaran yang responsif gender, Kementerian Keuangan juga memiliki komitmen yang besar terhadap kebijakan PUG ini. Hal ini terbukti dengan telah disediakannya fasilitas maupun ruangan yang responsif gender, misalnya *slope* untuk penyandang *difable*, ruang laktasi dan *daycare room*, ruang terbuka khusus merokok, dan parkir khusus untuk penyandang *difable*. Kementerian Keuangan juga menyelenggarakan Lomba Implementasi Pelaksanaan PUG lingkup Kementerian Keuangan, dalam rangka evaluasi pelaksanaan PUG Kementerian Keuangan. Lomba ini diikuti oleh seluruh unit eselon I dan unit vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan adanya lomba ini diharapkan terhimpun data dan informasi untuk mengetahui perkembangan dan kendala dalam pelaksanaan PUG pada unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan; dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan PUG; dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan PUG di unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan patut berbangga diri dengan telah diraihnya Anugerah Parahita Ekapraya oleh Kementerian Keuangan dari Presiden RI berturut-turut sejak tahun 2009 s.d. tahun 2014 (berturut-turut untuk kategori Pratama, Madya, Utama dan Utama Tingkat Mentor) sebagai bukti komitmen tinggi Kementerian Keuangan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.



“ Fasilitas pada foto terdapat pada salah satu unit diklat BPPK di Jakarta. Pusdiklat ini mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan serta penataran keuangan negara di bidang Perpajakan dan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ketentuan:

1. Tebak Nama Unit Diklat dan Lokasi Unit Diklat dimaksud lalu Tuliskan Jawaban serta Nama Lengkap dan Nama/Alamat Kantor berikut Nomor HP Anda. Kirim ke alamat Redaksi Edukasi Keuangan, melalui email ke ***edukasikeuangan@depkeu.go.id***. Jawaban paling lambat kami terima **31 Mei 2015**
2. Penentuan pemenang dengan cara diundi JIKA yang berhasil menjawab Tepat dan Benar lebih dari satu orang
3. Pengumuman Pemenang akan di umumkan pada Edukasi Keuangan Edisi ke-28 (Bulan Juni 2015)

Selamat kepada:

Sam Wahyudi Junaib

Pengembangan Kepegawaian,
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

Pemenang kuis Majalah
Edukasi Keuangan
edisi 26/2015

Menangkan :

**Powerbank dan
Suvenir Menarik!!**

(Kuis Edukasi Keuangan) tidak berlaku untuk semua Pengurus dan anggota serta keluarga Dewan Redaksi Media Edukasi Keuangan

HARIO DAMAR

TANTANGAN
'NGRUMATI'
MANUSIA

oleh: Pilar Wirotama
foto: Eros L. Mursalin

Hario Damar terpilih menjadi Kepala Pusdiklat Pajak saat target penerimaan pajak tahun 2015 naik 380 triliun dibanding tahun sebelumnya. Sebagai pimpinan unit yang menjadi mitra utama Direktorat Jendral Pajak (DJP) di bidang pengembangan SDM, tanggung jawab untuk membantu DJP mencapai target penerimaan pajak pun ikut bersarang dipundaknya. Dunia kediklatan mungkin dunia yang baru bagi Hario, tapi dunia perpajakan sama sekali bukan hal yang asing bagi pehobi musik ini. Bagaimana profil seorang Hario Damar? Serta apa yang akan dilakukan Hario sebagai Kepala Pusdiklat Pajak baru?

Hario Damar mengawali karir di Kementerian Keuangan sebagai pelaksana di Ditjen Bea dan Cukai selepas lulus dari STAN tahun 1983. Sembari bekerja ia juga melanjutkan sekolah tingkat sarjana di Universitas Krisnadwipayana. Tiga tahun kemudian, dikarenakan kondisi organisasi yang bergejolak kala itu, ia pun dipindahkan ke DJP yang saat itu sedang membutuhkan pegawai. Di sana ia memperoleh kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke *University of New Brunswick*, Kanada, lewat program beasiswa dan berhasil memboyong gelar Master of Business Administration (MBA).

Sepulangnya dari Kanada, ia ditempatkan sebagai Kepala Subbag. Tata Laksana DJP. Waktu itu tantangan yang dihadapinya adalah menyelesaikan Surat Tagihan

Pajak (STP) yang jumlahnya sangat banyak. “STP itu banyak. Semua di-STP padahal belum tentu wajib pajaknya ada. Malah ada kerugian Negara akibat *ngeluarin* STP-nya sendiri” kenang Hario. Akhirnya pada waktu itu ia bersama rekan-rekannya membuat suatu sistem untuk mengelompokan STP tersebut dan memilah mana STP yang tidak efektif setelah berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlah STP pun berkurang signifikan dan sistem menjadi lebih komprehensif.

Di tahun 2001, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang doktoral di Asahi University, Jepang, dengan jurusan Manajemen informasi, khususnya dalam bidang ekonomi studi pembangunan. Tiga tahun kemudian ia kembali ke Indonesia dan dipromosikan menjadi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Kala itu, reformasi perpajakan sedang dimulai, dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana menjadi akar reformasi tersebut. Salah satu hasilnya adalah rekomendasi perubahan paradigma agar DJP tidak hanya mengejar target pajak, tapi juga mengejar tingkat kepatuhan wajib pajak. “Prinsip saya kepatuhan. Kepatuhan yang dikejar maka dapet *pareto*-nya, pasti target *nyampe*,” kenang Hario.

Di perjalanan selanjutnya, ia dipercaya untuk menjadi Kasubdit Investigasi Internal, Kepala Kantor WP Besar/Madya, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi hingga Kepala Kanwil Jakarta Timur.

Di Kanwil Jakarta Timur, kepemimpinan Hario sempat diuji saat dua anak buahnya dijerat kasus tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, nama Hario pun sempat dibawa-bawa oleh anak buahnya yang menjadi tersangka. Namun akhirnya fakta-fakta yang ada mementahkan semua tuduhan yang dialamatkan kepada Hario. “Kita akui oknum masih ada. Tapi pembinaan sudah dilakukan, sehingga mereka sadar bila mereka salah,” tegasnya.

Hario pun bercerita bahwa bawahannya yang lain sempat mengalami *shock* atas peristiwa itu, namun ia berusaha untuk membangkitkan semangat anak buahnya. “Saya jelaskan, ini bukan masalah ini, masalahnya begini, kerja aja seperti biasa,” kenang Hario. “*Lha* saya aja yang dipanggil-panggil sebagai saksi biasa saja. *Ya* itu memang sudah resiko kerja,” kenang hario.

Berkaca dari peristiwa tersebut, berbagai kelemahan alat pengawasan pun ia perbaiki dan kekompakan ditingkatkan. “Hikmah yang kita bisa ambil waktu itu, kita memang harus kerjanya kompak. Harus solid tim itu,” ucap Hario.

‘Ngrumati’ manusia dan Tantangan Pusdiklat Pajak

Jabatan Kepala Pusdiklat Pajak bisa dibilang berbeda dari jabatan-jabatan Hario sewaktu di DJP dulu. Hal ini membawa tantangan baru baginya.

Melayani peserta diklat diibaratkan Hario bagaikan *ngrumati* (bahasa jawa untuk memelihara – *red.*) manusia. “Kerjaan *ngrumati* manusia itu susah *lho*,” ungkapnya. Menurut Hario, satu orang itu memiliki sistemnya sendiri-sendiri. Jika ada sepuluh ribu orang, berarti ada sepuluh ribu sistem yang harus dilayani.

“Ini kan *challenge*-nya beda-beda banget,” ucap Hario. “Kita ngomong gini, orang lain belum tentu sehati. Jangan-jangan disini lagi maki-maki, disana lagi ketawa-ketawa.”

Namun Hario menganggap bahwa jabatan barunya adalah tantangan yang harus diterima. Ia yakin, jika dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Ia akan memperoleh kepuasan tersendiri.

Di benak Hario, ia menginginkan agar seluruh program diklat yang diselenggarakan di Pusdiklatnya dapat berguna dan sesuai dengan kebutuhan



foto: Eros L. Mursalin

pegawai DJP di lapangan untuk membuat kepatuhan wajib pajak meningkat. Hario ingin memaksimalkan peran setiap petugas pajak. Ia mengibaratkan petugas pajak itu sebagai petugas yang tidak kenal waktu yang harus siap kapan pun untuk melayani kepatuhan wajib pajak.

Hario pun memiliki definisi sendiri tentang bagaimana konsep pelayanan oleh petugas pajak. "Pelayanan petugas pajak itu bagaimana mencegah wajib pajak di-enforce," tegasnya. Hario berpendapat bahwa *enforcement* adalah jalan terakhir yang ditempuh jika wajib pajak tidak patuh. Petugas pajak harus memastikan jika pun wajib pajak ada kesalahan dapat segera membetulkan, walaupun ada kesalahan lain tingkatnya masih ringan. "Kita melayani dia jangan sampai dia salah," ujar Hario.

Lebih lanjut, Hario ingin fokus pada peningkatan kualitas pelatihan. Peningkatan kualitas ini menurut hemat

Hario adalah kunci agar Pusdiklat Pajak dapat berkontribusi maksimal pada pencapaian target pajak DJP. "Kalau yang sekarang, beratnya ada di pendidikannya atau *knowledge*-nya. Tapi pelatihannya kurang," ungkap Hario. "Kita harus konsentrasi bagaimana meningkatkan kapasitas dia (peserta diklat-red.) melakukan sesuatu, serta kemampuan analisa dan argumentasinya kita perkuat."

Guna meningkatkan kualitas pelatihan, para peserta diklat perlu lebih banyak diberikan contoh-contoh serta simulasi kasus-kasus perpajakan agar saat mereka menghadapi kasus mereka tahu apa yang harus diperbuat. Menurut Hario, pengetahuan serta aturan yang kuat saja tidak cukup untuk menyelesaikan kasus-kasus di lapangan. "Aturannya kuat, tapi kalau kurang *cases*-nya dia akan bingung," ucapnya. Mengenai bagaimana detail langkah mewujudkannya, itulah yang saat ini Hario bersama para staf

dan Widyaiswara coba rumuskan dan tuangkan dalam Renstra yang mereka susun.

Terkait kemampuan analisa dan argumentasi, Hario berpendapat hal tersebut juga harus menjadi perhatian. "Hasil riset terbaru menemukan, dua kelemahan kita yang mendasar itu analisa dan argumentasi," ungkapnya. Ia membandingkan dengan dua negara tempatnya menimba ilmu dulu, Kanada dan Jepang. Berdasarkan pengalamannya, orang-orang di Kanada dan Jepang secara umum memiliki kemampuan menganalisa dan berargumentasi yang tinggi sehingga banyak inovasi-inovasi bermunculan. Kunci utamanya terletak pada minat membaca yang tinggi. Hario percaya jika bangsa Indonesia dapat meningkatkan minat baca serta dua kemampuan tersebut, maka inovasi-inovasi yang lahir akan lebih banyak, mengingat rumpun dan bahasa kita



foto: Eros L. Mursalin

sangat beragam.

Transformasi BPPK: *Never ending process*

Meskipun terbilang baru di BPPK, Hario mengaku sudah merasakan buah dari reformasi birokrasi BPPK di masa lalu. Buktinya tak lain adalah tingginya semangat pegawai saat menyusun renstra bersamanya. Ia bercerita bahwa malam sebelumnya ia terjaga hingga tengah malam bersama para Widyaiswara dan pegawai untuk menyusun Rencana strategis (Renstra) Pusdiklat Pajak yang baru. “Saya lihat teman-teman (pegawai) dan Widyaiswara, saya kagum. Kemarin sampai jam satu malam,” ceritanya. Hario kagum karena Widyaiswara bersama para pegawai begitu bersemangat untuk

menyusun rencana strategis yang akan menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pelatihan di Pusdiklat yang terletak di Kemanggisan itu.

“Itu hasil *reform*-nya BPPK yang dulu kan. Itu diacungin jempol kalau saya sih, pegawainya punya *spirit*,” tegas Hario.

Di fase perubahan transformasi BPPK yang saat ini berlangsung, Hario berharap seluruh pegawai BPPK diharapkan dapat bersama-sama melakukan, jangan sekedar menulis-nulis konsep tanpa tindakan nyata untuk melakukannya. Menurutnya, transformasi itu seharusnya bergerak terus, *never ending process*. “Ya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan terus supaya jadi bola salju. Pada saat sudah jadi bola salju, nanti sudah jadi

budaya,” ucap Hario.

Khusus di Pusdiklat Pajak, beberapa waktu lalu Hario mengundang rekannya yang bekerja di perusahaan swasta untuk berbagi pengalaman dengan para pegawai. Kegiatan berbagi tersebut menjadi semacam pelatihan kecil bagi para pegawai Pusdiklat Pajak. “Jadi orang yang sudah berpengalaman ini *walk through* bareng sama kita, jadi dalam *walk through* itu kita lakukan *training*,” Hario menjelaskan. Selain itu para pegawai juga diajak untuk melihat penerapan prinsip 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin) di salah satu pabrik perusahaan Jepang di Indonesia. Harapannya prinsip tersebut juga bisa diterapkan sebagai salah satu poin transformasi di Pusdiklat Pajak serta menjadi budaya baru.

Motto hidup Hario

Hario Damar dapat mencapai posisinya saat ini karena selalu berpegang teguh pada motto “*The devils in in the details*.” Ia selalu ingin tahu pekerjaannya sedetail mungkin. “Kita *nggak* perlu harus bisa ngerjain, tapi kita harus tahu,” Hario menjelaskan. Menurutnya, jika kita mengetahui detail pekerjaan kita maka kita bisa melihat arah tujuan pekerjaan itu sehingga kita tidak akan menyimpang. Kita bisa memiliki perspektif yang jelas untuk mencapai hasil akhir dari pekerjaan itu. “Jadi kalau kita *nggak* tahu, *nah* itu mulai nyimpang-nyimpang *tuh*,” ucap Hario.

Di akhir wawancara, saat ditanya tentang bagaimana ia membagi waktu dengan keluarga, ia mengatakan selalu mendapat dukungan dari keluarga. Waktu luang yang ada ia manfaatkan sebaik-baiknya bersama keluarga. Namun, jika waktu luang harus diisi dengan pekerjaan ia pun berprinsip, “Saya sudah punya masyarakat dan digaji oleh rakyat. Apa yang rakyat perlukan ya itu ruang yang harus kita lakukan.”

Serambi Ilmu

APA KABAR, EKSTENSIFIKASI BKC?

PROJECT FINANCE
SKEMA PENDANAAN ALTERNATIF UNTUK
PEMBANGUNAN PROYEK INFRASTRUKTUR

KOREA, SEKARANG DAN DI MASA YANG AKAN DATANG

PENERAPAN ASSESSMENT SALES RATIO DALAM
PENGUJIAN NJOP PBB

IMPOR BERAS, KEBERPIHAKAN KEPADA SIAPA?

OPTIMALISASI JARINGAN DENGAN
VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK

KESADARAN TERHADAP KEAMANAN INFORMASI

PEMAHAMAN SITUASI:
PONDASI PENTING PENGEMBANGAN LOGIC MODEL
PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH

APA KABAR, EKSTENSIFIKASI BKC?

oleh: Surono

Widyaiswara Madya Pusdiklat Bea dan Cukai



Ilustrasi: finansial.bisnis.com

Sejak terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, harapan akan munculnya objek Barang Kena Cukai (BKC) baru mulai diwacanakan. Ketentuan pasal 4 ayat (2) UU Cukai, memberikan suatu peluang untuk melakukan ekstensifikasi terhadap objek BKC. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “penambahan atau pengurangan jenis BKC akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Pasal ini memberikan harapan bagi Pemerintah untuk lebih fleksibel menggunakan instrumen cukai sesuai dengan fungsinya.

Berbagai kajian dan wacana ekstensifikasi BKC mulai bergulir. Wacana ini semakin menguat sejak dilakukannya amandemen UU Cukai berdasarkan Undang Undang Nomor 39 tahun 2007. Tentu saja wacana ekstensifikasi BKC ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, khususnya para *stakeholder* yang akan terkena dampaknya. Dari sekian banyak calon BKC yang diusulkan, berdasarkan pengamatan penulis, wacana ekstensifikasi BKC yang paling menguat adalah usulan “minuman ringan berkarbonasi” sebagai calon BKC baru.

Kini, duapuluh tahun telah berlalu. Harapan tetap menjadi impian. Semangat para penyusun UU Cukai yang berjuang menjadikan cukai sebagai instrumen pajak alternatif yang fleksibel dan dinamis, terhenti dalam ruang fiskal yang dituntut untuk selalu bergerak. Ironis sekali, disaat negara membutuhkan peran pajak yang semakin meningkat, cukai tetap diposisikan sebagai “pajak klasik” yang kurang dilirik perannya. Sepertinya, judul film anak muda pada era tahun 2000-an sangat cocok untuk mengibaratkan kondisi ini, “ada apa dengan cukai?”

Betulkah peran cukai sesempit itu? Tulisan ini dimaksudkan untuk sedikit membuka cakrawala pandang mengenai peran cukai dan wacana ekstensifikasi BKC. Materi utama dalam tulisan ini adalah bahan ajar yang penulis sampaikan kepada mahasiswa Program Diploma III Bea dan Cukai.

Filosofi Cukai

Menurut Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, definisi Cukai dapat ditemukan dalam pasal 1 UU Cukai.

Pasal 1 ad.1. UU Cukai :

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai.

Definisi ini memberikan penekanan bahwa konsep dasar Cukai pada hakekatnya adalah pungutan pajak yang bersifat objektif. Pengertiannya bahwa, sifat pungutan Cukai berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri dari si wajib Cukai (subjeknya). Lebih lanjut dalam pasal 2 UU Cukai ditegaskan batasan karakteristik BKC yang dapat dikenakan sebagai objek pungutan cukai, yaitu: barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- 1) konsumsinya perlu dikendalikan;
- 2) peredarannya perlu diawasi;
- 3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- 4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Bila merujuk kepada fungsi dasar cukai sebagai instrumen perpajakan

di Indonesia, cukai merupakan salah satu **instrumen pajak atas barang** yang memiliki karakteristik berbeda dengan instrumen pajak atas barang lainnya. Perbedaan karakteristik yang paling utama adalah adanya **sifat diskriminatif** atau pemilihan yang selektif terhadap objek yang dikenakan Cukai.

Ditinjau dari fungsinya, secara umum ada dua kontribusi utama pungutan Cukai terhadap pembangunan.

- 1) Cukai sebagai **alat budgetair** pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa cukai, terutama cukai hasil tembakau, adalah salah satu instrumen pajak yang cukup diandalkan untuk mendukung kebutuhan pendanaan dalam APBN. Kontribusi cukai terhadap penerimaan perpajakan nasional selama kurun waktu tahun 2006-2012 mencapai angka rata-rata sekitar 8,47%. Target penerimaan cukai yang dipatok pemerintah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan.

- 2) Cukai sebagai **alat regulierend**

Cukai juga berfungsi sebagai instrumen kontrol pemerintah terhadap pola perilaku konsumsi terhadap BKC. Kebijakan strategis pemerintah terhadap pungutan Cukai tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan penerimaan negara, namun pemerintah juga memperhitungkan tujuan-tujuan lain seperti kesehatan masyarakat, pengendalian dampak sosial, dan sebagainya.

Ekstensifikasi BKC

Pungutan cukai di Indonesia, sesuai dengan amanat pasal 4 ayat (1) UU Cukai, dibatasi secara tegas hanya terhadap tiga jenis BKC, sebagai berikut:

- 1) **Etil Alkohol atau Etanol,**

dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

- 2) **Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)** dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk **konsentrat yang mengandung etil alkohol;**

- 3) **Hasil Tembakau,** yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembaku iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Meskipun ketentuan UU Cukai baru menetapkan obyek BKC yang terbatas pada ketiga jenis barang, namun UU Cukai tetap memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menetapkan obyek Cukai baru. Ketentuan pasal 4 ayat (2) UU Cukai, memberikan suatu peluang untuk melakukan ekstensifikasi terhadap objek BKC. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “penambahan atau pengurangan jenis BKC akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Prinsipnya, penambahan atau pengurangan jenis BKC harus disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR yang membidangi masalah keuangan (komisi XI) untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya apabila disetujui DPR, penambahan atau pengurangan obyek BKC akan dimasukkan dalam Rancangan UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peluang bagi pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi atas jenis BKC tetap terbuka. Sejalan dengan kebutuhan keuangan negara yang semakin meningkat dan juga memperhatikan kecenderungan pola konsumsi masyarakat atas suatu produk tertentu yang tidak terkontrol, dapat saja dilakukan kebijakan ekstensifikasi BKC.

Namun permasalahannya adalah bahwa pemerintah perlu menyusun suatu argumen yang kuat mengenai alasan dasar menetapkan suatu BKC. Agar dapat meyakinkan para wakil rakyat di DPR dan juga masyarakat luas yang nantinya akan terbebani dengan pungutan cukai.

Bila merujuk kepada filosofi dasar pemungutan pajak, Adam Smith (1723-1790) pernah menyampaikan ajaran dasarnya mengenai konsep pemungutan pajak. Dalam bukunya yang sangat terkenal, *The Wealth of Nations*, Adam Smith mengemukakan empat azas pemungutan pajak “The Four Maxims” (Brotodihardjo, 1995) sebagai berikut:

- 1) **Asas pembagian/kepentingan.** Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, dibawah perlindungan pemerintah. Dalam asas “equality” ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak.
- 2) **Asas certainty.** Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
- 3) **Asas convenience of payment.** “Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it.” Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini, menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- 4) **Asas efisiensi.** “Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into the public treasury of the

State.” Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

Pertimbangan mengenai karakteristik BKC seperti apa yang layak untuk dipungut cukai juga termuat di dalam penjelasan pasal 2 UU Cukai, khususnya mengenai penjelasan karakteristik BKC “pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan”. Bahwa pungutan cukai dapat dikenakan terhadap barang yang dikategorikan sebagai **barang mewah dan/atau bernilai tinggi**, namun bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah.

Prinsip Penetapan Objek BKC baru

Menganalogikan dari filosofi dasar pemungutan pajak dan pemenuhan aspek yuridis berdasarkan UU Cukai, menurut hemat penulis ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam penetapan suatu objek barang menjadi calon BKC, sebagai berikut.

Memenuhi karakteristik dasar pungutan cukai

Cukai dipungut hanya terhadap barang tertentu yang memenuhi sifat dan karakteristik sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Cukai.

- 1) konsumsinya perlu dikendalikan;
- 2) peredarannya perlu diawasi;
- 3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- 4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Namun perlu disampaikan bahwa dasar penetapan objek BKC tidak berarti harus memenuhi semua karakteristik yang diisyaratkan dalam pasal 2 UU Cukai

tersebut. Untuk menetapkan suatu objek BKC baru, cukup memenuhi salah satu unsur karakteristik dari keempat karakteristik yang dipersyaratkan tersebut.

Tidak Tumpang Tindih dengan Sistem Pajak Konsumsi Lainnya

Selain pungutan cukai, jenis pajak atas konsumsi barang yang dikenakan di Indonesia adalah Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). PPnBM merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dasar hukum pemberlakuannya satu paket dalam UU Pajak Pertambahan Nilai. Berbeda dengan obyek pungutan cukai, PPnBM dikenakan terhadap obyek berupa:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean, dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
- 2) Impor BKP yang tergolong mewah.

PPnBM dikenakan pada saat penyerahan BKP mewah oleh pabrikan dan pada saat impor BKP mewah. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, **dasar pertimbangan pengenaan PPnBM** adalah :

- 1) perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
- 2) perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah;
- 3) perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;
- 4) perlu untuk mengamankan penerimaan negara;

Pengertian BKP Mewah sebagaimana dimaksud dalam UU PPN dan PPnBM adalah :

- 1) bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- 2) barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- 3) pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- 4) apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

Dari uraian perbandingan antara cukai dan PPnBM ini dapat disimpulkan bahwa beberapa karakteristik cukai dapat beririsan dengan karakteristik pungutan PPnBM. PPnBM dikenakan dengan alasan dasar “perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi”. Alasan ini juga ada pada pungutan cukai, yaitu karakteristik “pembebanan atas dasar keadilan dan keseimbangan”. Selain itu, PPnBM dipungut dengan maksud “pengendalian pola konsumsi”. Alasan ini juga ada pada pungutan cukai, yaitu karakteristik “pengendalian konsumsi”.

Apabila penerapan cukai dan PPnBM dikenakan pada obyek barang yang sama, maka hal ini akan menimbulkan pungutan pajak berganda (*double taxation*). Knechtle (1979) dalam bukunya yang berjudul “*Basic Problems in International Fiscal Law*” mengulas pengertian pajak berganda, sebagai berikut:

- 1) Dalam arti yang luas, pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, yang dapat berganda atau lebih atas suatu fakta fiskal.
- 2) Dalam arti yang sempit, pajak berganda adalah semua kasus pengenaan pajak beberapa kali terhadap suatu subjek dan/atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama, yang mengesampingkan pembebanan

pajak oleh pemerintah daerah.

Dampak langsung yang ditimbulkan dari pungutan pajak berganda akan dirasakan oleh wajib pajak. Beban pajak yang dipikul menjadi semakin berat.

Bukan Merupakan Barang Kebutuhan Pokok

Penjelasan pasal 2 UU Cukai khususnya terhadap karakteristik “pembebanan berdasarkan asas keadilan” sebagaimana telah disampaikan sebelumnya menegaskan batasan pemilihan objek BKC yang harus menghindari objek-objek barang yang sangat dibutuhkan masyarakat luas. Penambahan beban pajak terhadap suatu barang yang bersifat esensial bagi kebutuhan masyarakat berpotensi untuk menyebabkan gangguan terhadap perekonomian masyarakat.

Namun perlu ditegaskan bahwa cukai tidak semata-mata hanya ditujukan terhadap barang yang bersifat esensial bagi masyarakat. Karakteristik cukai dapat juga ditujukan terhadap barang yang memiliki “dampak negatif” sehingga konsumsinya perlu dikendalikan. Sebagai contoh, cukai dapat dikenakan terhadap barang kebutuhan semacam “gula” atau “bahan bakar fosil” sebagaimana *best practice* cukai di berbagai negara.

Memenuhi Asas Efisiensi

Salah satu maxim yang disampaikan oleh Adam Smith dalam azas pemungutan pajak adalah asas “efisiensi”. Sistem pungutan pajak hendaknya mempertimbangkan kelayakan administrasi pemungutan pajaknya. Jangan sampai beban administrasi pemungutan cukai justru lebih membutuhkan biaya yang besar dibanding hasil cukai yang diperoleh. Untuk itu perlu dikaji secara mendalam, potensi penerimaan cukai yang akan diperoleh apabila pemerintah hendak menetapkan calon BKC yang baru.

Fokus utama pada salah satu kepentingan Penerimaan atau Pengaturan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengenaan atas suatu beban pajak akan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Kebijakan penambahan BKC baru, pada akhirnya akan menambah beban pengeluaran terhadap kalangan masyarakat tertentu, termasuk juga beban *cost* bagi produsen yang terkait. Resistensi terhadap usulan penambahan objek BKC baru tentu saja akan bermunculan dari kalangan yang merasa dirugikan.

Yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah adalah menyusun

argumentasi dan alasan yang kuat untuk penetapan suatu objek BKC baru. Untuk menyusun argumentasi yang kuat terhadap usulan BKC baru, maka fokus kepentingan pemungutan cukai perlu ditegaskan. Jika fokus utama kepentingan cukai ditujukan untuk pengaturan, maka argumentasi yang dapat dibangun harus berlandaskan pada data empiris yang benar-benar valid. Perlu penelitian secara mendalam yang melibatkan stakeholder yang berkepentingan dari segala aspek terhadap calon BKC baru. *Benchmarking* terhadap *best practice* pemungutan cukai di negara-negara lain juga perlu dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Semakin masyarakat tahu dengan *best practice* cukai di negara-negara lain, maka diharapkan dukungan terhadap kebijakan penetapan calon BKC baru menjadi semakin meningkat.

Apabila fokus utama kepentingan cukai adalah untuk kepentingan penerimaan, maka tantangan resistensi akan jauh lebih kuat. Argumentasi yang perlu dipersiapkan harus lebih kuat lagi. Langkah yang paling tepat adalah membangun dukungan masyarakat seluas-luasnya. Bahwa kebutuhan APBN pemerintah semakin tinggi, sehingga pemerintah memerlukan sumber-sumber penerimaan alternatif.

Best Practice Pemungutan Cukai

Untuk memperkuat argumentasi pemungutan cukai di Indonesia, hendaknya usulan penambahan BKC baru juga mempertimbangkan *best practice* pemungutan cukai di negara-negara lain. Cukai adalah instrumen pajak atas barang yang dapat memiliki fungsi pengaturan dan sekaligus sebagai instrumen penerimaan negara. Pengalaman negara-negara lain dalam pengelolaan objek BKC akan sangat bagus menjadi rujukan bagi pemerintah Indonesia.

Tabel 1: Excise in Australia

No.	Object of Excise	Type of Object	Rate of Tariff	
			%	Specific
1.	Beer	goods	-	\$3.28-47.09 /ltr
2.	Other excisable beverages not exceeding 10% by volume of alcohol	goods	-	\$79.77 //ltr
3.	Spirits	goods	-	\$74.5-79.77 /ltr
4.	Tobacco, cigars, cigarettes and snuff	goods	-	\$0.47008/ stick
5.	Petroleum products	goods	-	\$0.102-0.389/ ltr

Tabel 2: Excise in Thailand

No.	Object of Excise	Type of Object	Rate of Tariff	
			%	Specific
1.	Petroleum and Petroleum Products al: Gasoline, Kerosene, Diesel, LPG, NGL	goods	0 – 23 %	4-9 bath/ltr
2.	Non Alcoholic Beverages al: Softdrink, Soda water, fruit juices	goods	20 – 25 %	0.377-0.77 baht/ltr
3.	Electrical Appliances al: Air Conditioners & Chandeliers	goods	15%	-
4.	Lead Crystals	goods	15%	-
5.	Vehicle (<i>varians</i>)	goods	3 – 50 %	
6.	Yachts	goods	Exempts	-
7.	Perfumes	goods	15%	-
8.	Wool carpets	goods	20%	-
9.	Motor cycles	goods	3-5 %	-
10.	Batteries	goods	3-5 %	-
11.	Marble	goods	Exempts	-
12.	Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons	goods	30%	-
13.	Entertainment Business, al: Night club and Discotheque, Bath and massage, and others	services	10%	-
14.	Gambling Business, al: horse racing courses, Government lottery, and others	services	10%	-
15.	Business causing envorintmental effect, al: Golf & others	services	10%	-
16.	Concession business, al: Telecommunications & others	services	Exempts	-
17.	Other Service Business	services	Exempts	-
18.	Spirits, al: beer, wine, traditional fermented, distilled spirits	goods	25-60 %	70 – 100 bath/ltr
19.	Tobacco, al: shredded, cigarettes, cigars, chewing tobacco	goods	0.1 – 80%	0.01 – 0.5 baht/gram
20.	Card, al: poker cards and others	goods	-	2 – 30 baht /100cards

Sumber: A Guide to Thai Taxation 2008

PROJECT FINANCE SKEMA PENDANAAN ALTERNATIF UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK INFRASTRUKTUR

oleh: Iqbal Islami
Widyaiswara Madya Pusdiklat KNPK



Ilustrasi: cincinnatiwindowdesign.com

Infrastruktur seperti jalan raya, listrik, pelabuhan, irigasi, dan transportasi massal sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pembangunan proyek infrastruktur tersebut membutuhkan biaya yang besar. Sementara itu, kemampuan pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana publik yang berasal dari anggaran negara sangat terbatas. Bappenas memperkirakan untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJM Nasional tahun 2015 – 2019, dana yang diperlukan mencapai Rp5.452 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah pusat dan daerah hanya mampu untuk menyediakan dana sebesar Rp1.131 triliun. Dengan demikian, ada selisih pendanaan (*financing gap*) sebesar Rp4.321 triliun yang pemenuhannya

dapat dilakukan dengan menggunakan skema pendanaan alternatif dari sektor swasta yang melakukan investasi dengan menggunakan skema *Project Finance*.

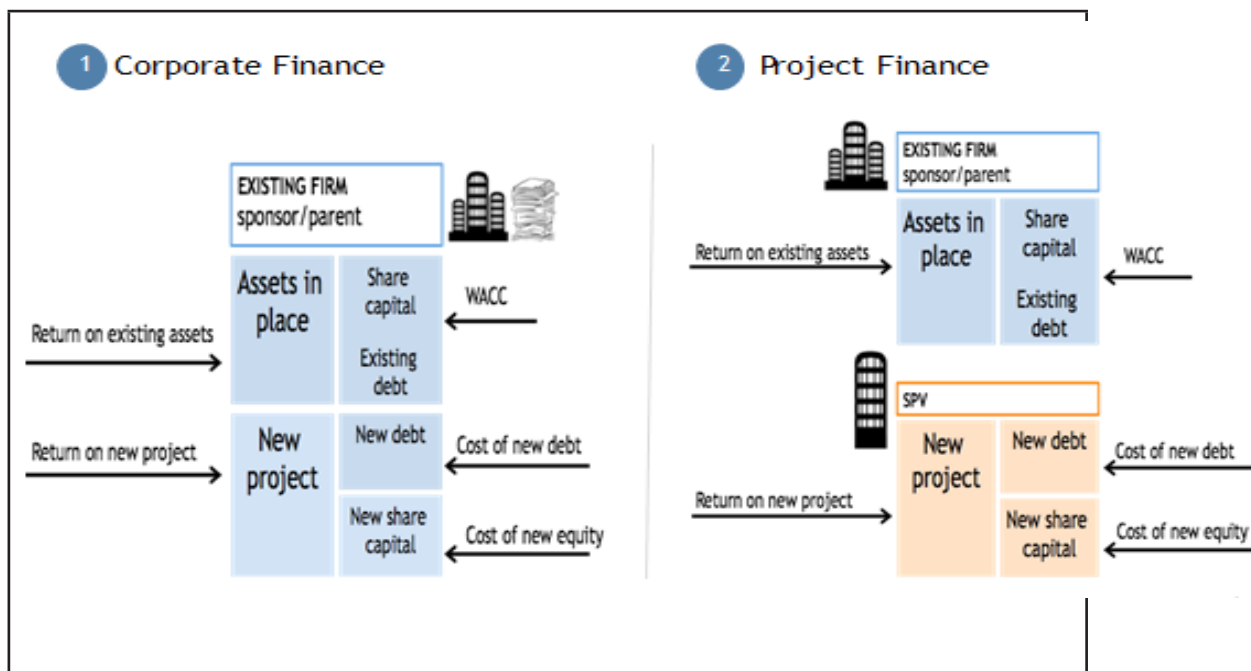
Corporate Finance vs Project Finance

Dari segi sumbernya, pendanaan untuk membiayai suatu proyek investasi seperti proyek infrastruktur dapat berasal dari ekuitas dan utang. Dari segi strukturnya, pendanaan proyek investasi dapat disusun sebagai pembiayaan korporat (*corporate finance*) dan pembiayaan proyek (*project finance*). Pada *corporate finance*, aset dan sumber dana dari proyek yang didanai akan menjadi bagian dari aset dan sumber dana perusahaan pemilik proyek yang dibangun. Sebaliknya, pada *project finance*, perusahaan yang melaksanakan proyek atau yang berperan sebagai

perusahaan sponsor akan membentuk suatu entitas khusus yang akan menjadi kendaraan untuk melaksanakan proyek yang akan dibangun atau disebut juga *Special-Purpose-Vehicle* (SPV).

SPV yang dibentuk khusus untuk melaksanakan suatu proyek dinamakan juga sebagai *project company* yang keberadaannya hanya sepanjang proyeknya masih berjalan. Dengan demikian pada *project finance*, aset dan sumber dana proyek akan dicatat terpisah dari aset dan sumber dana dari perusahaan sponsornya.

Gambaran perbedaan antara *corporate finance* dengan *project finance* dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sumber: Gatti, Stefano, Lecture Material Project Finance Course in Coursera

Sumber dana dari *project finance* berasal dari ekuitas yang disetorkan oleh perusahaan sponsor dan hutang dari para kreditur. Pada *project finance*, pihak yang berhutang atau bertindak sebagai debitur adalah SPV yang secara hukum bersifat independen dari perusahaan sponsornya. Artinya, perusahaan sponsor tidak perlu memberikan jaminan khusus untuk membayar kembali hutang dari SPV (*no recourse*) atau walaupun ada sifatnya hanya terbatas saja (*limited recourse*).

Oleh karena itu, pada *project finance*, para kreditur mempertimbangkan arus kas dari SPV sebagai sumber utama untuk pengembalian pinjaman, sementara asetnya hanya berfungsi sebagai jaminan saja. Oleh sebab itu, risiko yang dihadapi para kreditur dalam *project finance* berbeda dengan risiko pada *corporate finance*.

Pada *corporate finance*, aset-aset lain dan arus kas lain dari perusahaan debitur dapat menjadi jaminan dari hutang yang

diambil. Jadi, jaminannya tidak semata-mata dari arus kas proyek yang akan didanai. Oleh karena itu, risiko yang dihadapi oleh para kreditur dalam *project finance* harus dinilai secara berbeda dari risiko pada *corporate finance*.

Project Finance

Untuk mendapatkan pendanaan dengan struktur *project finance* maka arus kas yang dihasilkan oleh suatu SPV perlu mempunyai tingkat kepastian yang cukup tinggi dan mampu untuk menutup kebutuhan beban operasi dan membayar kembali pokok pinjaman beserta bunganya kepada para kreditur. Dengan demikian, para kreditur akan tertarik untuk ikut mendanai proyek yang akan dibangun dengan memberikan fasilitas kredit kepada SPV.

Tingkat kepastian dari arus kas yang dihasilkan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat permintaan dan kemampuan membayar masyarakat pengguna dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek yang dibangun. Kepastian arus kas akan semakin tinggi

apabila terdapat pembeli (*offtaker*) yang akan membeli seluruh barang atau jasa yang dihasilkan dengan harga yang telah ditentukan. Kepastian arus kas juga akan semakin tinggi apabila masyarakat yang akan menggunakan hasil produksi barang atau jasa mampu untuk membayar harga barang atau jasa yang dihasilkan pada tingkat harga yang dapat memberikan imbal hasil keuangan yang cukup bagi investor.

Prioritas penggunaan arus kas yang dihasilkan oleh SPV adalah untuk membayar beban operasi dan pengembalian pinjaman beserta bunganya. Dengan demikian, hanya arus kas yang tersisa setelah memenuhi dua kewajiban tersebut yang akan dapat dibayarkan kepada perusahaan sponsor sebagai dividen.

Suatu proyek yang pada struktur berperan sebagai suatu *project finance*, selain SPV, juga akan melibatkan banyak pihak mulai dari perusahaan sponsor, kreditur, kontraktor *engineering, procurement, and construction* (EPC), kontraktor

operation and maintenance (O&M), supplier bahan baku, dan pembeli hasil produksi. Karena melibatkan berbagai pihak tersebut, maka dari segi hukum suatu *project finance* sebenarnya merupakan kumpulan dari kontrak-kontrak antara SPV dengan para pihak yang berperan serta dalam suatu *project finance*. Kontrak-kontrak tersebut akan berisi tentang hak dan kewajibannya masing-masing pihak termasuk juga bagaimana arus kas akan dibagi diantara para pihak tersebut.

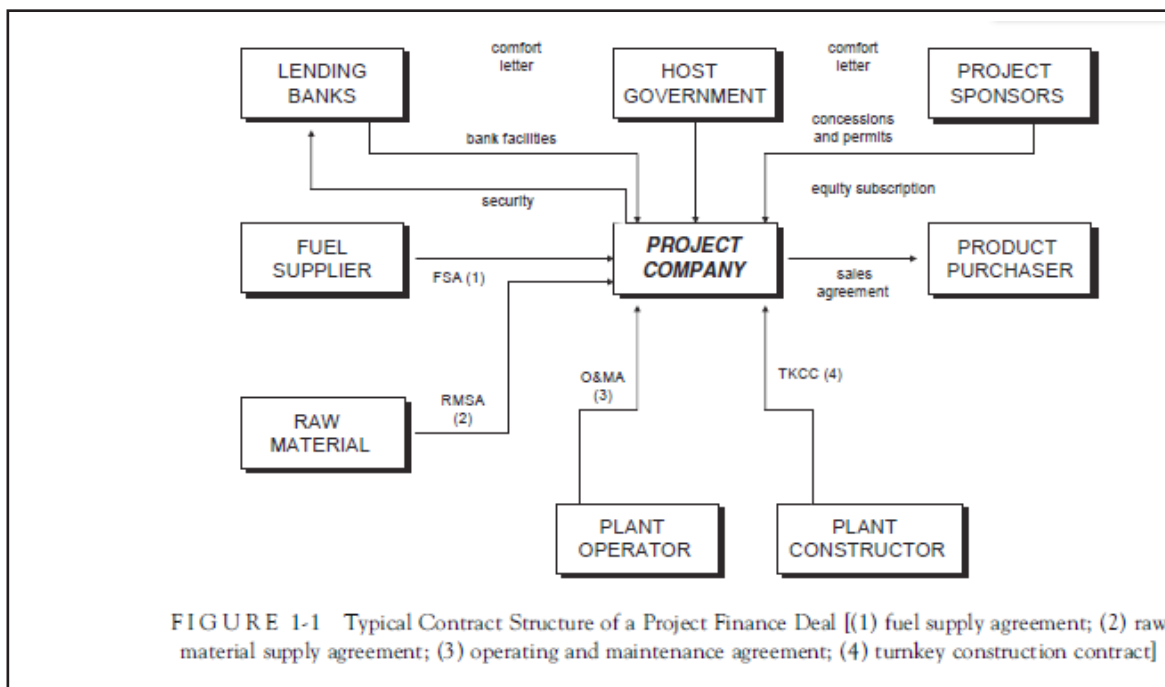
Secara ringkas struktur kontrak-kontrak antara SPV dengan pihak-pihak yang terkait pada suatu proyek, misalnya proyek pembangkitan listrik, yang menggunakan skema pendanaan *project finance* dapat digambarkan seperti gambar berikut ini.

Dari struktur pada Gambar 2, dapat kita lihat siapa saja yang terlibat dalam suatu *project finance* dan kontrak apa saja yang diperlukan. Secara ringkas peran dari setiap pihak dan kontrak yang dibuat

untuk masing-masing pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Host Government* atau pemerintah dimana proyek berada. Yang dimaksud dengan pemerintah disini adalah pemerintah dalam arti luas, yaitu dapat saja pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Peran pemerintah pada suatu proyek infrastruktur cukup beragam mulai dari sebagai regulator, pemberi konsesi dan ijin-ijin, dan dapat juga berperan sebagai penjamin. Pada skema KPS, pemerintah akan berperan juga sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atau *Contracting Agency* (CA). PJPK akan berfungsi sebagai penanggungjawab proyek mulai dari tahap persiapan, pembangunan, pengoperasian, sampai dengan pengakhiran proyek. Pada tahap persiapan, PJPK bertugas untuk mempersiapkan suatu proyek agar siap dilelang untuk mendapatkan investor yang terbaik.
2. *Project Sponsor* adalah perusahaan

yang menjadi sponsor atau pemegang saham dari suatu *project company* atau SPV. Perusahaan sponsor akan menyediakan dana berupa modal sendiri (ekuitas) untuk suatu *project company*. Perusahaan sponsor dapat saja merupakan perusahaan yang bisnis intinya sama atau ada kaitannya dengan proyek yang akan disponsori (*strategic investor* atau *industrial sponsor*) dan/atau bisa juga murni merupakan perusahaan investasi (*financial investor*). Besaran ekuitas yang harus disediakan oleh para sponsor akan tergantung dari nilai proyek yang akan dibangun dan struktur modal yang dipilih. Sebagai contoh, apabila nilai suatu proyek misalnya Rp10 triliun dan rasio hutang terhadap ekuitas ditentukan sebesar 3 kali maka besaran ekuitas yang harus disediakan sponsor adalah Rp2,5 triliun. Sisa dana yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp7,5 triliun akan diperoleh dari kreditur yang bersedia memberikan fasilitas kredit misalnya dari bank atau



Gambar 2. Sumber: Gatti, Stefano, *Project Finance in Theory and Practice*, hal. 8

lembaga keuangan lainnya.

3. *Project Company* adalah perusahaan yang khusus didirikan (SPV) oleh perusahaan sponsor untuk melaksanakan suatu proyek mulai dari tahap pembangunan dan pengoperasian sampai dengan konsesinya habis. SPV inilah yang akan mengikat kontrak dengan pihak-pihak lain sesuai dengan perannya masing-masing.
4. *Lending Bank* adalah bank atau lembaga keuangan lain yang akan menjadi pemberi fasilitas pinjaman kepada SPV untuk mendanai pembangunan proyek. Yang menjadi jaminan dari pinjaman tersebut adalah proyek itu sendiri. Dalam *project finance* biasanya perusahaan sponsor tidak memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atas pinjaman yang diambil oleh SPV. Mengingat besarnya dana yang dibutuhkan, maka pemberi pinjaman biasanya merupakan suatu sindikasi yang terdiri dari beberapa kreditur. Dalam pembentukan sindikasi, pertama-tama SPV akan menunjuk suatu bank menjadi pimpinan pengatur pinjaman (*mandated lead arranger*-MLA). MLA kemudian akan membentuk sindikasi dengan mengajak bank-bank lain untuk menjadi *co-arranger*, *manager*, ataupun hanya sebagai *agent bank* saja dalam sindikasi kreditur yang akan memberikan pinjaman kepada SPV.
5. *Product Purchaser*. Pembeli produk adalah pihak yang akan bertindak sebagai pembeli (*offtaker*) produk yang dihasilkan oleh SPV. Untuk proyek pembangkit listrik, di Indonesia, pihak yang akan bertindak sebagai pembeli dari listrik yang dihasilkan oleh SPV adalah PLN. Perjanjian antara PLN dengan SPV dituangkan dalam bentuk *Purchasing Power Agreement* (PPA) yang sifatnya jangka panjang

misalnya sepanjang masa konsesi dari proyek pembangkit listrik tersebut.

6. *Plant Constructor*. Pembangunan fisik misalnya pembangkit listrik pada proyek listrik adalah kontraktor EPC yang memenangkan tender pembangunan pembangkit listrik yang diadakan oleh SPV. Kontraktor EPC ini biasanya terdiri dari konsorsium kontraktor yang terdiri dari kontraktor utama dan sejumlah sub kontraktor. Skema kontrak EPC antara kontraktor utama dengan SPV biasanya adalah berupa kontrak *fixed-price turnkey*. Selanjutnya kontraktor utama akan membagi-bagi kontrak yang diperoleh tersebut kepada para anggota konsorsium kontraktornya. Kontraktor utama bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pembangunan proyek sampai dengan selesai dan siap beroperasi. Kontraktor utama bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan proyek atau apabila kinerja pembangkit listrik yang dibangun tidak mencapai standar kinerja teknis yang ditentukan. Dalam kontrak *turnkey*, kontraktor utama bertanggungjawab untuk menyerahkan pembangkit listrik yang dibangun dalam kondisi sudah dapat beroperasi dengan baik sesuai standar teknis yang telah ditentukan. Kontraktor utama yang ditunjuk dapat saja mempunyai hubungan kepemilikan dengan perusahaan sponsor. Salah satu dari anggota kontraktor EPC ini seringkali akan ditunjuk sebagai *plant operator*.
7. *Plant Operator*. Operator pabrik adalah kontraktor yang ditunjuk oleh SPV untuk mengoperasikan dan merawat pabrik setelah pabrik selesai dibangun dan mulai memasuki tahap operasi. Pada proyek pembangkit listrik, operator yang ditunjuk akan ditugaskan untuk mengoperasikan dan merawat pembangkit listrik agar dapat beroperasi dengan baik

sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan. Perusahaan yang ditunjuk menjadi operator dapat saja merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan perusahaan sponsor.

8. *Fuel dan Raw Material Supplier*. Untuk menjamin ketersediaan bahan baku, maka akan diadakan kontrak jangka panjang pembelian bahan baku antara SPV dengan pemasoknya. Pada proyek pembangkit listrik, salah satu bahan baku yang sangat penting adalah bahan bakar pembangkit listrik seperti gas atau batubara. Pemasok bahan bakar ini dapat saja mempunyai hubungan kepemilikan dengan perusahaan sponsor.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan suatu keniscayaan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar kegiatan dunia usaha serta masyarakat pada umumnya. Namun demikian, kemampuan pemerintah untuk mendanai kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut terbatas. Selisih pendanaan (*financing gap*) yang ada diharapkan dapat diperoleh dari skema pendanaan alternatif seperti sektor swasta.

Untuk menarik minat para investor, maka proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada pihak swasta adalah proyek-proyek yang mempunyai nilai kelayakan keuangan yang tinggi. Untuk proyek-proyek semacam ini maka skema pendanaan *project financing* sangat memungkinkan, karena tingkat kepastian dan jumlah arus kas yang dihasilkan cukup tinggi sehingga dapat menghasilkan tingkat imbal hasil yang cukup kepada investor dan kreditor.

KOREA, SEKARANG DAN DI MASA YANG AKAN DATANG

oleh: Oktavia Ester Pangaribuan
Widyaiswara Pusdiklat KNPk



Ilustrasi: ctee.org

Pada tahun 2014, Penulis mengikuti GDLN Blended Learning Program yang bertemakan Korea Development yang dimulai sejak tanggal 18 April. Program ini terdiri dari 9 sesi Video Conference yang dilaksanakan di BPPK dan ditutup dengan Presentasi dari setiap *learning center*. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh sesi Video Conference, dan apabila berhalangan hadir dapat menggantinya dengan membuat Reaction Paper 1 halaman mengenai topik pada VC tersebut. Pada akhir program ini akan dipilih peserta perwakilan dari setiap *learning center* untuk mengikuti sesi tatap muka selama seminggu di Seoul, Korea Selatan. Penulis beruntung memperoleh kesempatan menjadi wakil dari Kementerian Keuangan untuk mengikuti sesi tatap muka di Seoul. Dari Kementerian Keuangan terpilih 7 peserta yang berasal dari DJKN (1 peserta), DJBC (2 peserta), DJA (1 peserta) dan BPPK (3 peserta).

Sesi tatap muka di Seoul berlangsung selama 7 hari, dan dimuka dengan topik

Korea Today and Its Future Direction yang disampaikan oleh Prof. Seung-Joo Lee (KDI School), Associate Dean pada Capacity Building Center KDI School. Sesi ini merupakan resume dari 9 sesi VC yang telah dilaksanakan sebelumnya secara Blended Learning.

Apa yang ada di benak Anda saat mendengar Korea Selatan? Sebagian akan mengingat telepon genggam Samsung, kosmetik Korea, KPop dan mungkin ada yang menyebutkan soal Korea Drama. Kesemua ini turut memberikan andil kemajuan ekonomi Korea Selatan.

Korea Selatan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, sama dengan Indonesia. Akan tetapi kemajuan ekonomi Korea jauh melebihi Indonesia. Kemajuan ekonomi Korea tidak terlepas dari sisi geografis Korea yang terletak antara Jepang dan China, 2 negara yang memiliki GDP tinggi (Jepang adalah peringkat ke-3 sedangkan Cina adalah peringkat ke-2). Tidak

seperti Indonesia dan Vietnam, Korea tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi Korea berhasil berubah dari salah satu negara agraria termiskin menjadi negara yang berbasis industri, dan hal ini dicapai melalui *export-led industrialization*. Tingginya GDP Korea saat ini tidak lepas dari tingginya ekspor Korea (pada tahun 2013 54% dari GDP bersumber dari ekspor). 8 produk ekspor terbesar Korea adalah semi konduktor, produk minyak (Korea tidak memiliki minyak yang berlimpah, sehingga mereka import minyak mentah dari timur tengah, mengolahnya dan kemudian mengekspor kembali), mobil, kapal, suku cadang mobil, LCD, telepon genggam dan barang elektronik. Melihat populernya Samsung, tentu akan banyak yang bertanya dalam hati, mengapa telepon genggam tidak menduduki peringkat pertama. Hal ini disebabkan telepon genggam tidak diproduksi di Korea (pabriknya berada di Vietnam, Indonesia dll).

Faktor yang mempengaruhi Perkembangan Ekonomi Korea adalah :



Sebetulnya apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan ekspor Korea ?

1. Kebijakan pemerintah dan juga komitmen yang kuat dari pimpinan. Meskipun terjadi pergantian pimpinan, tapi mereka memiliki kesamaan pandangan untuk mengembangkan strategi perekonomian yang didasarkan pada ekspor
2. Sektor industri yang berorientasi pada ekspor. Hal ini didukung dengan penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan bagi kegiatan ekspor (seperti pelabuhan, *information technology* dll). Selain itu Korea juga mengembangkan suatu sistem untuk menentukan target ekspor dan melaksanakan pertemuan bulanan untuk promosi perdagangan. Pemerintah juga memiliki kebijakan pemberian insentif pajak serta insentif lain untuk mendukung ekspor serta kebijakan untuk mengurangi/ menghilangkan biaya-biaya terkait

ekspor. Selain itu birokrasi yang efisien untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan ekspor serta mempertahankan stabilitas nilai tukar won.

3. Tenaga kerja yang terdidik dan terbiasa bekerja keras. Untuk aparatur sipil sudah diterapkan seleksi masuk nasional untuk menjamin kualitas aparatur sipil. Tenaga kerja adalah investasi yang mahal. Seoul Robotics High School adalah sejenis sekolah kejuruan yang berfokus pada bidang robot. Sekolah ini bukan merupakan sekolah kejuruan biasa yang hanya melahirkan tenaga terlatih, melainkan sekolah kejuruan khusus (*meister*) yang menghasilkan tenaga ahli di bidang robot. Sekolah ini dikategorikan sebagai *public school* di mana biaya sekolah di tanggung sepenuhnya oleh Pemerintah. Oleh karena itu, sekolah ini memiliki seleksi yang sangat ketat dengan skala nasional sehingga hanya murid-murid terbaik dari

seluruh Korea Selatan yang dapat mendaftar ke sekolah ini. Tujuan dari terbentuknya sekolah ini adalah untuk membentuk tenaga ahli yang siap kerja di mana alumni sekolah ini tidak boleh langsung melanjutkan ke perguruan tinggi melainkan harus bekerja dahulu minimal 3 tahun untuk dapat lanjut ke perguruan tinggi. Alumni sekolah ini biasanya langsung bekerja pada perusahaan-perusahaan besar di Korea seperti Samsung, LG, dan lain-lain, bahkan tidak jarang perusahaan-perusahaan tersebut mengambil para alumni tersebut semenjak mereka masih di tingkat II (kelas 11).

4. Teknologi

Korea sangat mengedepankan teknologi. Korea tidak sekedar 'belajar' dari Jepang tetapi tidak ragu untuk menanamkan modal di sektor tertentu untuk memperoleh ilmunya. Untuk memperoleh teknologinya, Korea tidak belajar

	Pesimis	Diharapkan	Optimis
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan GDP 0 – 1%	Pertumbuhan GDP 2 – 3%	Pertumbuhan GDP 4 – 5%
<i>Social Cohesion</i>	Ketimpangan pendapatan yang meningkat dan konflik sosial yang tinggi	Adanya ketimpangan pendapatan dan konflik sosial	Pemerataan pendapatan dan tidak ada konflik sosial
North Korea	Konflik militer dan dorongan reunifikasi	Korea kembali bersatu (ada pihak yang kalah dan meminta Korea kembali bersatu)	Korea kembali bersatu dengan adanya proses adaptasi serta perjanjian damai

dari komponen yang besar, tetapi justru komponen kecil yang sangat dibutuhkan di otomotif maupun peralatan elektronik. Misalnya, untuk belajar dari sektor otomotif Jepang, Korea menggandeng *supplier* suku cadang Mitsubishi dan menanamkan modal di situ. Untuk belajar peralatan elektronik, mereka menimba ilmu dari perusahaan isolator. Tentunya sebagai pemilik, ilmu yang diperoleh akan lebih banyak dibandingkan hanya sekedar studi banding.

5. Partisipasi sektor swasta

Small-Medium Enterprise (SME) memainkan peran penting, karena selama 10 tahun terakhir SME telah menyediakan 4,3 juta lapangan pekerjaan pada saat perusahaan besar justru memiliki kebijakan untuk mengurangi jumlah pegawai. Hal ini menghindarkan Korea dari tingkat pengangguran yang tinggi. Ekosistem dari SME sendiri sangat dinamis. Setiap tahun ada 1 juta perusahaan baru yang didirikan dan 800.000 perusahaan yang ditutup. Kebijakan SME dimulai pada tahun 1961, saat pemerintah mendirikan Industrial Bank of Korea. Setelah itu pada tahun 1965,

Korea menetapkan rasio minimum dari pinjaman SME dan mendirikan *Korea Credit Guarantee Fund* (1976), *SME Promotion Act* dan *SME Promotion Fund* (1978), *SME Product Procurement Promotion Act* (1981), *Korea Technology Credit Guarantee Fund* (1989), membentuk Small and Medium Business Administration (SMBA) dan KOSDAQ, *SME Technology Innovation Promotion Act* (2001) serta mendorong kerjasama antara SME dan perusahaan besar (2006).

6. Tingkat investasi dan simpanan yang tinggi

Terkait inovasi di bidang teknologi dan ICT, Korea Selatan tidak sekedar 'belajar dari Jepang', tetapi mereka berani menginvestasikan dana untuk belajar ke Jepang maupun *leader* di sektor industri lain.

Perkembangan ekonomi di Korea Selatan tidak dapat dilepaskan dari munculnya Chaebol, yaitu perusahaan raksasa (seperti Samsung, Hyundai Motor, SK, LG, Lotte, POSCO dll) yang memiliki cabang banyak seperti gurita serta memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah. Chaebol ini biasanya awalnya adalah perusahaan keluarga. Saat ini Samsung merupakan

Chaebol terbesar di Korea Selatan, sehingga sering kali dalam melakukan analisa atas pertumbuhan ekonomi sering dibedakan menjadi analisa dengan memasukkan Samsung, dan analisa tanpa memasukkan Samsung.

Pada tahun 1973-1981 dikembangkan *Heavy Chemical Industry (HCI) Investment Plan* yang difokuskan pada sektor baja, logam non besi, mesin, kapal, elektronik, petrokimia. Awalnya strategi ini bukan dikembangkan untuk alasan ekonomi, akan tetapi untuk menghadapi Korea Utara karena saat itu Korea Utara mengembangkan militernya. Kesuksesan Korea sekarang tentunya tidak terlepas dari strategi pemilihan industri yang tepat dan mereka fokus pada HCI.

Presiden Park yang mencetuskan menetapkan HCI Plan memiliki visi dan kebijakan ekonomi kreatif, yaitu :

1. Menciptakan lapangan pekerjaan baru dan juga kesempatan berusaha melalui kewirausahaan dan kreatifitas
2. Menciptakan ekosistem yang memberikan penghargaan pada kreatifitas dan mempermudah pendirian perusahaan baru
3. Mendorong pertumbuhan SME dan juga bisnis ventura
4. Memperluas inovasi dibidang teknologi dan ICT
5. Mengembangkan teknik/alat

baru untuk pelopor di sektor industri dan pasar

6. Membina *creative human capital* dan mendorong kreatifitas di masyarakat

Visi dan kebijakan ekonomi kreatif ini dilaksanakan secara berkesinambungan meskipun Presiden Park sudah tidak lagi menjadi Presiden di Korea Selatan. Hal ini sesuatu yang luar biasa mengingat masa jabatan Presiden di Korea Selatan hanya boleh 1 periode saja.

Satu hal yang Penulis lihat di Korea adalah kecintaan mereka pada teknologi dan betapa mereka sangat mencintai inovasi. Penulis sempat melihat barisan mobil bekas di Incheon Port yang akan diekspor ke negara lain. Mobil bekas Korea ini laku dijual ke negara lain (seperti Philipina) karena usia kendaraan yang relatif muda (maksimal 5 tahun) serta kondisi yang relatif baik akan tetapi tidak lagi dipakai di Korea karena warga Korea memilih produk baru yang menawarkan teknologi yang lebih mutakhir. Selain itu kalau kita perhatikan Samsung juga sering mengeluarkan produk baru dengan inovasi yang baru. Inilah bukti kecintaan masyarakat Korea Selatan dengan inovasi. Hal ini ternyata juga terlihat di sisi produk kecantikan (kosmetika). Tahun lalu produk yang terkenal di Korea adalah BB cream, masker muka dengan bahan dasar *caviar*, sehingga hampir semua produsen (Missha, Etude, Face Shop, Innisfree, Tony Moly dll) mengeluarkan produk ini. Tapi tahun ini trend ini bergeser menjadi CC cream dan masker muka berbahan dasar *snail*.

Kemajuan ekonomi Korea saat ini melahirkan tantangan di masa depan, seperti :

1. Populasi penduduk yang didominasi kaum lanjut usia, karena tingkat kelahiran yang rendah.
2. Pertumbuhan ekonomi yang lambat dan adanya tingkat pengangguran usia produktif yang tinggi
3. Kompetisi dengan Cina
4. Produktivitas yang rendah di sektor

jasa dan SME

5. Ketergantungan pada impor atas *high energy*
6. Korea Utara. Korea Utara dan Korea Selatan terlihat hidup berdampingan dengan damai, tetapi mereka sebetulnya menyadari potensi pecahnya konflik dengan Korea Utara.

Prof. Seung-Joo memprediksi ekonomi Korea Selatan pada tahun 2030 menjadi 3 skenario, yaitu pesimis, diharapkan dan optimis.

Bagaimana pengaruh bersatunya kembali Korea Utara dan Korea Selatan ? Prof. Seung-Joo dengan didasarkan pada Goldman Sachs riset pada Hyundai Economic Research memperkirakan kondisi Unified Korea pada tahun 2050 :

Unified Korea (2050) tersebut:

- Diprediksi akan meningkatkan GDP menjadi ₩ 5,663 – 7,358 juta, GDP/capita : \$70,484 – 91,588. Dengan GDP sebesar ini Korea akan menduduki peringkat ke-7 meskipun biaya harus dikeluarkan untuk reunifikasi diperkirakan sebesar 7% GDP
- Keuntungan:
 - ▶ Mengurangi anggaran pertahanan
 - ▶ Tenaga kerja yang murah
 - ▶ Pasar domestik semakin luas
 - ▶ Pertambangan dan infrastruktur semakin kuat
 - ▶ Tingkat pemberian kredit semakin baik
 - ▶ Biaya energi yang lebih kecil

Apakah yang akan terjadi dengan Korea Selatan selanjutnya ? Skenario apa yang akan terjadi di Korea Selatan pada 5 tahun ke depan ? Penulis tidak sabar untuk melihat apakah scenario optimis yang akan terjadi. Kalau ini yang terjadi, maka Indonesia harus berlari lebih kencang untuk dapat mengejar ketinggalannya dari Korea Selatan.

PENERAPAN ASSESSMENT SALES RATIO DALAM PENGUJIAN NJOP PBB

oleh: Darwin
Widyaiswara Pusdiklat Pajak



Ilustrasi: summareconserpong.com

Dalam tulisan terdahulu penulis telah memaparkan secara teoritis mengenai Assessment Ratio, tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam rangka menguji keakurasian NJOP PBB. Dalam tulisan kali ini penulis mencoba menggunakan *Assessment Ratio* tersebut untuk mengukur keakurasian NJOP PBB dengan menggunakan angka-angka. Angka-angka tersebut merupakan rekayasa penulis dan bukan merupakan data hasil penelitian. Untuk pengembangan lebih lanjut perlu dilakukan penelitian sehingga data yang digunakan benar-benar data riil dari objek yang diteliti.

OBJEK PENGUKURAN

Berikut merupakan objek pengukuran yang penulis coba tampilkan dengan menggunakan imajinasi dan rekayasa penulis dengan asumsi objek-objek tersebut tersebar di dalam satu kelurahan (Tabel 1).

No.	Nama Pemilik Properti	Harga Jual (S)	NJOP (A)
1.	Amiruddin	2.400.000.000,-	2.100.000.000,-
2.	Budi Suhardiman	375.000.000,-	237.675.000,-
3.	Canty Dewi	1.075.000.000,-	1.245.000.000,-
4.	Dewi Puspitasari	1.450.000.000,-	1.258.605.000,-
5.	Eko Sulistyo	1.085.750.000,-	1.025.000.000,-
6.	Ferdinand Hutabarat	800.000.000,-	750.000.000,-
7.	Ganda Simamora	1.200.000.000,-	800.000.000,-
8.	Haji Eeng Saefullah	1.500.000.000,-	1.200.000.000,-
9.	Iin Sugiarti	460.000.000,-	600.000.000,-
10.	Johanes Chandra	675.000.000,-	590.000.000,-
11.	Kliwon Parlaungan	215.000.000,-	218.000.000,-
12.	L. P. Pangaribuan	700.000.000,-	713.940.000,-
13.	Muhammad Yasin	310.000.000,-	238.000.000,-
14.	Nelly Murni	1.200.000.000,-	1.185.000.000,-
15.	Octavianus Hasibuan	325.000.000,-	200.000.000,-
16.	Parlindungan Pakpahan	1.600.000.000,-	1.550.000.000,-
17.	Quraisy At-Tamimi	2.400.000.000,-	2.178.000.000,-
18.	Robert Siallagan	425.000.000,-	390.000.000,-
19.	Sanusi Telaumbanua	550.000.000,-	430.000.000,-
20.	Tumpak Harefa	4.200.000.000,-	4.050.000.000,-
21.	Ucup Kertajaya	1.100.000.000,-	856.525.000,-
22.	Victoria Magdalena	240.000.000,-	260.000.000,-
23.	Wahidin	2.700.000.000,-	2.900.000.000,-
24.	Xavianus Augustus	540.000.000,-	390.000.000,-
25.	Yohana Tanjung	1.500.000.000,-	800.000.000,-
26.	Zainuddin Chaniago	2.000.000.000,-	1.708.000.000,-
27.	Ahmad Fauzi	720.000.000,-	650.000.000,-
28.	Baharuddin Sinaga	510.000.000,-	430.000.000,-
29.	Charles Simarmata	275.000.000,-	261.692.000,-
30.	Dedy Misbah	1.400.000.000,-	1.100.000.000,-
31.	Eman Suparman	85.000.000,-	80.000.000,-

Tabel 1. Sumber data: Pemilik rumah di kelurahan "XYZ"

Dari data objek-objek pajak tersebut di atas kemudian dilakukan pengukuran tendensi sentral dengan membuat tabel seperti pada Tabel 2.

NO.	S	A	A/S
1	2.400.000	2.100.000	0, 875
2	375.000	237.675	0,634
3	1.075.000	1.245.000	1,158
4	1.450.000	1.258.605	0,868
5	1.085.750	1.025.000	0,944
6	800.000	750.000	0,937
7	1.200.000	800.000	0,667
8	1.500.000	1.200.000	0,800
9	460.000	600.000	1,304
10	675.000	590.000	0,874
11	215.000	218.000	1,014
12	700.000	713.940	1,020
13	310.000	238.000	0,768
14	1.200.000	1.185.000	0,987
15	325.000	200.000	0,615
16	1.600.000	1.550.000	0,969
17	2.400.000	2.178.000	0,907
18	425.000	390.000	0,918
19	550.000	430.000	0,782
20	4.200.000	4.050.000	0,964
21	1.100.000	856.525	0,779
22	240.000	260.000	1,083
23	2.700.000	2.900.000	1,074
24	540.000	390.000	0,722
25	1.500.000	800.000	0,533
26	2.000.000	1.708.000	0,854
27	720.000	650.000	0,903
28	510.000	430.000	0,843
29	275.000	261.692	0,952
30	1.400.000	1.100.000	0,786
31	85.000	80.000	0,941
	34.015.750	30.395.420	27,480

Tabel 2.

Ket Tabel 2.:

$S = Sales$ (harga jual)

A= Assessment (NJOP)

$$A/S^* = \text{Median Ratio} = 0,903$$
$$A/S = \text{Mean Ratio} = 0,886$$
$$A/S^{**} = \text{Weighted Mean Ratio} = 0,893$$

Median Ratio (A/S)* diperoleh dengan jalan *Assessment Ratio* yang ada di peringkat secara berurutan, mulai dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar dan nilai tengahnya merupakan nilai *Median* sebesar 0,903. Sedangkan *Mean Ratio (A/S)* merupakan hasil pembagian dari jumlah total *Assessment Ratio* (27,480) dengan jumlah observasi (31) sehingga diperoleh angka *Mean Ratio* sebesar 0,886. Salah satu ukuran yang diperlukan lagi adalah yang disebut *Weighted Mean Ratio (A/S**)* yaitu perbandingan antara total *assessment* (A) dengan total harga jual (S). Pada tabel diatas, besarnya *Weighted Mean Ratio* adalah $30.395.420/34.015.750 = 0,893$.

Pengukuran Tendensi Sentral

Pengukuran tendensi sentral dari *Assessment Ratio* dilakukan untuk menguji apakah ada kecendrungan *under assessment* ataupun *over assessment* terhadap hasil penilaian. Pengukuran tendensi sentral terdiri dari perbandingan antara *Mean Ratio* dengan *Median Ratio*, perbandingan antara *Mean Ratio* dengan *Weighted Mean Ratio*, dan perbandingan antara *Median Ratio* dengan *Weighted Mean Ratio*.

1. Perbandingan antara *Mean Ratio* dengan *Median Ratio*

Perbandingan antara *mean* dengan *median* akan memberikan indikasi adanya *under assessment* atau *over assessment*. *Under assessment* menunjukkan suatu keadaan bahwa hasil penilaian berada di bawah harga pasar, sedangkan *over assessment* menunjukkan bahwa hasil penilaian di atas harga pasar. Aturan umum yang berlaku adalah apabila jumlah sampel paling sedikit 30 dan rasio dari *mean* terhadap *median* lebih dari 1,10 hal ini menunjukkan bahwa *over assessment* lebih serius dari *under assessment*. Namun apabila rasio dari *mean* terhadap *median* kurang dari 0,95 hal ini menunjukkan

bahwa *under assessment* lebih serius dari *over assessment* (IAAO:127).

Dari angka-angka yang ada, apabila dihitung perbandingan antara *Mean Ratio* dengan *Median Ratio* adalah sebesar: $0,886/0,903 = 0,981$. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penilaian terhadap objek-objek yang ada di Kelurahan “XYZ” tidak menunjukkan adanya *over assessment* ataupun *under assessment* yang serius. Dalam arti walaupun apabila dilihat secara kasus per kasus ada indikasi *over* atau *under assessment* namun hal tersebut tidak begitu signifikan.

2. Perbandingan antara *Mean Ratio* dengan *Weighted Mean Ratio*

Ukuran berikutnya yang dapat dilihat adalah perbandingan antara *mean ratio* dengan *weighted mean ratio*. Perbandingan antara *mean* dengan *weighted mean* akan memberikan indikasi adanya regresifitas atau progresifitas dari penilaian. Regresifitas adalah suatu keadaan dimana properti-properti dengan nilai yang relatif tinggi telah dinilai dengan tingkatan yang lebih rendah daripada properti-properti dengan nilai yang relatif rendah. Sedangkan progresifitas adalah suatu keadaan di mana properti-



properti dengan nilai yang relatif tinggi telah dinilai dengan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan properti-properti yang mempunyai nilai relatif rendah. Aturan umum yang berlaku adalah apabila jumlah sampel paling sedikit 30 (tigapuluh) dan rasio antara *mean* dengan *weighted mean* lebih dari 1,10 merupakan indikasi adanya regresifitas dalam hasil penilaian. Sebaliknya, apabila jumlah sampel paling sedikit 30 (tigapuluh) dan rasio antara *mean* dengan *weighted mean* kurang dari 0,95 merupakan indikasi adanya progresifitas dalam hasil penilaian (IAAO:128).

Dari angka-angka yang diperoleh dapat dilihat bahwa perbandingan antara *mean ratio* dengan *weighted mean ratio* adalah sebesar: $0,903/0,893=1,011$. Besaran perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi regresifitas ataupun progresifitas dalam penilaian objek-objek di kelurahan "XYZ" tersebut di atas.

3. Perbandingan antara *Median Ratio* dengan *Weighted Mean Ratio*

Pengukuran ketiga yang dilakukan adalah perbandingan antara *Median Ratio* dengan *Weighted Mean*

Ratio. Pengukuran ini menunjukkan kecenderungan yang terjadi dalam penilaian. Kecenderungan tersebut adalah apakah kesalahan dalam *over assessment* lebih besar dari kesalahan dalam *under assessment* dan terdapat elemen progresifitas, atau kesalahan dalam *under assessment* lebih besar dari kesalahan dalam *over assessment* dan terdapat elemen regresifitas.

Apabila *Weighted Mean Ratio* melebihi *Median Ratio*, maka terdapat indikasi bahwa kesalahan dalam *over assessment* lebih besar dari kesalahan dalam *under assessment* dan terdapat elemen progresifitas dalam hasil penilaian. Sebaliknya apabila *Weighted Mean Ratio* lebih kecil dari *Median Ratio* terdapat indikasi bahwa kesalahan dalam *under assessment* lebih besar dari kesalahan dalam *over assessment* dan terdapat elemen regresifitas dalam hasil penilaian.

Dari data di atas, diperoleh bahwa *Weighted Mean Ratio* (0,893) lebih kecil dari *Median Ratio* (0,903) yang menunjukkan bahwa kesalahan dalam *under assessment* lebih besar dari kesalahan dalam *over assessment* dan terdapat elemen regresifitas dalam hasil penilaian.

Kesimpulan (Penutup)

Dari pengukuran yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penilaian terhadap perumahan di kelurahan "XYZ" dengan data hasil rekayasa menunjukkan bahwa walaupun terdapat *over assessment* dan *under assessment*, namun tidak terlalu serius, dalam arti hanya beberapa objek yang mengalami *over assessment* dan *under assessment*.



Ilustrasi: hariandepok.com

IMPOR BERAS, KEBERPIHAKAN KEPADA SIAPA?

oleh: Indrayansyah Nur
Widyaiswara STAN



Ilustrasi: harianterbit.com

Pada berita di salah satu media, Rabu, 25 Februari 2015, disampaikan bahwa pemerintah tidak memilih impor beras dalam mengatasi kenaikan harga komoditi tersebut (Kompas, 25 Februari 2015). Tentu saja ada pertimbangan pemerintah ketika memutuskan untuk memilih kebijakan seperti ini. Salah satunya adalah, masuknya impor beras dapat membuat harga komoditi ini menjadi jatuh dan tidak menarik bagi petani. Lalu di mana posisi pemerintah dalam penyediaan barang-barang pertanian (beras). Apakah lebih memihak kepada produsen atau konsumen?

Komoditi pertanian memang memiliki keunikan relatif dibanding komoditi lainnya. Apabila harganya tinggi, maka akan memberatkan konsumen dan dapat memicu inflasi yang tinggi, mengingat barang ini dibutuhkan oleh semua orang. Sebaliknya, apabila harganya rendah, menjadi tidak intensif bagi petani dan dapat menimbulkan kelangkaan beras. Bila ini terjadi, maka persoalan makin sulit untuk diselesaikan. Untuk itulah pemerintah melakukan penentuan harga atau intervensi terhadap pasar. Salah satunya dengan melakukan operasi pasar, dimana pemerintah menjual ke pasar

dengan harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku.

Sesungguhnya tidak ada keinginan negara di manapun untuk menjual produk atau jasa kepada masyarakatnya. Sangat ideal apabila pemerintah mampu memenuhi seluruh hajat kebutuhan masyarakat secara gratis. Namun demikian, dalam penyediaan kebutuhan masyarakat/publik tentu saja menimbulkan biaya. Dan ini membawa implikasi kepada pendistribusian biaya kepada masyarakat. Disitulah dibutuhkan peranan pemerintah dalam penyediaan barang publik.

Kembali pada persoalan kenaikan harga beras, jelas sekali bahwa pemerintah berupaya untuk menekan harga agar berada pada posisi yang relatif aman bagi petani. Sampai bulan Februari ini, kenaikan harga berkisar Rp1500 sampai Rp2000 per kilogram. Dalam rangka menekan harga pasar ada beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah.

Dalam teori Ilmu Keuangan Publik, kebijakan yang dibuat dapat berupa kebijakan harga positif, kebijakan harga negatif, atau kebijakan penyanggah

(buffer stock policy). Kebijakan harga positif berarti kebijakan yang dilakukan untuk mendorong pesatnya produksi pertanian. Tentu saja insentif bagi petani apabila harganya tinggi dan disinsentif bila harganya rendah. Kebijakan harga negatif sebaliknya. Dan implikasi dari kebijakan harga negatif, berarti pemerintah memberikan subsidi kepada petani agar dalam berproduksi, petani masih mendapatkan margin.

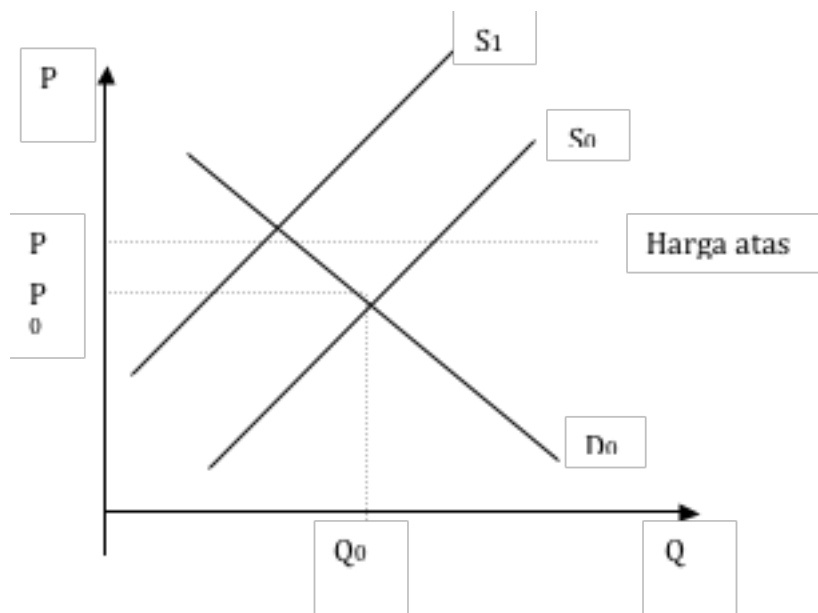
Pada titik ini pemerintah mengalami dilematis, apakah membuat kebijakan yang insentif bagi petani, atau sebaliknya yang dikompensasi dengan subsidi. Sebab bagi pemerintah, baik produsen maupun konsumen adalah juga masyarakat yang harus dipenuhi segala hajat dan kebutuhannya. Untuk itu kebijakan penyanggah dapat menjadi alternatif terbaik dalam mengatasi dilematis ini. Adapun instrumen yang digunakan adalah harga dasar (*price floor*) atau harga maksimum (*ceiling floor*). *Price floor* digunakan untuk melindungi produsen, agar harga produk di pasar tidak lebih rendah dari harga yang ditetapkan sedangkan *ceiling price* ditujukan untuk melindungi konsumen agar tidak menderita karena harga yang

tinggi. Gambar 1 menjelaskan lebih lanjut. Pada awalnya, keseimbangan terjadi pada tingkat harga P_0 dan output sebanyak Q_0 . Selanjutnya terjadi kenaikan harga, akibat pasokan beras yang sedikit ke pasar. Ditunjukkan oleh bergesernya kurva penawaran ke S_1 . Apabila tidak dibuat kebijakan penetapan harga, maka kenaikan harga akan terjadi di atas P_1 . Dengan adanya penetapan harga, maka kenaikan harga hanya pada P_1 . Bila pemerintah melakukan operasi pasar, dengan target harga kembali seperti harga mula-mula P_0 , maka pemerintah melalui Perum Bulog menjual beras ke pasar dengan harga P_0 . Kebijakan ini digambarkan dengan bergesernya kurva S_1 kembali ke S_0 .

Pada kasus sekarang, ketika harga beras meningkat tinggi, maka pengendalian harga harus menjadi prioritas, agar kenaikan harga komoditi tidak mengganggu perekonomian secara keseluruhan. Untuk itulah pemerintah memilih untuk melakukan operasi pasar. Stok Bulog sampai saat ini masih pada angka 1,4 juta ton. Tidak terlalu mengkhawatirkan, mengingat beberapa tempat sudah mulai panen dan akan

bertambah pada bulan berikutnya. Menurut informasi media, sejumlah daerahpun sudah mulai melakukan operasi pasar. Namun demikian jumlah beras yang dilepas harus dalam jumlah banyak, agar dapat menekan harga beras di pasar. Tanpa jumlah beras yang banyak, akan sulit kebijakan ini dapat menurunkan harga beras yang terlanjur terjadi.

Sebetulnya ada alternatif lain, yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yaitu melakukan subsidi input. Disubsidi harga komoditi akan murah, namun petani tidak dirugikan, karena adanya subsidi pemerintah dalam pembelian barang-barang input. Implikasinya pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk membiayai subsidi. *Opportunity cost* nya adalah pengalokasian untuk pengeluaran pemerintah yang lain berupa pembangunan infrastruktur harus dikurangi. Kebijakan ini diharapkan mampu menopang perekonomian menjadi lebih baik. Namun demikian solusi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan persiapan yang matang oleh pembuat keputusan.



Gambar 1. Kurva Buffer Stock Policy

Dengan demikian secara teori akademik, kebijakan operasi pasar yang dilakukan pemerintah dalam rangka menekan kenaikan harga beras sudah dapat dipertanggungjawabkan. Tentu saja tetap diperlukan langkah-langkah strategis untuk membuat kebijakan lebih efektif. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

- ▶ menjamin operasi pasar terbuka pada banyak pasar, sehingga akan mudah bagi masyarakat yang akan membeli beras operasi pasar.
- ▶ Selanjutnya adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk menyalurkan beras miskin (raskin) kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan bekerjasama dengan kelurahan untuk melibatkan masyarakat melalui RT ataupun RW di tiap-tiap kelurahan.
- ▶ Selanjutnya stok beras yang dilempar ke pasar dipastikan dalam jumlah besar dan cukup untuk kebutuhan masyarakat. Jangan sampai beras operasi pasar justru dimanfaatkan oleh pedagang yang nantinya akan dijual kembali dengan harga yang tinggi.
- ▶ Perlu adanya koordinasi yang baik dengan aparaturnya tingkat kelurahan atau desa dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, agar bantuan menjadi efektif dan langsung menyentuh masyarakat.

Langkah-langkah ini perlu menjadi perhatian pemerintah, agar kenaikan harga beras yang akhir-akhir ini sangat memberatkan masyarakat dapat ditanggulangi. Sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam amanat UUD 1945 dapat terlaksana. Sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, "harga beras jangan terlalu tinggi, tetapi juga jangan rendah karena merugikan petani kita". Semoga apa yang menjadi harapan kita dapat terwujud, yaitu menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia.

OPTIMALISASI JARINGAN DENGAN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK

oleh: M. Ichsan
Pranata Komputer pada BPPK



Ilustrasi: aim.ph

Pendahuluan

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengguna internet ataupun intranet terus meningkat. Peningkatan pengguna jaringan perlu diimbangi dengan peningkatan infrastruktur jaringan yang memadai, agar performa jaringan tetap baik dan pengguna dapat bertukar data atau informasi dengan mudah. Penambahan perangkat jaringan untuk mendukung infrastruktur tidak bisa hanya sekedar menambah agar semakin banyak *user* yang bisa terhubung ke suatu jaringan tertentu. Penambahan perangkat juga akan berpengaruh terhadap performa jaringan dan pengelolaan jaringan yang semakin kompleks.

Dalam mengelola jaringan/*network*, tentu mengenal istilah *Local Area Network* (LAN). LAN merupakan sebuah jaringan skala kecil terdiri dari komputer-komputer yang berada dalam satu tempat yang sama. LAN memiliki *single broadcast domain*, artinya terdapat satu *broadcast* informasi yang akan

mengirimkan ke semua *host*/pengguna dalam LAN tersebut. Dapat dipahami bahwa jika dalam suatu LAN terdiri dari banyak *host* akan berpengaruh juga pada performa jaringan pada LAN yang disebabkan oleh *broadcast traffic* atau kepadatan lalu lintas *packet* pengiriman informasi.

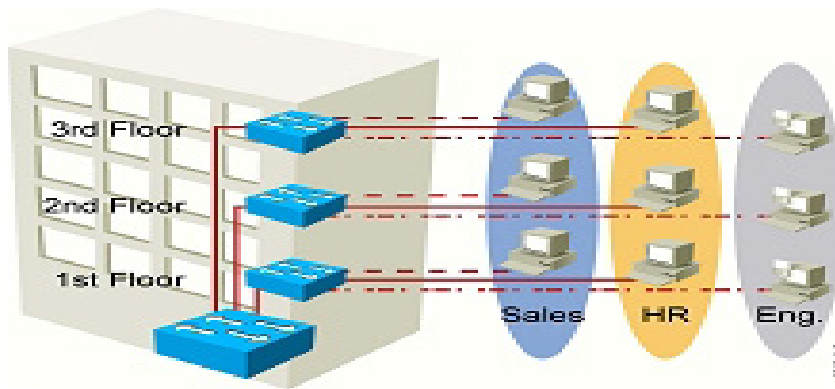
Salah satu cara untuk mengurangi *broadcast traffic* suatu jaringan pada organisasi dapat dilakukan dengan membagi-bagi ke dalam beberapa LAN atau *broadcast domain*. Ilustrasinya, jika dalam satu kantor terdiri dari 500 orang/pengguna terbagi dalam 5 gedung, ada beberapa kemungkinan pembagiannya. Pertama, dengan menggunakan satu LAN, maka satu orang (*single broadcast domain*) bertugas membagikan/menyampaikan informasi kepada semua orang/pengguna kantor atau dengan rasio 1:500. Kedua, dengan membagi menjadi 5 LAN, maka satu orang bertugas membagikan/menyampaikan informasi kepada ± 100 pengguna atau dengan rasio 1:100. Dengan demikian tampaklah pembagian 5 LAN (5 *broadcast domains*)

pada suatu kantor akan lebih cepat dibandingkan dengan satu LAN (*single broadcast domain*).

Pembagian infrastruktur LAN pada suatu organisasi terkadang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Contohnya, dalam satu kantor terdiri dari 4 grup LAN, dimana grup LAN 1 untuk kepala divisi/bagian, LAN 2 untuk staf biasa, LAN 3 untuk staf fungsional dan LAN 4 untuk tamu yang penggunanya tersebar lintas ruangan dan gedung. Jika pembagian LAN ini secara fisik, betapa rumit dan sulitnya penyediaan infrastruktur jaringan untuk masing-masing grup LAN yang ada di kantor. Alternatif solusinya adalah menggunakan *Virtual Local Area Network VLAN*.

Apa itu VLAN?

VLAN merupakan fungsi *logic* dari sebuah *switch* yang mampu membagi jaringan LAN ke dalam beberapa jaringan virtual. Jaringan virtual ini tersambung ke dalam perangkat fisik yang sama. Implementasi VLAN dalam jaringan memudahkan seorang administrator



Gambar 1. Pembagian VLAN

dalam membagi secara *logic* grup-grup komputer secara fungsional dan tidak dibatasi oleh lokasi seperti tampak pada gambar 1.

Komunikasi Data/Informasi dalam VLAN

Dari gambar 1 tampak secara fisik berupa satu jaringan besar yang menghubungkan *host* antar lantai dalam 1 gedung. Namun, secara *logic* jaringan terbagi menjadi 3 VLAN yaitu; VLAN Sales, Human Resource (HR), dan Engineering. Bagaimana proses

komunikasinya? Proses komunikasi *host* dalam Virtual LAN Sales, HR, dan Engineering dapat secara langsung untuk grup yang sama seperti komputer sales di lantai II. Sedangkan untuk berkomunikasi dengan antar grup VLAN seperti komputer HR dengan Engineering menggunakan *protocol* khusus yaitu melalui IP Address gateway. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 2.

Kebutuhan Implementasi VLAN

Kebutuhan dalam mengimplementasikan

VLAN meliputi *hardware*, *software*, dan *brainware*. Kebutuhan *hardware*/perangkat keras diantaranya adalah:

1. Switch yang memiliki standar IEEE 802.1Q atau yang mendukung teknologi VLAN;
2. Router yang mendukung teknologi VLAN;
3. Komputer/Laptop;
4. Kebutuhan bersifat opsional berupa kabel *console* dan *converter serial to USB*.

Selanjutnya, kebutuhan *software*/perangkat lunak yaitu:

1. Sistem operasi perangkat *switch* yang mendukung untuk teknologi VLAN seperti C3750-IPBASE-M ver. 12.2;
2. Sistem operasi perangkat *router* yang mendukung untuk teknologi VLAN seperti mikrotik OS Versi 7.x Level 6;
3. Sistem operasi komputer/laptop seperti windows XP, Vista, dan sebagainya;
4. Perangkat pendukung lainnya sesuai jenis dan tipe perangkat keras yang digunakan.

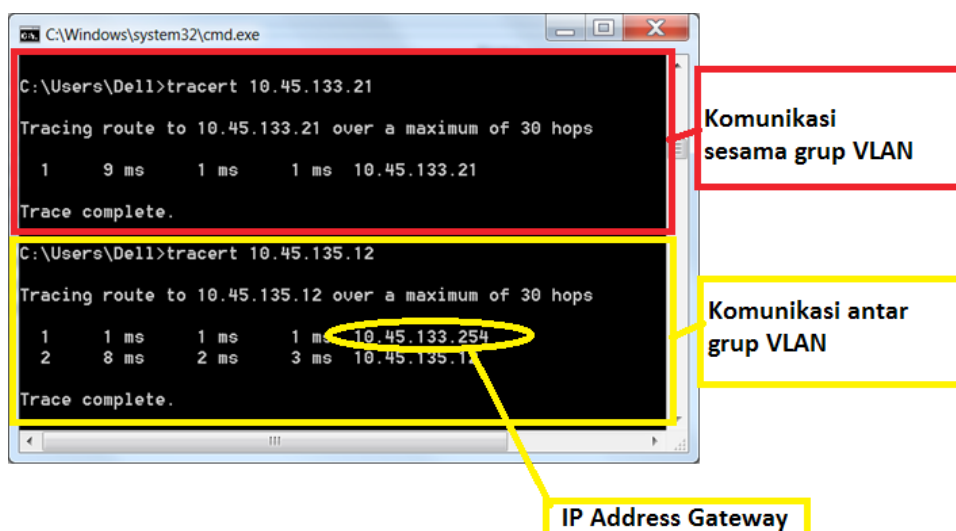
Tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan *brainware* yang akan melakukan implementasi VLAN itu sendiri. Kompetensi/keahlian pegawai administrator yang dibutuhkan yaitu memiliki keahlian khusus dibidang *networking*. Keahlian ini dapat dari pengalaman maupun sertifikasi.

Metode VLAN

Dalam implementasi VLAN pada suatu *network* dapat menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Port-based grouping

Metode ini dilakukan dengan cara mendefinisikan *ports switch* untuk menampung keanggotaan VLAN. Dalam sebuah *switch* dapat dibuat beberapa VLAN dengan memetakan *port* tertentu yang merupakan anggota dari VLAN tertentu. Contohnya dapat di lihat pada gambar 3.



Gambar 2. Komunikasi Host Segrup dan Antar Grup VLAN

2. MAC address based grouping

Metode *MAC address based grouping* dilakukan dengan mengelompokkan *MAC address* komputer atau perangkat yang terhubung dalam *network*. Metode ini mengharuskan seorang administrator jaringan perlu mengetahui *MAC address* dari masing-masing komputer atau perangkat yang akan tergabung di sebuah VLAN.

3. Protocol based grouping

Metode ini berdasarkan *prefix* dari alamat *IP address*. Jadi, setiap paket yang dilewati akan diperiksa terlebih dahulu *header IP address*-nya.

Keuntungan VLAN

Implementasi VLAN pada jaringan di kantor dapat mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur jaringan yang telah terpasang tanpa harus mengubah/menambah jaringan baru. Secara rinci beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya implementasi VLAN diantaranya adalah:

1. Security

Konfigurasi VLAN dalam suatu jaringan memungkinkan pembagian LAN per-divisi maupun jabatan tidak terbatas oleh lokasi dengan perlakuan yang berbeda-beda antar VLAN. Dengan demikian, keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat VLAN tersendiri dengan perlakuan tertentu, sehingga lalu lintas data dibatasi VLAN satu dengan yang lain.

2. Cost reduction

Dari segi biaya, implementasi VLAN memungkinkan sebuah jaringan

dikonfigurasi secara *logic* untuk dilewati beberapa jalur LAN secara virtual. Dengan demikian, penambahan/ perluasan *network* belum tentu menambah perangkat yang secara otomatis dapat menghemat biaya perluasan *network* tersebut.

3. Higher performance

Aktivitas *broadcast traffic* dalam suatu *network* kantor tidak dapat dihindari dan berpengaruh pada performa *network* tersebut. Jika dalam satu *network* kantor terdiri dari banyak *host*/pengguna sedang hanya terdiri dari *single broadcast domain*, tentu *broadcast traffic* menjadi tinggi, yang nantinya dapat menurunkan performa *network*. Oleh karena itu perlu dilakukan pembagian *network* ke dalam beberapa kelompok *broadcast domain* yang lebih kecil. Pembagian tersebut akan mengurangi *broadcast traffic* dan secara otomatis meningkatkan performa *network*.

4. Broadcast storm mitigation

Banyaknya perangkat yang terhubung dalam suatu *network* dengan kompleksitasnya berpotensi meningkatkan *broadcast storm*. *Broadcast storm* ini dapat menghabiskan *bandwidth* yang ada sehingga mengganggu komunikasi data/informasi antar pengguna. Dengan membagi-bagi *network* dalam beberapa VLAN akan mengurangi/melokalisir *broadcast storm*.

5. Improved IT staff efficiency

Kebutuhan pengembangan *network* menggunakan metode VLAN membutuhkan jumlah tenaga yang

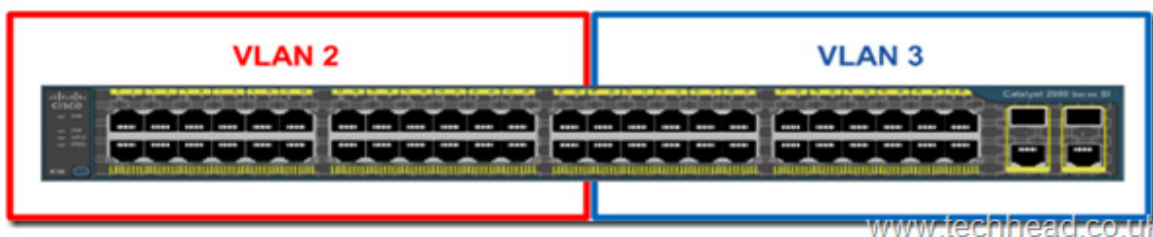
relatif sedikit dengan kompetensi khusus di bidang *networking* seperti *IP Address*, *subnetting IP Address*, *switching*, dan *routing*. Hal ini, tentu memudahkan organisasi dalam pengembangan kompetensi pegawai yang akan menangani *network* agar pengelolaannya optimal.

6. Simpler project or application management

Implementasi VLAN dalam suatu *network* kantor dapat dilakukan dalam skala yang lebih luas, tidak terbatas/terkendala oleh perbedaan lokasi ruang/gedung. Selain itu, penambahan/pembagian VLAN dapat memanfaatkan infrastruktur fisik *network* yang ada. Hal ini dikarenakan implementasi VLAN hanya mengatur fungsi *logic* dari *switch* yang telah terpasang, sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya maupun pengelolaan ke depannya.

Kesimpulan

Implementasi VLAN pada suatu *network* kantor akan lebih optimal jika jumlah *host*/pengguna besar dan tersebar di berbagai ruang/gedung. Dengan optimalisasi ini, organisasi akan mendapatkan banyak keuntungan dari berbagai sisi diantaranya; keamanan data/informasi, efisiensi biaya, performa *network* yang tinggi, dan mudah dalam pengelolaan *network*. Dengan begitu, akan meningkat daya saing organisasi di era persaingan pasar yang semakin kompetitif.



Gambar 3. Port-based grouping

Sumber: <http://techhead.co>

KESADARAN TERHADAP KEAMANAN INFORMASI

oleh: Kusuma Wardhani
Pranata Komputer pada Pusintek



Kemudahan informasi saat ini tentunya membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah menjaga agar informasi yang kita miliki aman. Di sepanjang tahun 2014, terdapat banyak laporan aksi kejahatan pembobolan data secara besar-besaran. Tercatat bahwa data yang berhasil dibobol mencapai 100 TB. Selain itu, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 88,1 juta jiwa (49% pengguna berusia 18-25 tahun, 85% akses internet dengan HP, dan 87,4% akses terhadap jejaring sosial).

Trend Micro Smart Protection Network, sebuah perusahaan *software* keamanan melakukan pemblokiran hampir 65 Milyar ancaman sepanjang tahun 2014 (dengan kemampuan menanggapi 2024 ancaman per detik). Ada 4,3 juta *malware* yang menyerang android, serangan mengalami kenaikan

3 kali lipat dibandingkan tahun 2013. Sedangkan, *malware* yang menyerang IOS naik 80% dari tahun 2013. Sekitar 7 dari 10 responden mengaku menggunakan *password* yang sama untuk lebih dari satu perangkat atau situs web (*survey Trend Micro*). Pada tahun 2010, 76% serangan berada di sektor keuangan sedangkan tahun 2014 sasarannya pusat perbelanjaan umum, industri ritel, kapal, hingga industri transportasi.

Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang vital karena mengelola keuangan negara tentunya memiliki resiko tertinggi terhadap ancaman keamanan informasi. Hal ini dikarenakan data rahasia mengenai aset, utang, pengeluaran, dan pendapatan negara dikelola oleh Kementerian Keuangan. Semakin banyaknya pegawai Kementerian Keuangan yang menggunakan perangkat mobile seperti *handphone* melalui

wifi kantor tentu makin membuat informasi semakin rentan untuk dicuri. Untuk itu, setiap pegawai Kementerian Keuangan sebaiknya menyadari (*aware*) terhadap *information security*/keamanan informasi agar data Keuangan Negara dapat terjaga dengan baik dari ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Definisi Resiko (Risk), Ancaman (Threat), dan Kerentanan (Vulnerability)

Resiko (*risk*) adalah kemungkinan suatu ancaman (*threat*) mengeksploitasi suatu kerentanan (*vulnerability*) pada suatu aset dan mengakibatkan kerugian atau kehilangan aset tersebut. Ancaman (*threat*) adalah sesuatu yang secara potensial dapat menyebabkan kerugian /kerusakan pada organisasi, sistem TI atau jaringan. Kerentanan (*vulnerability*) adalah kelemahan dalam

Date	Notifier	H	M	R	L	Domain	OS	View
2015/01/27	zurbayagatar				R	beasiswa.lpd.depkeu.go.id/fot...	Linux	mirror
2014/11/11	Index Php					kppntapaktuan.depkeu.go.id/ima...	Win 2003	mirror
2014/09/12	Index Php					www.kanwilsumut.djpb.depkeu.g...	Win 2003	mirror
2014/08/26	Genius-Jordan	H	M			kppnsingaraja.djpb.depkeu.go.id	Linux	mirror
2014/08/26	Genius-Jordan	H	M			kppnbatam.djpb.depkeu.go.id	Linux	mirror
2014/08/26	Genius-Jordan	H	M			kppnzurabaya2.djpb.depkeu.go.id	Linux	mirror
2014/08/26	Genius-Jordan	H	M			kppnbanjarmegara.djpb.depkeu...	Linux	mirror
2014/08/20	Genius-Jordan	H	M	R		kppnsijunjung.djpb.depkeu.go.id	Linux	mirror
2014/08/20	Genius-Jordan	H	M	R		kppnpelaihari.djpb.depkeu.go.id	Linux	mirror
2014/08/20	Genius-Jordan	H	M	R		kppnbima.djpb.depkeu.go.id	Linux	mirror
2014/08/20	Genius-Jordan	H	M	R		kppnsorong.djpb.depkeu.go.id	Linux	mirror
2014/03/20	d3b-%				R	www.bppk.depkeu.go.id/webpegaw...	Linux	mirror
2013/10/08	p4TH0M0N					www.beasiswa.lpd.depkeu.go.id...	Linux	mirror
2013/08/13	ALPMAN	H	M			kppnsijunjung.djpb.depkeu.go.id	Linux	mirror
2013/08/13	ALPMAN	H	M			kppnsorong.djpb.depkeu.go.id	Linux	mirror
2013/07/29	Anonymous Persian					helpdesk.djpb.depkeu.go.id/1.1/	Linux	mirror
2013/05/31	Anonymous Persian	H	M			kppnpelaihari.djpb.depkeu.go.id	Linux	mirror

informasi serangan terhadap domain depkeu yang diambil dari zone-h.org

sebuah organisasi, sistem TI, atau jaringan yang dapat dieksploitasi oleh ancaman (*threat*). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa resiko adalah gabungan dari ancaman dan kerentanan.

Ancaman dapat menyebabkan kehilangan kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) aset informasi. Ancaman terdiri dari 3 elemen yaitu pelaku (hal yang membuat munculnya ancaman/*threat* (manusia, mesin, alam), motif (sesuatu yang menyebabkan pelaku beraksi (kebetulan, disengaja, atau gabungan dari keduanya), dan hasil (penerapan dari ancaman). Ancaman dalam bentuk fisik dapat berupa pencurian, pengrusakan, penghilangan, dan penggunaan perangkat tidak semestinya. Ancaman dalam bentuk *malicious codes* seperti virus, worm, trojan, logic bomb, spy ware, dan add ware. Ancaman yang

berupa trik/*techniques* seperti social engineering, dumpster diving, sniffing, hacking/cracking, internet & email vulnerabilities dan files (*.exe; *.jpg; *.dll). Ancaman yang berupa kehilangan informasi seperti pencurian data, penghilangan data, perubahan data, dan kebocoran data rahasia.

Dampak Pelanggaran Keamanan Informasi

Adapun dampak pelanggaran keamanan informasi seperti rusaknya reputasi (*reputation loss*), kerugian finansial (*financial loss*), kehilangan kekayaan intelektual (*intellectual property loss*), pelanggaran yang mengarah pada tindakan hukum (*cyber law*), kehilangan kepercayaan dari pelanggan (*loss of customer confidence*), dan muncul biaya tambahan akibat proses bisnis

yang terganggu (*business interruption costs*). Dampak pelanggaran keamanan informasi dapat menghancurkan sebuah organisasi. Untuk itu, Kementerian Keuangan perlu menjaga keamanan informasi yang dimiliki saat ini.

Definisi Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah upaya perlindungan dari berbagai macam ancaman untuk memastikan kelanjutan bisnis, meminimalisir resiko bisnis, dan meningkatkan investasi dan peluang bisnis (sumber: ISO 27001 tentang *Information Security Management System*). Pengertian Keamanan Informasi dalam KMK No 479/KMK.01/2010 Tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah suatu kegiatan/usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan *information security awareness* adalah agar setiap individu memahami pentingnya keamanan informasi dan tanggung jawab masing-masing. Informasi perlu pengamanan karena informasi itu bagian dari aset, mempunyai nilai, dan kunci kelangsungan organisasi.

Untuk menjaga keamanan informasi, setiap pegawai di Kementerian Keuangan harus mengetahui cara

mengelola informasi yang dimiliki dan diketahui. Salah satu layanan yang sering digunakan untuk berkomunikasi saat ini adalah email. Penggunaan akun email telah diatur dalam KMK No 512/KMK.01/2009 Tentang Kebijakan dan Standar Penggunaan Akun dan Kata Sandi Pengguna.

Berikut tanggung jawab pengguna akun email :

- Memakai kata sandi yang tidak mudah ditebak.
- Mengubah kata sandi yang telah diberikan oleh Unit TIK Eselon I pada saat pertama kali digunakan/ubah default kata sandi.
- Ganti *password* secara berkala (max. 90 hari)
- Menggunakan *screen saver* yang aktif setelah 10 (sepuluh) menit komputer tidak digunakan dan gunakan kata sandi saat mengaktifkan kembali.
- Mengatur konfigurasi komputer yang tidak digunakan dalam 30 menit dibuat mati secara otomatis.

Berikut larangan pengguna akun email:

- Berbagi kata sandi kepada siapapun.
- Membuat kata sandi yang sama di Sistem TIK Kemenkeu dan kata sandi yang digunakan dalam akun di luar Sistem TIK Kemekeu.
- Menggunakan fasilitas *remember password*.
- Menuliskan kata sandi dimanapun

tanpa dienkripsi.

Selain mengetahui tanggung jawab dan larangan pengguna akun email, setiap pegawai juga perlu mengelola kata sandi yang dimiliki. Pengelolaan kata sandi yang baik akan menghindari adanya pembobolan akun email. Adapun kriteria kata sandi yang baik antara lain :

- Terdiri dari minimal dari 6 (enam) karakter.
- Harus menggunakan kombinasi berbagai karakter (huruf besar dan kecil; angka dari 0..9; karakter khusus: @ # \$! & dll).
- Bukan merupakan kata atau akronim dari nama diri atau kerabat, tanggal lahir, alamat, kata dalam kamus, jabatan, lokasi kerja, dan hal lain yang terkait dengan pribadi pemilik Kata Sandi;
- Tidak boleh sama, baik seutuhnya atau sebagian dengan Akun.

Dalam menggunakan internet pun, setiap pegawai sebaiknya berhati-hati karena semakin mudah pencurian data terjadi melalui internet. Untuk itu setiap pegawai sebaiknya tidak mendownload *executable files* (*.exe, *.dll, *.ini), tidak melewati perangkat pengendalian/pembatas akses internet, dan mengunjungi website yang berbau pornografi. Berikut hal-hal yang perlu diwaspadai oleh pengguna akun email Kementerian Keuangan :

- Mengirim email yang berisi ancaman, penghinaan atau pencemaran nama baik orang lain
- Mengakses, download atau upload situs-situs yang tidak menunjang kedinasan.
- Memberikan pendapat pribadi ke pihak lain dengan mengatasnamakan Kemenkeu melalui akses internet.
- Menyebarkan info milik Kemenkeu yg bersifat terbatas, rahasia dan sangat rahasia melalui internet.
- Menggunakan Hak Kekayaan Intelektual pihak lain tanpa persetujuan.
- Menggunakan internet dalam jaringan kemenkeu untuk melakukan *hacking*.

Keamanan informasi adalah upaya perlindungan dari berbagai macam ancaman untuk memastikan kelanjutan bisnis, meminimalisir resiko bisnis, dan meningkatkan investasi dan peluang bisnis

- g. Mengirim email/surat berantai atau mengirim email atas nama orang lain
- h. Bergabung dengan *mailing list*, forum diskusi, ataupun jejaring sosial dengan menggunakan email kemenkeu diluar kepentingan kedinasan
- i. Gunakan email kemenkeu hanya untuk kepentingan kedinasan.
- j. Verifikasi email kepada pengirimnya dan pastikan sesuai dengan judul atau pesan dari email.
- k. Ganti *password* jika telah diketahui orang lain.
- l. Jangan biarkan orang lain menggunakan akun Anda.

Kesadaran penggunaan komputer bagi para pegawai Kementerian Keuangan juga sangat penting agar data yang tersimpan di dalam komputer tetap aman. Selama ini, kita terkadang membiarkan komputer dalam keadaan *unlock* ketika meninggalkan ruangan, padahal hal sepele ini dapat berbahaya jika di dalam komputer kita berisi tentang data rahasia. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pegawai yang menggunakan komputer antara lain :

- a. Gunakan *password* saat mengakses komputer anda serta *lock* ketika anda meninggalkan komputer
- b. Hati-hati ketika menggunakan *password* di perangkat/komputer orang lain
- c. Matikan komputer ketika pulang/ pergi
- d. Hati-hati menyimpan data penting di komputer seperti *password*, nomor kartu kredit, dan tanggal lahir
- e. Lakukan *back-up* berkala untuk data penting
- f. Membiarkan dokumen rahasia terbuka atau mencetak dokumen rahasia di printer umum dan membiarkannya
- g. Membuang laporan/informasi tanpa dihancurkan terlebih dahulu
- h. Memberikan aset informasi dan informasi pribadi kepada pihak lain/

orang asing untuk kepentingan di luar kedinasan

Kesadaran terhadap keamanan perangkat dan barang milik Negara juga perlu diperhatikan. Kejadian pencurian laptop atau kebakaran bisa disebabkan karena kesadaran pegawai yang rendah dan kurangnya pengawasan internal. Berikut hal-hal yang sangat penting dalam menjaga kantor dalam keadaan aman antara lain :

- a. Membawa pengunjung ke area operasi tanpa izin
- b. Membawa barang yang berbahaya dan mudah terbakar di area keamanan
- c. Membawa dan menggunakan media penyimpanan data (*storage devices*) sekalipun tidak mempunyai hak untuk melakukannya.
- d. Hati-hati terhadap orang asing, *piggybacking*, *tailgating*, dan *shoulder surfing*.
- e. Selalu Menggunakan ID Card/ Kartu Tanda Pengenal
- f. Menanyakan surat izin dari pengunjung dan membawa pengunjung hanya diruang resepsionis atau ruang tamu
- g. Ikuti Prosedur Keamanan

Setiap pegawai sebaiknya menggunakan perangkat lunak berlisensi dan menggunakan perangkat lunak berlisensi milik Kemenkeu untuk kedinasan. Jika menggunakan aplikasi bajakan, ada kemungkinan aplikasi tersebut mengandung *malicious codes*. Hal itu sangat berbahaya bagi komputer yang sudah terjangkit *malicious codes*.

Beberapa hal lain yang harus diperhatikan:

- a. Jangan membuka *file attachment* dari orang asing.
- b. Hapus email jika menerima email *spam/junk*.
- c. Selalu waspada terhadap virus.
- d. Hubungi IT *support* jika ada hal yang mencurigakan.

Peran manajemen

Peran manajemen dalam meningkatkan kesadaran keamanan informasi pengguna sangatlah besar. Upaya peningkatan kesadaran ini tentu membutuhkan sinergi banyak pihak agar kesadaran pengguna tumbuh berkembang secara cepat dan menyeluruh. Kemenkeu sebagai organisasi strategis di tingkat nasional, terus berupaya untuk menumbuhkan kesadaran pengguna terkait keamanan informasi. Upaya-upaya yang telah ditempuh Kemenkeu seperti; sosialisasi, seminar, *workshop*, *training* maupun menggunakan media publikasi lainnya. Kesemua upaya tersebut disesuaikan dengan keberadaan dan tugas pengguna / pegawai pada masing-masing unit. Contohnya, untuk pegawai yang bertugas sebagai *administrator* teknologi informasi dan komunikasi, tentu tidak cukup dengan sosialisasi / seminar, maka diikuti sertakan dalam *training* / pelatihan yang menunjang tugasnya sebagai *admin*. Berbeda dengan pegawai yang bertugas sebagai operator, mungkin cukup dengan sosialisasi atau sampai pada *workshop*.

Kesimpulan

Kesadaran terhadap keamanan informasi (*Information Security Awareness*) sangat penting bagi setiap pegawai di Kementerian Keuangan untuk menjaga kerahasiaan data negara tetap aman dari ulah *hacker* atau *cracker*. Tingginya kesadaran terhadap keamanan informasi tentunya akan menambah citra Kementerian Keuangan dan menjaga kelangsungan negara.

PEMAHAMAN SITUASI: PONDASI PENTING PENGEMBANGAN LOGIC MODEL PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH

oleh: Bambang Sancoko
Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Pendahuluan

Berbagai program penanggulangan kemiskinan terus gencar dilakukan oleh pemerintah. Tetapi hasilnya belum dapat dilihat secara memuaskan. Dalam makalahnya, Lukmansyah (2014) menulis ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, masih ada problem dalam implementasi kebijakan yang direncanakan. Kedua, sinergitas dan kerjasama antar lintas kalangan belum sepenuhnya berjalan. Ketiga, kegagalan pendekatan dalam program penanggulangan kemiskinan (<http://www.diklat.lampungprov.go.id/kemiskinan-dan-problem-kebijakan.html>).

Lebih lanjut Lukmansyah mengatakan, dalam pandangan kesejahteraan sosial, penanganan masalah kemiskinan, harus ditangani secara terpadu dan bersinergi, karena kemiskinan dipandang sebagai permasalahan yang bersifat

multidimensi. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat bisa terentang mulai dari kegiatan peningkatan pendapatan (aspek ekonomi), hingga peningkatan kapasitas intelektual atau keterampilan (aspek pendidikan) serta kapasitas fiskal (aspek kesehatan).

Dari tulisan tersebut penulis hendak mengajak kita untuk melihat suatu persoalan bukan hanya dipahami dalam konteks yang tampak saja. Persoalan harus dilihat dan dipahami dalam dimensi yang luas (multidimensi). Dengan demikian maka akan ditemukan akar masalah yang sebenarnya.

Dalam makalah lain yang ditulis Waskitho, dikatakan yang menyebabkan program-program pengentasan kemiskinan tak pernah berjalan efektif. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman banyak pihak tentang realitas kemiskinan itu sendiri (<https://crackbone.wordpress.com>). Banyak

perencana program yang tidak melihat masalah kemiskinan sampai ke akar masalah yang sebenarnya.

Ketidakmampuan memahami dan mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, menyebabkan banyak sekali program-program pemerintah berjalan tidak efektif dan efisien. Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan program tidak menjawab persoalan yang ada.

Pendekatan *Logic Model* sebagai Solusi

Saat ini pemerintah sedang mengembangkan penyusunan program dan kegiatan dengan pendekatan *logic model*. *Logic Model* merupakan suatu metode visual dalam menyajikan ide dan sebuah cara untuk mendeskripsikan dan membagi pemahaman mengenai hubungan antar-elemen yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu program (Knowlton dan Philips, 2013). *Logic model* menggambarkan hubungan

antara sumber daya yang digunakan, aktivitas yang dijalankan, produk yang dihasilkan serta manfaat yang diperoleh.

Dalam Modul Maksi UGM dikatakan bahwa banyak orang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana program mereka berjalan. Padahal, pemahaman tersebut penting dalam mendorong efektivitas dan efisiensi suatu program sebagai solusi terhadap masalah tertentu. Oleh karena itu, *logic model* dibuat untuk dapat membantu:

1. Mengeksplisitkan apa yang diketahui mengenai suatu program;
2. Mengklarifikasi bagaimana program dijalankan (dioperasikan).

Situasi Sebagai Elemen Dasar Pengembangan *Logic Model*

Situasi adalah dasar untuk pengembangan *logic model*. Suatu

program disusun karena adanya situasi yang dihadapi atau dilihat. Program disusun untuk menjawab atau mengatasi situasi yang ada.

Situasi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan yang kompleks dari lingkungan, sosiopolitik, dan ekonomi. Situasi bisa berupa masalah atau isu yang ada. Situasi ini menjadi titik tolak penyusunan elemen-elemen sebuah program.

Oleh karenanya pemahaman yang tepat akan situasi ini sangat penting. Jika kita salah memahami situasi dan salah mendiagnosa masalah, segala sesuatu yang berikut adalah mungkin salah. Jika salah dalam mengidentifikasi situasi maka tidak bisa dirumuskan *outcome* yang tepat.

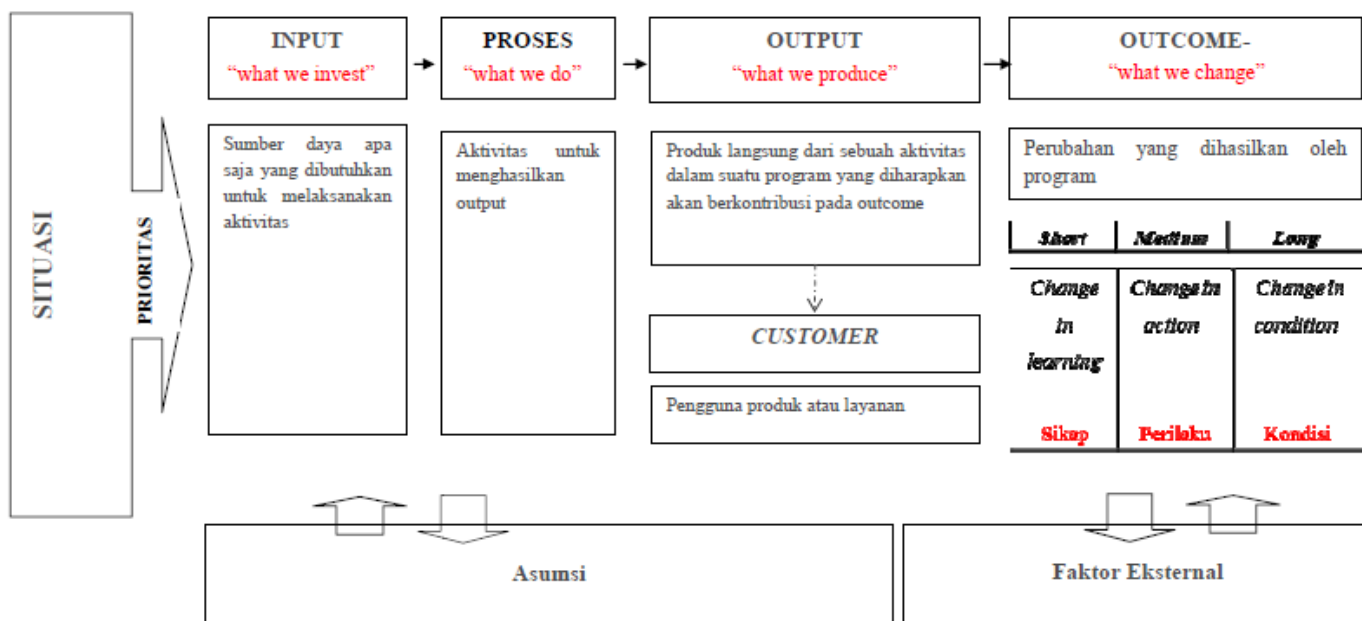
Apabila kita gagal merumuskan *outcome* yang tepat maka *output* yang dirumuskan, program yang disusun,

dan identifikasi *input* yang dibuat bisa menjadi tidak tepat. Akibatnya apabila program itu dijalankan maka akan berjalan tidak efektif dan tidak efisien.

Memahami Situasi Dengan Benar

Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat akan situasi yang dihadapi, suatu unit kerja pemerintah tidak bisa melakukan analisis situasi secara tergesa-gesa. Kita harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk memahami situasi. Dengan waktu yang cukup maka kita akan hati-hati dalam mendefinisikan masalah. Sehingga dengan waktu yang cukup kita akan dapat mendiagnosa akar masalah yang sebenarnya dan mendapat kesimpulan masalah yang harus diselesaikan.

Dalam tahap analisis situasi, kita dapat mempertimbangkan pertanyaan-



Gambar 1
Elemen-Elemen dalam Logic Model
Sumber : Modul Maksi UGM (2013).

Tabel 1
Langkah-langkah Analisis Situasi Untuk Mendapatkan Akar Penyebab Masalah

1	Menyatakan isu atau masalah.	Contoh : ☐ Sangat banyak anak-anak yang mengalami obesitas. ☐ Pertanian dimana masyarakat bergantung padanya mengalami penurunan. ☐ Para pemuda tidak kompeten untuk memasuki pasar kerja. ☐ Masyarakat mengalami konflik atas pengembangan tanah pertanian dan pelestarian lahan pertanian.
2.	Beri pertanyaan “mengapa?” Contoh: Mengapa banyak anak-anak mengalami obesitas?	Jawaban : ☐ Karena mereka makan makanan berlemak. ☐ Karena mereka mendapatkan sedikit latihan. ☐ Karena mereka
3.	Untuk setiap jawaban, beri pertanyaan, “Tapi mengapa?” Lanjutkan terus pertanyaan “Tapi, mengapa? sampai telah terjawab semuanya. Contoh : Tetapi mengapa mereka makan makanan berlemak? Dst.	Jawaban : ☐ Karena mereka menyukai rasanya. ☐ Karena makanannya tersedia dalam rumah/di sekolah. ☐ Karena mereka belum mencoba alternatif makanan yang lain. ☐ Karena ☐ Tapi, mengapa mereka menyukai rasanya? ☐ Karena ☐ Tapi, mengapa mereka ada di rumah/di sekolah? ☐ Karena ... ☐ Tapi, mengapa mereka tidak mencoba alternatif ... ☐ Karena ...
4.	Untuk setiap jawaban, dilihat “Siapa yang terkait – siap yang terkait sebagai bagian dari masalah dan siapa yang terkait penyelesaiannya?	Melibatkan orang lain untuk membantu mendefinisikan dan menjelaskan situasi dan masalah yang membentuk dasar dari pengembangan <i>logic model</i> .

Sumber: University of Wisconsin-Extension (2003).

pertanyaan berikut untuk membantu mendiagnosa masalah :

1. Apa masalahnya (isunya)?
2. Mengapa masalah ini terjadi? (Apa penyebab masalah?)
3. Pada siapa (individu, rumah tangga, kelompok, komunitas, masyarakat pada umumnya) masalah ini terjadi?
4. Pihak manasajayangberkepentingan dengan masalah tersebut?
5. Apa yang kita ketahui terkait masalah tersebut? Adakah hasil riset dan pengalaman masa lalu yang dimiliki? Pelajaran apa yang dapat dipetik darinya?

Dengan contoh pertanyaan-pertanyaan tersebut, perencana program membuat pernyataan singkat tapi menyeluruh yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Pernyataan yang dihasilkan ini akan menjadi dasar dari pengembangan *logic model*.

Hati-hati Adanya Jebakan Dalam Analisis Situasi

Dalam menganalisis situasi kadang-kadang kita akan menemui banyak kondisi yang kompleks. Hal ini menyebabkan kita tidak mudah memahami situasi dan mendiagnosa masalahnya. Adanya banyak hal yang membuat kita bisa menjadi bias dalam memahami masalah. Akibatnya kesimpulan dalam memahami masalah tidak tepat. Misalnya menganalisis seseorang yang sakit kepala karena giginya sakit. Apabila kita menyimpulkan bahwa yang bersangkutan sakit kepala karena sarafnya yang sakit kemudian diberi obat sakit kepala maka tidak akan menyelesaikan masalah.

Oleh karena itu maka perencana harus menghindari jebakan-jebakan (*traps*) dalam analisis situasi. Pertama,

kadang kita mengasumsikan diri telah mengetahui apa yang menyebabkan masalah. Dampak dari asumsi ini, seringkali kita mendapatkan hasil analisis “gejala-gejala” saja daripada sampai ke akar penyebab masalah.

Yang kedua, seringkali kita mendefinisikan masalah sebagai kebutuhan untuk membuat program. Misalnya, “Siswa SMA membutuhkan pelatihan kewirausahaan”. Dari pernyataan ini kemudian kita langsung menyusun program pelatihan kewirausahaan. Dari sini kita melihat rencana program terjebak dengan lebih kepada menyediakan program tanpa menggali lebih dalam apakah kebutuhan yang sebenarnya dan program apa yang akan membuat perbedaan.

Menentukan Prioritas Masalah

Setelah dilakukan analisis terhadap situasi yang ada, mungkin kita akan mendapatkan banyak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Dari hasil analisis yang banyak tersebut tentu tidak semua bisa diselesaikan dengan program yang akan dibuat. Jarang kita dapat melakukan semua hal sehingga kita harus membuat prioritas.

Dari hasil analisis situasi tersebut kita harus melakukan penetapan prioritas. Setelah situasi dan masalah dianalisis sepenuhnya, maka prioritas dapat diatur. Beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan prioritas antara lain:

1. Visi dan misi
2. Nilai-nilai
3. Sumber daya
4. Keahlian dan pengalaman
5. Data historis, apa yang kita tahu tentang situasi dan apa yang orang lain lakukan dalam kaitannya dengan masalah.

Penutup

Memahami akar masalah dari sebuah situasi yang terlihat memegang peranan sangat penting. Hal tersebut akan mempengaruhi ketepatan dalam perumusan *outcome*. Apabila perumusan *outcome* tepat maka kita dapat merumuskan output yang tepat, menyusun aktivitas yang relevan, dan mengidentifikasi input yang dibutuhkan dengan tepat. Dengan demikian maka dapat diklarifikasi dengan jelas bagaimana sebuah program yang diajukan dapat disetujui pendanaannya dan diimplementasikan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Mengingat pentingnya peran pemahaman terhadap situasi pada perencanaan program, maka organisasi harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk menganalisis suatu situasi. Tidak kalah penting dalam tahap analisis ini adalah melibatkan para *stakeholders* terkait untuk merumuskan akar masalah dengan tepat.

DAKON

oleh: Agus Suharsono
Widyaiswara pada Pusdiklat Pajak



Ilustrasi: kebudayaanindonesia.net

Satu lagi permainan anak-anak yang memiliki filosofi tinggi. Dulu, kami menyebutnya dakon, akhir-akhir ini saya baru tahu bahwa ada yang menyebutnya dengan istilah congklak. Anda mungkin seperti saya, dulu pernah memainkannya di ruang tamu atau teras dengan teman sebaya.

Mari kita segarkan ingatan kita, jika mulai lupa. Permainan dakon dilakukan dalam bidang yang mempunyai lima belas lobang. Dua lobang besar diujung kita sebut lumbung. Yang sebenarnya lumbung itu bangunan terpisah dari rumah induk tempat menyimpan hasil panen. Saat ini jarang kita temui rumah tangga yang mempunyai lumbung. Selain kita tidak agraris lagi, juga karena petanipun tidak lagi menyimpan hasil panennya di lumbung, tetapi di bank.

Dakon hanya bisa dimainkan dua orang yang saling berhadap-hadapan. Tidak boleh lebih, juga tidak boleh kurang. Cara main yang pertama harus kita lakukan adalah mengisi keempat belas lobang kecil dengan biji, masing-masing lobang diisi tujuh biji. Bijinya bisa kerikil, kerang, atau yang paling sering adalah biji sawo atau cekik.

Setelah suit untuk menentukan siapa yang harus main pertama, permainan dimulai. Pemain pertama boleh main yaitu mengambil tujuh biji dari tujuh lobang miliknya. Kemudian membagi satu lobang satu biji ke arah kiri. Aturannya jelas, satu lobang hanya boleh diisi satu, tidak boleh lebih. Semua lobang miliknya boleh diisi, jika sudah semua lobang miliknya terisi, giliran mengisi lumbung miliknya. Jika bijinya

masih sisa maka harus mengisi lobang lawan main kita.

Permainan dakon menarik karena jika biji kita habis di lobang kawan, maka kita berhak atas semua biji yang ada di lobang itu. Namun, tetap kita harus mengisi lobang kawan dengan satu biji, berputar ke kiri. Hanya saja, kita tidak boleh mengisi lumbung milik kawan main kita. Permainan berjalan terus, sampai biji terakhir kita jatuh di lumbung atau jatuh di lobang yang kosong.

Masih ada kejutan dalam dakon, jika biji terakhir kita jatuh di salah satu dari tujuh lobang milik kita dan lobang itu kosong, sedangkan lobang milik kawan kita yang berada tepat di depannya berisi biji, maka seluruh biji itu milik kita. Namun, kita tidak boleh menaruhnya langsung ke lumbung kita. Aturannya



Ilustrasi: en.wikipedia.org

tetap sama, kita harus mengisi lobang berputar ke kiri dan mengisi lobang yang dilewati, satu per satu. Jika kita sudah mati langkah, gantian kawan kita yang meneruskan permainan. Aturannya sama.

Filosofi yang dapat kita petik dari permainan dakon ternyata sangat tinggi. Ternyata lobang dakon tidak semua masing-masing tujuh. Ada juga yang lobangnya masing-masing hanya lima ditambah dua lobang besar sebagai lumbung. Pertanyaannya adalah mengapa lobangnya berjumlah lima atau tujuh? Kita harus mencari jawabnya dengan mencari apa yang jumlahnya lima atau tujuh? Ternyata jawabannya adalah hari. Kaleder Masehi, mengenal tujuh hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kalender Arab juga mengenal tujuh hari yaitu Itsnayni, Tsulaatsai, Arbi'aa, Khomiis, Jumu'ati, Sabti, dan Ahadi. Sedangkan hari yang berjumlah lima adalah hari pasaran kalender Jawa yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

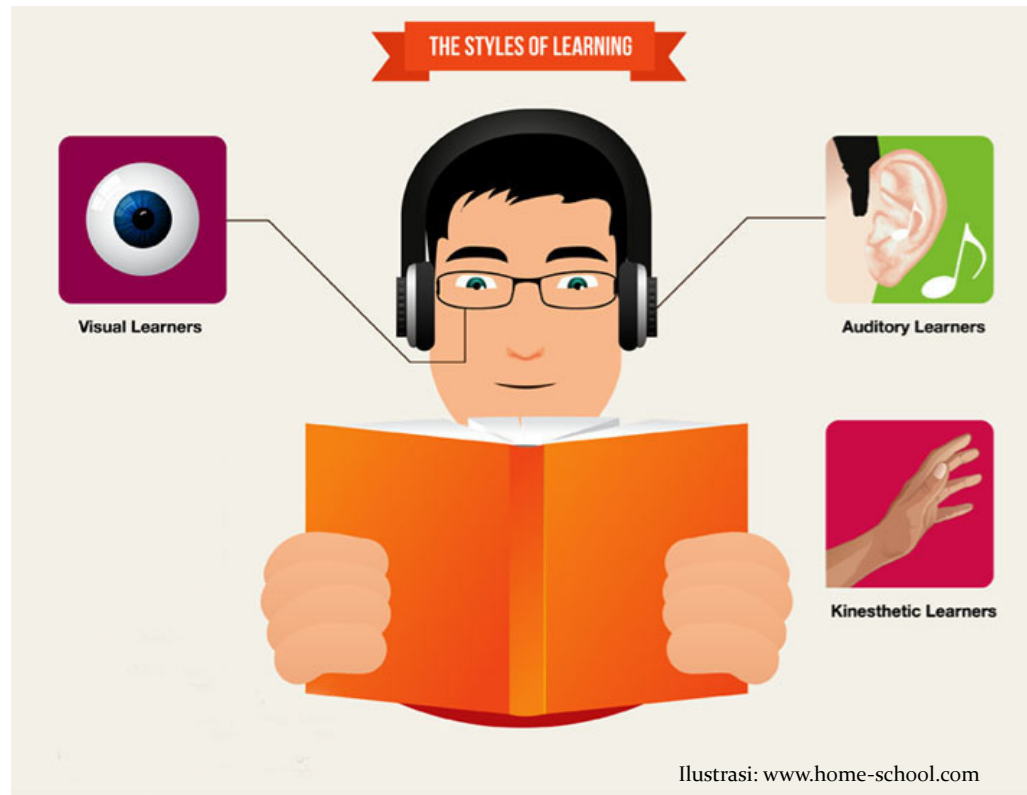
Jumlah biji masing-masing lobang diawal permainan adalah tujuh untuk yang lobangnya tujuh dan lima

untuk yang lobangnya lima. Kita bisa menggenggam semua biji dalam satu lobang, untuk mengawali permainan. Namun kita hanya boleh menaruh satu biji dalam satu lobang. Bukankah ini sebuah pesan bahwa rejeki kita boleh banyak, namun konsumsilah satu, satu dalam arti secukupnya. Sisanya kita bagi ke hari yang akan datang. Jika lebih, tabunglah di lumbung, cukup satu, tidak semua. Kelebihan dari pemenuhan kebutuhan hari-hari kita dan simpanan di lumbung kita, harus diteruskan di lobang-lobang kawan main kita. Kadang kita dapat rejeki yang tidak terduga-duga, yaitu saat biji terakhir kita jatuh di lobang yang kosong namun lobang kawan tepat di depannya penuh. Sebaliknya kita harus menerima keadaan jika kawan yang mendapatkannya. Ada hak orang lain dalam rejeki kita.

Boleh kita membantu teman, namun cukup satu, secukupnya. Jika masih lebih tidak boleh kita isi ke lumbung kawan. Demikian juga jika tiba-tiba ada yang mengisi lumbung kita namun bukan dari usaha kita, harus curiga, jangan-jangan itu bukan hak kita.

ACCOMODATING DIFFERENT LEARNING STYLES IN TEACHING

oleh: Efi Dyah Indrawati
Widyaiswara pada Pusdiklat Keuangan Umum



I went to a parenting seminar at my son's school few weeks ago. The speaker was Mr. Adrin Mizani, a psychologist from Surabaya, who presented on learning modalities to enhance students' learning at school. After the seminar, I tried to reflect on my own teaching, as I am also a trainer. I have known about learning styles years before, but I have never put that knowledge into my own teaching practice. Looking at my own practice, I sometimes find difficult participants in my classes, who make my life a bit unbearable. And I believe I will continue to find difficult persons from time to time in my classes who can fall me back in my own strong emotions such as aggression or worries. The seminar reminds me

of one thing that I sometimes forget to consider in my teaching: using various strategies to cope with different learning preferences.

I think all teachers and trainers know that there are three Learning Modalities as adapted from Barbe, Swassing, and Milone (1979): Visualising style, Auditory style, and Kinesthetic style (VAK). In this article, I would like to describe each (just like what the speaker explained that day) and try to relate that with my teaching plan in my context in Financial Education and Training Agency (FETA).

Visual

Visual learners learn by reading or seeing pictures. They understand and remember things by sight. Also, they can picture what they are learning in their head, and they learn best by using methods that are primarily visual. This means they like to see what they are learning, and in classroom they prefer to sit in the front row to avoid visual obstructions.

The psychologist said that visual learners are usually neat and clean, and they often close their eyes to visualize or remember something, and will find something to watch if they become

bored. But they often have problems with spoken directions and may be easily distracted by sounds. Visuals are attracted to color and to spoken language (like stories), especially one that is rich in imagery.

There are some things that I plan to manage for visual learners to make them learn better:

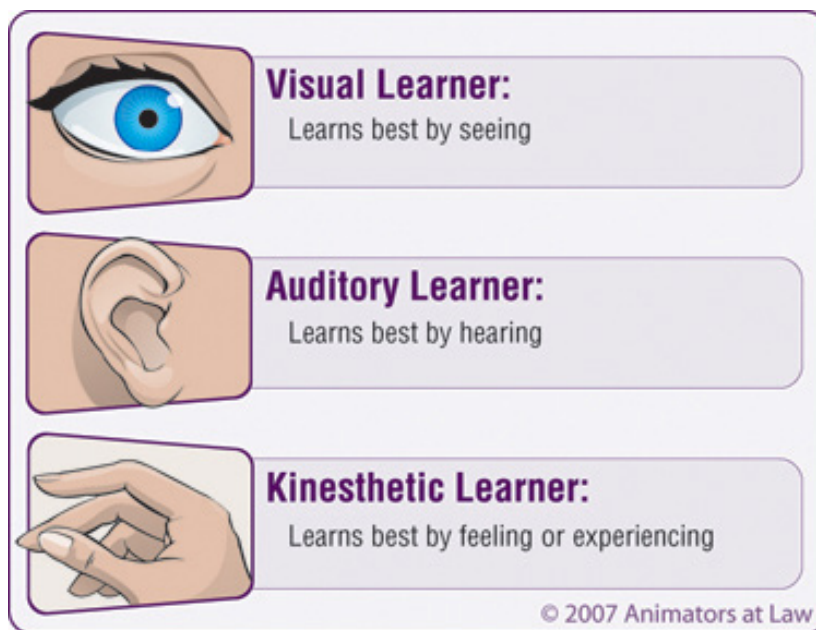
- ▶ Preparing handouts ahead of class so that they have already had detailed notes while listening to my explanation in class. This means I have to be more discipline to submit the handouts at least a week before teaching.
- ▶ Trying to explain in a way that they can visualize things they hear, I can do this by giving more illustrations or just play some videos related to the materials I teach.
- ▶ Writing down key words, ideas, or instructions on white board or flipchart for them. This will also help my participants retain the information in their short-term memory.
- ▶ Drawing pictures, diagram, charts etc., to help explain new concepts and then explain the pictures. I remember that my participants love to have a mind map and charts in their handouts.
- ▶ Coloring code things for them. I think everyone loves colorful things, as long as there is a balanced

combination of them.

While teaching, I will keep remembering that my visual trainees need to **see** things, not just hear things, to learn well. So, I should never fail to use this way of delivery for them.

Auditory

Auditory people learn by hearing and listening, which means they understand and remember things they



have heard. They store information by the way it sounds, and have an easier time understanding spoken instructions than written ones. In addition, they often learn by reading out loud because they have to hear it or speak it in order to understand it.

Now I know that those seemed-bored trainees could be an auditory learner type in my class. I see them sometimes humming or talking to themselves or others as if they are not paying attention. But the thing is, they are actually hearing and understanding everything being said

when I try to check their comprehension.

So now, my plan for auditory learners to help them to learn better will be:

- ▶ Speaking audibly to class, with various intonation, stress, pitch, and tempo. That sure needs a lot of practice for me, as I am a bit monotonous in delivery.
- ▶ Making them read out loud the handouts and modules. I believe this will make them internalize the words and making them their own before they perform with the knowledge I share.

▶ **Reading** texts, assignments, or directions out loud for them. This will sharpen the participants' focus to me.

▶ **Suggesting** them to record the new materials they read and then listen to the recording. I think it also gives a chance to play with their gadget to enhance their own learning.

▶ **Telling** stories or jokes while explaining concepts. I think learning should

be fun, jokes and stories can improve the trainees' mood in learning.

- ▶ Giving oral questions or oral evaluations to them. Checking the comprehension like this can give me immediate feedback that they understand things I explain to them.

I will keep remembering that the auditory trainees need to **hear** things, not just see things, in order to learn well. So, controlling my voice is the best way to

gain their attention and to keep them in the learning zone.

Kinesthetic

Kinesthetic learners are tactile, they learn by touching and doing. This means that they understand and remember things through physical movement. They are a “hands-on” learner who prefers to touch, move, build, or draw what they learn, and that is why they tend to learn better when some type of physical activities are involved. Mr. Adrin Mirzani said that these learners need to be active and take frequent breaks. Also, they often speak with their hands and with gestures. And once more, they easily remember things that were done but may have difficulty remembering what they saw or heard in the process.

Now I understand why some participants in my class have difficulty sitting still. They like to take things apart and put things together, or find reasons to tinker or move around, going in and out of class when they become bored. I see they often communicate by touching, and I think probably they will appreciate physically expressed forms of encouragement, such as a pat on the back. I can do that with ladies participants. For gentlemen, I could just ask them to do high-five with me.

Other things that I can do for my kinesthetic learners like can be:

- ▶ Planning activities for them that involve touching, building, moving, writing, or drawing.
- ▶ Giving hands-on activities like completing certain projects, taking walks, or role playing. These are sure to happen in my speaking class.
- ▶ Letting them bring more food inside class they would love to much and chew something.
- ▶ Tolerating their walking around,

rocking in a chair, tapping a pencil, shaking foot, or holding on to something while learning.

- ▶ Arranging them in pairs or groups to discuss and share ideas. Group works are sure tactile things for kinesthetic learners.
- ▶ Giving frequent breaks during explaining periods (frequent, but not long)
- ▶ Playing games and physical energizers occasionally (especially in the afternoon classes)
- ▶ Making them use computer or laptop to reinforce learning through the sense of touch. It is digital era, so smart phones and tablets must be occasionally used in class to finish certain tasks.

Since I know that kinesthetic people learn best by **doing, moving, or touching**, not just by reading, seeing, or hearing, I will try my best to involve them in many activities in class. The more active they are, the better their understanding they have.

I agree that almost no one falls neatly into only one learning style, and there are still many other models for learning styles exist, most notably David Kolb's Experiential Learning Model and Learning Style Inventory (Mr. Mirzani also described that a lot in the seminar, but I will explain it in another occasion). But that simple VAK concept will always be kept in my mind. From now on, I have to put various methods into my teaching to reach the majority of my trainees, no matter how much the time assigned for the session given. That means, a more serious session-planning prepared ahead before teaching.

MENGELOLA FOTO DENGAN ADOBE LIGHTROOM (BAGIAN I)

oleh: Muhammad Fath K.
Pelaksana pada Sekretariat BPPK

Pada era digital saat ini, semua bentuk media penyimpanan telah berubah dari awalnya yang berupa penyimpanan fisik, menjadi penyimpanan digital. Begitu juga untuk foto, yang awalnya berupa film, kini telah berubah menjadi *file*. Semakin mudahnya untuk mengambil foto, membuat kita semakin banyak memiliki *file* foto. Di satu sisi hal ini tentu sangat menguntungkan karena kita memiliki banyak foto dari momen bahagia kita, tetapi di sisi lain dengan makin banyak *file* membuat kita bingung bagaimana untuk mengelola *file* tersebut agar mudah dicari saat dibutuhkan.

Saat ini sudah banyak aplikasi pengolah foto, tetapi untuk aplikasi pengelola foto, bisa dibilang baru sedikit. Beberapa rekan seringkali bertanya kepada penulis tentang perangkat lunak pengolah foto sekaligus pengelola *file* yang cukup mumpuni dan profesional. Aplikasi yang dapat digunakan adalah Adobe Lightroom.

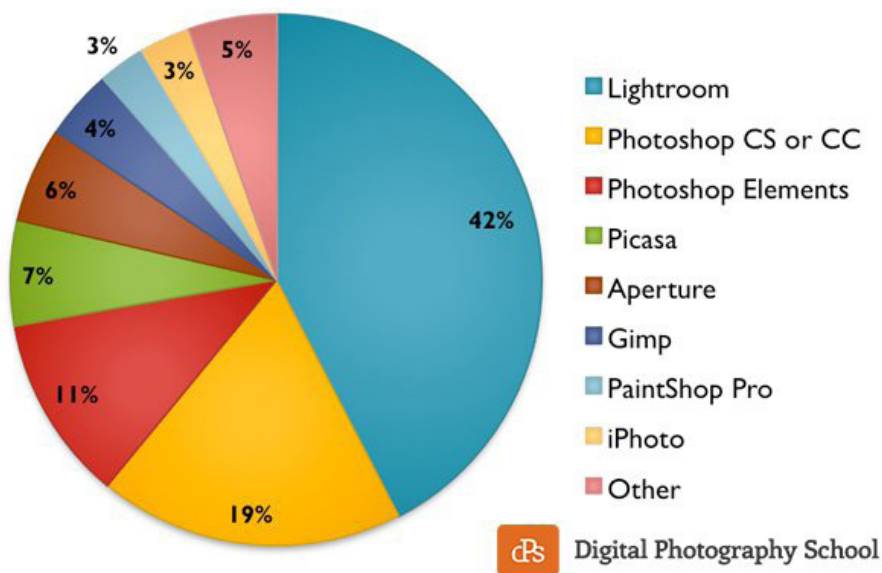
Dikalangan fotografer, aplikasi ini sangat populer (Grafik 1). Adobe Lightroom adalah *software* pengolah foto yang cocok untuk para fotografer. Aplikasi ini memang sangat baik jika digunakan untuk mengolah foto secara profesional. Adobe Photoshop diperuntukan selain untuk *retouch* foto juga untuk membuat suatu manipulasi foto. Adobe Photoshop Lightroom lebih kearah *retouch* photo

dan permainan efek warna.

Ada beberapa modul dari Lightroom yang sering dimanfaatkan:

Library | Develop | Map | Book | Slideshow | Print | Web

Post Processing Software Poll December 2013



Grafik. 1

1. Modul Library

Modul Library adalah inti dari Lightroom. Karena Lightroom adalah sistem pengoptimalan *database*, maka aplikasi ini menyediakan cara bagi fotografer untuk mengatur dan mengelola foto-foto, baik dengan mencari dan menemukan *file* di *setup* mana pun, termasuk foto yang tersimpan pada jaringan dan media penyimpanan eksternal. Di modul Library ini kita memulai bekerja termasuk mengimport file pada saat pertama kali dan menentukan dimana file *Raw* atau *JPEG* tersebut akan kita simpan.

Pada modul Library di Lightroom akan tersimpan secara otomatis semua file informasi atau *metadata* seperti bukaan (*Aperture*), kecepatan rana (*Shutter speed*), ISO, Penggunaan *Flash*, serta koordinat bagi kamera yang menggunakan GPS. Di tulisan bagian pertama ini kita akan membahas tentang modul Library.

2. Modul Develop.

Modul Develop adalah bagian paling favorit bagi penulis diaplikasi ini. Modul Develop telah dirancang seperti layaknya sebuah kanvas seniman serta menyediakan alat-alat yang nantinya dapat kita gunakan untuk perbaikan foto. Disinilah perbedaan mendasar antara Lightroom dengan Photoshop. Bahwa yang Lightroom lakukan adalah *image enhancement* (peningkatan kualitas gambar) dan berbeda dengan Photoshop yang lebih kepada *image manipulation* (manipulasi gambar). Manipulasi gambar dengan Photoshop sangat mudah dan fleksibel penggunaannya ketika kita melakukan perubahan elemen-elemen dalam gambar, termasuk menambahkan gambar baru ke gambar yang ada, menghapus hal-hal dari gambar, dan menggantinya dengan unsur-unsur lain dari gambar yang berbeda. *Image enhancement* pada Lightroom tidak mengubah struktur dasar file.

Dari sudut pandang Develop Mode, Lightroom mampu bekerja pada gambar

dalam dua fungsi, yaitu:

1. Mengubah standar elemen "global" gambar, dari Exposure, memulihkan *highlight* dan bayangan, mengkonversi ke *Black and White*, mengasah ketajaman, serta banyak hal lainnya.
2. Penyesuaian lokal panel. Fungsi ini memungkinkan kita untuk melakukan perubahan gambar di area tertentu/yang diinginkan, seperti bentuk model wajah (untuk membuat gambar dengan dampak yang lebih). Fungsi ini juga memungkinkan penggunaanya untuk melakukan penyesuaian dan menciptakan efek yang mudah dihapus atau diubah setiap saat.

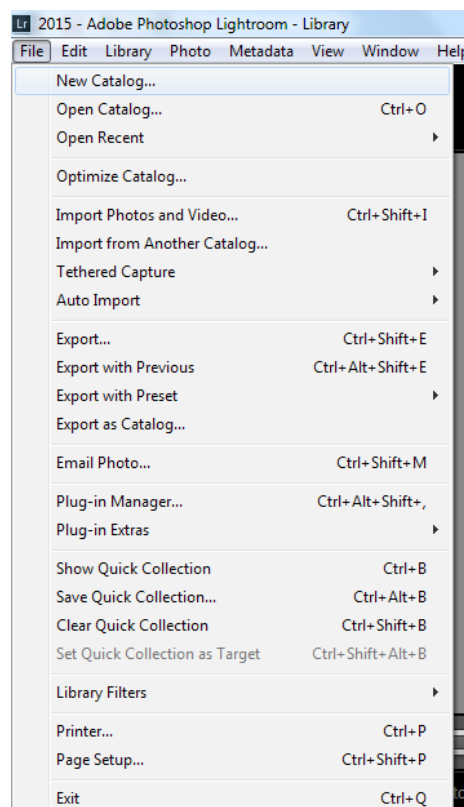
Pada modul Develop inilah semua kegiatan yang berkaitan dengan *image enhancement* kita lakukan (saturasi, warna, ketajaman, kecerahan, pewarnaan, dan lain-lain). Setelah dirasa cukup biasanya penulis pun langsung mengekspornya ke folder yang telah

penulis tentukan sebelumnya.

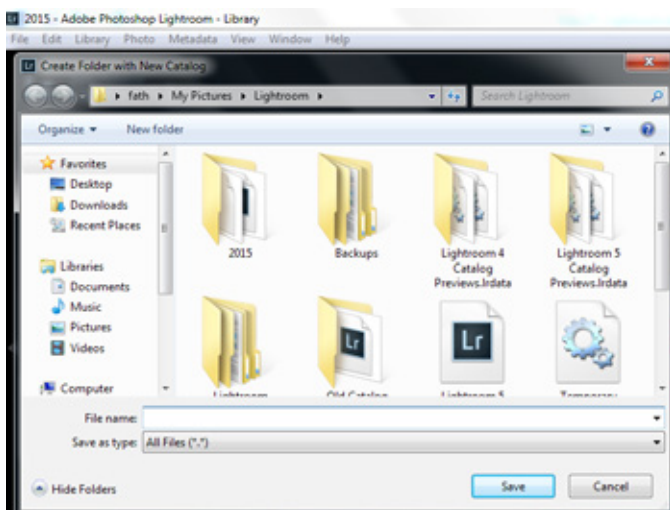
Membuat Katalog di Modul Library

"Katalog" terletak pada modul Library. Fungsi dari katalog adalah untuk mengorganisir *file-file* kita agar nantinya kita bisa dengan mudah untuk melihat atau mengeditnya. Sebagai contoh, katalog kita beri nama "2015", lalu semua foto yang berkaitan dengan tahun 2015 bisa kita *import*. Disarankan untuk menyimpan katalog tidak pada direktori C di *windows*. Mengapa? Karena katalog ini akan tetap berfungsi meskipun *Operating System* (OS) telah kita format ulang, maupun kita buka di komputer lain, baik setingan di modul develop, filter, dll.

Berikut penulis sampaikan langkah-langkah untuk membuat Katalog. Untuk membuat katalog baru, pilih "File" >



Gambar 1



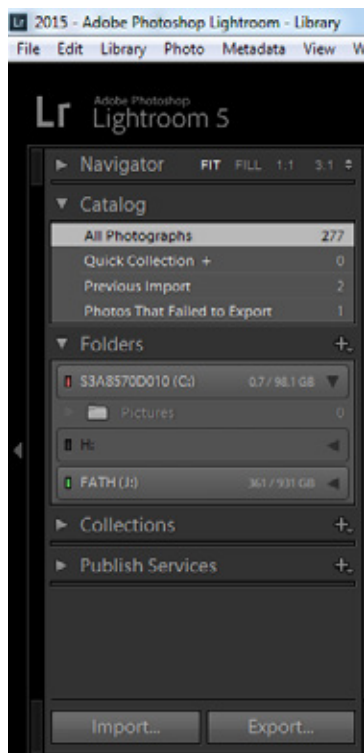
Gambar 2

“New Catalog”. (Gambar 1)

Kemudian, tentukan dimana kita akan menyimpan katalog tersebut, beri nama, lalu klik “Save”. (Gambar 2)

Setelah kita memiliki katalog, maka kita dapat melakukan import *file* yang kita inginkan:

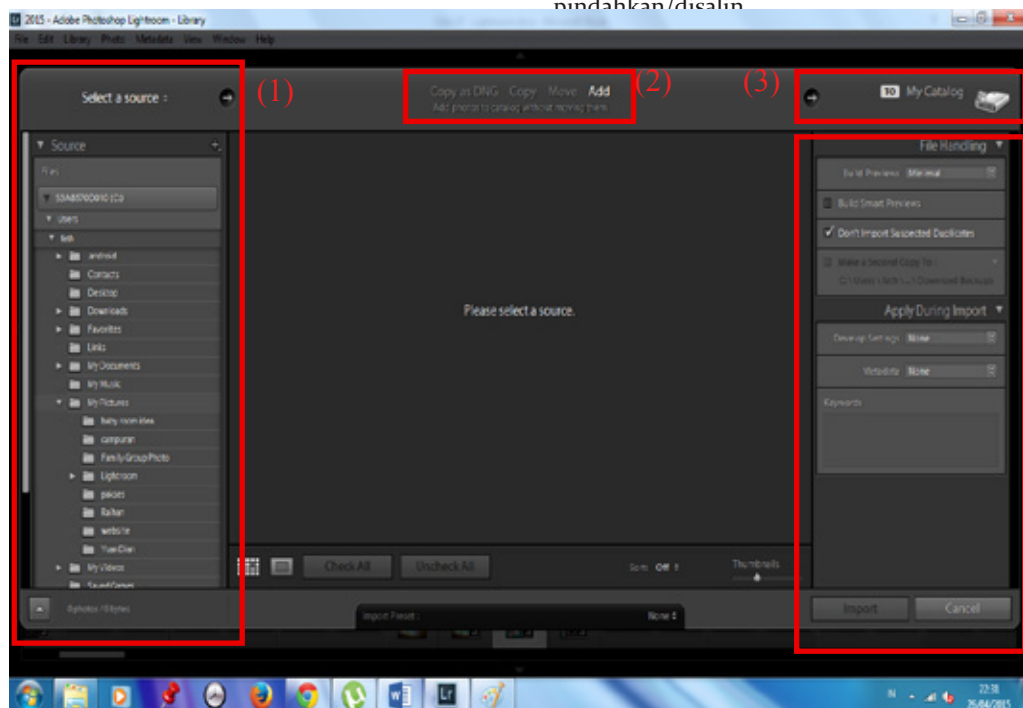
1. Pastikan telah berada pada modul Library:



Gambar. 3

2. Pilih menu Import. (Gambar 3)

3. Lakukan penyesuaian sesuai keinginan pada menu file yang akan kita import.
 - Tentukan dimana file berada. (1)
 - Copy as DNG, Copy, Move, Add. (2)
 - Copy as DNG, dimana *file* yang kita impor akan di konversi ke format DNG (*Digital Negative*).
 - Copy, *file* yang kita impor akan di salin ke lokasi yang baru
 - Move, *file* yang kita impor di pindahkan ke lokasi yang baru
 - Add, *file* yang diimpor akan dimasukkan ke catalog tanpa di pindahkan/disalin



Gambar 4

4. Tentukan lokasi dimana *file* yang kita impor akan diletakkan (3). Khusus untuk “Add”, maka yang tertera hanyalah “To Catalog”, karena *file* tidak dipindahkan/disalin
5. Kita dapat melakukan penyesuaian lebih lanjut, seperti pada menu “File Handling”, dimana kita dapat membuat salinan pada direktori lainnya. Hal ini ditujukan jika ingin membuat *backup*. Pada menu “File Renaming”, kita dapat mengubah nama menjadi sesuai yang kita inginkan. Pada menu “Apply During Import”, ada fasilitas yang akan sangat bermanfaat nantinya, yaitu “Keywords”, dimana kita bisa menambahkan *keywords* atau kata kunci ke dalam file yang kita impor, sehingga memudahkan kita nantinya dalam melakukan pencarian, seperti “Gedung, BPPK, Purnawarman”, dan sebagainya.

Jika merasa telah lengkap, maka kita dapat klik “Import”, maka proses impor akan berjalan. Tunggu hingga selesai, maka kita telah mengisi katalog kita tadi, dengan file yang telah kita impor. Jika suatu saat kita membutuhkan file yang kita simpan, maka disinilah peran Lightroom sebagai pengelola *file* gambar. Cukup mencari dengan *keyword* yang telah kita tentukan, maka *file* akan muncul. Terimakasih

DEMAM BERDARAH EBOLA

oleh: dr. Eduard Tambunan
Widyaiswara pada Pusdiklat Pajak



Ilustrasi: flusolution.net

Penyakit yang disebabkan infeksi virus ini sering disertai dengan demam yang tinggi, dan bila diberikan penurunan panas hanya turun sebentar kemudian cenderung naik lagi. Perjalanan ke suatu tempat tanpa disadari dapat menjadi bencana, bila memasuki suatu daerah atau tempat dengan penyakit endemik, khususnya yang disebabkan oleh virus. Seperti penyakit ebola atau yang dikenal dengan demam berdarah ebola yang terjadi di Afrika, pelancong dapat terkena penyakit ini ketika berkunjung ke wilayah tersebut. Penyakit dengan keluhan mirip flu berat yang dapat berlanjut dengan perdarahan.

Dikatakan terjadinya perdarahan pada pasien penderita ebola diakibatkan virus ebola yang masuk ke dalam sel kemudian bereplikasi. Virus tersebut akan membentuk sejenis protein yang disebut dengan Ebola virus glycoprotein. Virus akan menempel pada sel dinding pembuluh darah dan mengganggu permeabilitas pembuluh darah sehingga terjadi kebocoran dan menyebabkan rembesan darah keluar dari pembuluh darah. Bila tidak diatasi gangguan tersebut dapat menyebabkan syok hipovolemik yang berakhir dengan kematian. Gejala perdarahan ini mirip dengan perdarahan yang terjadi pada penderita Demam Berdarah Dengue.

Gejala Penyakit Ebola Virus

Biasanya dua hari hingga tiga minggu setelah terjangkit virus (masa inkubasi) dengan timbulnya demam, sakit pada tenggorokan, nyeri pada otot, dan sakit kepala. Gejala tersebut diikuti dengan mual, muntah, dan diare, mulai timbul perdarahan dan gangguan fungsi liver dan ginjal.

Bagaimana Tertularnya

Virus mungkin didapat melalui kontak dengan hewan yang membawa penyakit tersebut, diketahui kelelawar buah pembawa virus tersebut walaupun kelelawar tersebut tidak sakit. Dapat juga bila terjadi kontak langsung dengan orang yang menderita penyakit ebola virus melalui bagian dari tubuhnya (darah, cairan tubuh atau semen dari penderita). Berbeda dengan demam berdarah dengue yang memerlukan vektor nyamuk aedes aegypti sebagai penular.

Pencegahan

1. Preventif ketika melakukan perjalanan, waspadai penderita yang sudah positif menderita penyakit ebola dengan cara menghindari kontak dengan cairan atau jaringan penderita.
2. Memakai pakaian pelindung dan masker.
3. Berperilaku bersih dengan selalu mencuci tangan dengan memakai sabun dan air mengalir.
4. Memasak makanan, misalnya daging dengan benar (bersih dan matang sebelum dimakan).
5. Dilakukan isolasi pada penderita atau karantina pada orang yang dicurigai terpapar penyakit tersebut sampai terbukti ternyata tidak menderita.

Pengobatan

Dikatakan belum ditemukan obat yang dapat mengatasi penyakit ebola dan belum ditemukan vaksin untuk mencegah tertular penyakit. Meningkatkan daya tahan tubuh dapat menurunkan angka kematian dan pencegahan dehidrasi dengan pemberian rehidrasi oral (mengganti) dengan cairan yang sesuai dengan cairan tubuh atau dengan pemberian infus bila diberikan lebih awal dapat menurunkan angka kematian.



Drs. Haryana, M.Soc.Sc.
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

Drs. Haryana, M.Soc.Sc: Layanan BPPK kepada DJPBn sudah sangat memuaskan. Sebagai organisasi yang terus berkembang, BPPK selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik bagi stakeholdernya. Simak penuturan dari Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Drs. Haryana, M.Soc.Sc, terkait layanan kediklatan yang diselenggarakan oleh BPPK bagi pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Sebagaimana kita pahami DJPBn itu mempunyai visi “Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”. Visi yang telah ditetapkan tersebut tentu saja bukan merupakan hal mudah untuk dicapai serta membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah melalui transformasi kelembagaan yang merupakan turunan dari program transformasi kelembagaan di Kemenkeu

itu sendiri. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, serta yang paling vital adalah mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Dalam melaksanakan program pengembangan pegawai tentu saja kami tidak bisa berjalan sendiri, kami bersama-sama dengan BPPK. Setiap tahapan, mulai dari penyusunan kurikulum, juga dalam pelaksanaan dan evaluasinya, kami juga selalu melibatkan BPPK.

Dengan kemajuan teknologi informasi dan juga sejalan dengan transformasi kelembagaan Kemenkeu, BPPK dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya, sinerginya dan pelayanan kepada eselon I untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pegawai di lingkungan Kemenkeu. BPPK sebagai mitra kerja kami dalam pengembangan

pegawai dituntut untuk menyediakan pelatihan dengan relevan dengan situasi sekarang dan juga *up to date* mengikuti perkembangan yang ada. Terutama dalam menjalani peran sebagai representasi Kemenkeu di daerah merupakan tantangan tersendiri bagi Kantor Wilayah DJPBn. Tidak lagi hanya menyediakan laporan kemudian verifikasi dari penerimaan dan pengeluaran, tapi kami dituntut untuk berpikir secara analitis. Ini bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan dan membutuhkan tambahan kompetensi bagi para pegawai. Sekarang itu kami harus bisa berdebat, dan ternyata mengumpulkan data untuk menyusun kajian fiskal juga tidak mudah. Oleh karena itu, para pegawai kami perlu dibekali dengan kemampuan yang bersifat *softskill*, seperti *public speaking*, transformasi *leadership*, *negotiation skill*, serta pelatihan ketrampilan lainnya. Kami juga menyambut baik apabila

ada kesempatan untuk bisa mengikuti *workshop-workshop* terkait *public expenditure*, metodologi penelitian, dan analisa makro.

Secara umum layanan BPPK kepada DJPBn sudah sangat memuaskan. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, terutama dalam penerimaan sertifikat DUD Tk. I ini terkadang mengalami keterlambatan, padahal sertifikat ini termasuk salah satu syarat dalam kenaikan pangkat. Sering kali kami ditanyakan oleh pegawai terkait sertifikat yang belum diterima. Mungkin hal ini kedepannya bisa lebih ditingkatkan, apakah dengan SOP, atau ada batasan harinya, misalnya setelah pendidikan itu selesai harus beberapa waktu kemudian sertifikat bisa diterima.

Terkait program PPAKP yang sebelumnya diselenggarakan oleh DJPB sendiri sekarang sudah diserahkan untuk ditangani langsung oleh BPPK. Ini juga mengurangi beban kerja kami, karena bagaimanapun juga secara keseharian kami terlibat dengan penyusunan laporan keuangan negara. Kemudian juga untuk akuntansi akrual ini juga bahkan dari awal memang sudah ditangani oleh BPPK, jadi kami hanya menyediakan mungkin tempat, peserta, karena memang sedemikian banyaknya target yang ingin kita didik yang juga tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri. Penyelenggaraan sebelumnya juga sudah melibatkan BPPK sehingga perpindahannya pun juga mulus. Tidak ada kekhawatiran di kami bahwa PPAKP akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kami mengharapkan kerjasama dan hubungan yang telah terbina dengan harmonis ini bisa terjaga dan lebih ditingkatkan. Tidak ada salahnya bila BPPK juga “menjemput bola” mengenai program-program pelatihan yang relevan dengan DJPB, tidak hanya menunggu permintaan. Justru mungkin bisa menawarkan inovasi-inovasi baru yang tidak terpikirkan oleh kami bahwa ada kegiatan-kegiatan seperti itu.

Kalender Diklat BPPK Maret-April 2015

Kalender Diklat



Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Diklat Business Process Modelling (4-8 Mei 2015)

Diklat Implementing Logic Model in Budgeting System (18-21 Mei 2015)

Pusdiklat Bea dan Cukai

Workshop Rules of Origin (4-8 Mei 2015)

Workshop Keberatan dan Banding (11-13 Mei 2015)

DTSS Pengawasan dan Penanganan Barang Berbahaya (18-29 Mei 2015)



Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

DTSD Kekayaan Negara (4-27 Mei 2015)

DTSS Beracara di Pengadilan (5-28 Mei 2015)

Pusdiklat Keuangan Umum

Diklat Legal Drafting (4-8 Mei 2015)

Aksi UKI Kelas Reguler (4-8 Mei 2015)

Diklat Manajemen Resiko (22-26 Mei 2015)



Pusdiklat Pajak

Diklat Juru Sita Pajak (25 Mei - 5 Juni 2015)

Diklat Penyuluh Pajak (15 - 19 Juni 2015)

Diklat Penelaah Keberatan Dasar (15 - 19 Juni 2015)

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prajabatan Gol. II (11 Mei - 13 Juni 2015)

Diklat Kepemimpinan Khusus DJP (4 Mei - 18 September 2015)



*jadual bersifat tentative, more info:

website : www.bppk.kemenkeu.go.id

Call Center BPPK : 021-29054300

Resensi Buku “Preferential Rule of Origin”

Oleh : Mohammad Djufri - Widyaiswara Pusdiklat Pajak
 Judul Buku : Ketentuan Umum Perpajakan
 Pengarang : Agus Suharsono
 Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta
 Tebal : 348 Halaman



Tentang Penulis

Penulis buku ini adalah Agus Suharsono. Beliau adalah Widyaiswara di Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. Beberapa buku karyanya telah diterbitkan dalam skala nasional. Saat ini beliau aktif menjadi redaktur Majalah Edukasi Keuangan disamping menjadi penulis rutin di majalah tersebut. Beberapa tulisan beliau juga dimuat dalam Majalah Indonesia Tax Review dan Majalah Inside Tax.

Resensi Buku

Banyak buku tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang telah diterbitkan, namun buku ini terasa spesial, karena Penulis menjelaskan KUP secara gamblang dengan metode Circum Navigation, sebagaimana dijelaskan pada Bab I.

Kalau biasanya mempelajari KUP adalah dengan cara membaca pasal demi pasal secara berurutan, dengan metode ini mempelajari KUP ibarat menggunakan sebuah peta (*map*). Awalnya, Pembaca dibawa untuk memahami kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Terkait kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha dibahas dalam Bab II.

Setelah memiliki NPWP dan/atau dikukuhkan PKP, selanjutnya dalam BAB III dijelaskan tentang kewajiban untuk membuat pembukuan dan pencatatan,

diantaranya meliputi ketentuan pembukuan dan pencatatan, perubahan metode pembukuan, informasi minimal dalam pembukuan/pencatatan, pembukuan dalam bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, serta kewajiban menyimpan dokumen dasar pembukuan/pencatatan.

Bab IV membahas tentang Pembayaran Pajak. Dalam bab ini dijelaskan batas waktu pembayaran, sanksi administrasi keterlambatan, mengangsur atau menunda pembayaran, sarana pembayaran (SSP) dan tempat melakukan pembayaran.

Setelah membuat pembukuan/pencatatan selanjutnya dalam Bab V dibahas tentang Pelaporan Pajak. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana untuk melaporkan pajak, termasuk sanksi karena Pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran SPT.

Terhadap WP atau PKP dapat saja dilakukan Pemeriksaan atau Verifikasi. Ketentuan tentang Pemeriksaan Pajak dan verifikasi dibahas dalam BAB VI. Hasil dari kegiatan Pemeriksaan atau Verifikasi adalah ketetapan pajak. Terkait ketetapan pajak (Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak) dijelaskan pada Bab VII.

Selanjutnya terhadap ketetapan pajak diatas dilakukan Penagihan Pajak sebagaimana diulas pada Bab VIII. Juga terhadap ketetapan pajak ini dimung-

kinkan adanya upaya hukum oleh WP/ PKP. Terkait upaya hukum ini, dalam Bab IX dibahas ketentuan tentang keberatan, Bab X dibahas tentang pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi (upaya hukum pasal 36 ayat (1) Undang Undang KUP), Bab XI dibahas tentang Pembetulan ketetapan dan Keputusan Pajak, dan Bab XII tentang Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali.

Hasil dari upaya hukum yang dilakukan WP/ PKP dapat mengakibatkan WP/ PKP memperoleh Imbalan Bunga. Terkait Imbalan bunga ini dibahas dalam Bab XIII.

Bab XIV buku ini membahas tentang Ketentuan Khusus dan Ketentuan Pidana.

Mempelajari KUP dengan menggunakan metode Circum Navigation terasa lebih mudah dan ringan. Pembaca seakan dibawa melalui “rute” tertentu dalam mempelajari KUP ini. Sedikit saja yang kurang dari buku ini adalah belum dibahasnya tentang restitusi, padahal dalam Circum Navigation “rute” restitusi ini ada.

Namun tidak berlebihan jika buku karya Agus Suharsono ini menjadi rujukan bagi para praktisi perpajakan, akademisi, mahasiswa dan setiap orang yang mendalami masalah perpajakan untuk dapat mempelajari Ketentuan umum perpajakan secara komprehensif dan mudah.

--oOo--

Kang Edu





Integrity is doing
the right thing
even when no one
is
watching

Formulir jawaban tes (Lembar Jawaban Tes) dengan nomor urut 10-25 dan kolom A-D. Terdapat tanda tangan dan stempel resmi.

**INTEGRITY IS DOING
THE RIGHT THING
EVEN WHEN NO ONE
IS WATCHING**

EDUKASI
KEUANGAN

EDISI 27/2015

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7204131
Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>